



Australian Government



LAPORAN

DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI: IDENTIFIKASI KERENTANAN BERGANDA

Hasil Analisis dan Fasilitasi Diskusi
di Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan
Kabupaten Sumbawa

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*



KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

LAPORAN

DAMPAK COVID-19 TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI: IDENTIFIKASI KERENTANAN BERGANDA

Tim Fasilitator

DR. Yulida Pangastuti, DR. Vina Adriany, Nurman Siagian MA

10 Agustus 2020

ISBN: 978-623-6080-03-0

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2020 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
(KOMPAK)

Penulis:

DR. Yulida Pangastuti

DR. Vina Adriany

Nurman Siagian MA

Publikasi ini adalah produk pengetahuan dari tim penyusun yang namanya tertulis pada buku ini. Temuan, interpretasi, dan ringkasan yang dinyatakan atau disampaikan adalah pandangan pribadi penyusun dan tidak mencerminkan pandangan KOMPAK, Pemerintah Indonesia, Pemerintah Australia, atau lembaga lain yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini. Temuan/kutipan/data/ringkasan sebagaimana dimaksud dalam publikasi ini diperoleh dari berbagai sumber yang dianggap dapat diandalkan. Namun demikian, KOMPAK tidak menjamin dan/atau mewakili, baik tersurat maupun tersirat, mengenai akurasi, kecukupan, keandalan atau kewajaran informasi tersebut dan pendapat yang terkandung dalam publikasi ini.

Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan non-komersial. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silakan menghubungi communication@kompak.or.id

Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

RINGKASAN EKSEKUTIF

“

Dalam situasi Pandemi *Coronavirus Disease 19 (COVID-19)*, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu jenjang pendidikan yang berpotensi mendapat tantangan sangat besar. PAUD memegang peranan yang penting tidak hanya bagi kehidupan anak sebagai individu tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Keberadaan lembaga PAUD membantu pemenuhan aspek tumbuh kembang anak dan pemenuhan hak anak di bidang perlindungan, pendidikan dan kesehatan.

Selain itu PAUD pun telah mampu meningkatkan partisipasi perempuan di sektor publik. Dalam rangka memahami dampak Pandemi COVID-19 pada pelaksanaan PAUD, KOMPAK melakukan telaah identifikasi melalui pengumpulan data dan fasilitasi di Kabupaten Brebes, Pematang dan Sumbawa, yang juga merupakan wilayah intervensi KOMPAK untuk program PAUD Holistik Integratif (PAUD HI).

”

Data dikumpulkan melalui dua metode. Pertama, penggunaan survei daring yang bertujuan mendapatkan gambaran umum mengenai kondisi satuan PAUD berikut tenaga pendidik PAUD selama masa pandemi ini. Survei melibatkan 1,057 satuan PAUD dan 1,863 tenaga pendidik PAUD di ketiga kabupaten tersebut dan dilakukan pada tanggal 6 Juni sampai dengan 5 Juli 2020. Kedua, lokakarya yang dilakukan di tingkat kabupaten dan nasional. Lokakarya melibatkan berbagai unsur dan dinas, termasuk Sekretaris Daerah (SEKDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendidikan, Kantor Agama dan lain-lain, organisasi profesi, seperti Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Raudatul Athfal (IGRA), Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Indonesia (IGTKI), dan juga satuan dan pendidik PAUD. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan induksi tematik untuk menghasilkan konseptualisasi kerentanan.

Temuan kegiatan ini menunjukkan pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap keberadaan PAUD dari sudut pembelajaran, tata kelola, dan juga personalia. Hasil kajian memperlihatkan isu-isu masalah yang muncul dari perubahan moda pembelajaran. Terdapat indikasi mengenai kesulitan lembaga PAUD dalam mengimplementasikan pembelajaran daring maupun pembelajaran jarak jauh baik karena persoalan terbatasnya akses internet, keterbatasan perangkat fisik, dan juga kesulitan menterjemahkan pembelajaran untuk anak usia dini kedalam suasana daring.

Hasil survei juga memperlihatkan bagaimana pandemi ini berdampak kepada pembiayaan dan penganggaran di tingkat lembaga PAUD, dimana satuan terjadi pengurangan belanja yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan. Penurunan pendapatan juga dialami oleh tenaga pendidik dan rumah tangga pendidik. Dalam konteks respon kebijakan, ditemukan isu yang terkait dengan pencairan dana Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), multi interpretasi penggunaan dana desa, serta belum pekanya penyelenggaraan jaring pengaman sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - Dana Desa), bagi pendidik PAUD.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, melalui proses induksi, kajian ini mengidentifikasi kerentanan berganda PAUD dalam konteks Pandemi COVID-19. Kerentanan-kerentanan yang dimaksud adalah kerentanan yang ditimbulkan karena tidak merata, tidak seimbang ataupun bias norma yang membuat PAUD berada di posisi yang tidak menguntungkan. Kerentanan berganda yang menjadi tantangan bagi PAUD di masa COVID-19 adalah kerentanan yang berbasis (1) infrastruktur, (2) kapasitas pembelajaran, (3) usia dan kondisi peserta didik, (4) sosial-ekonomi, (5) pemberdayaan dan keterlibatan PAUD dalam pencegahan COVID-19, (6) sistem kebijakan pendidikan, dan (7) gender. Walaupun PAUD di Indonesia adalah ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, namun kerentanan berganda ini mengindikasikan pentingnya intervensi multi-pihak yang melibatkan sektor lain dan untuk bekerja dari tatanan kebijakan formal hingga norma sosial.

Hasil kegiatan ini merekomendasikan perlunya ada upaya untuk meningkatkan eksistensi satuan PAUD dengan cara mengidentifikasi berbagai sumber anggaran baik di tingkat pusat sampai ke desa yang dapat membantu keberadaan satuan PAUD. Disamping itu, perlu diperkuat kerjasama lintas sektoral antar kementerian dan dinas untuk memastikan keberlangsungan program PAUD. Terakhir, perlu dikembangkan sistem monitoring yang berkelanjutan untuk memastikan potensi dan kondisi kerentan yang dialami satuan PAUD dan juga tenaga pendidik PAUD dapat teridentifikasi lebih awal. Rekomendasi langkah-langkah kebijakan juga dituangkan secara spesifik dalam bentuk matriks.

KATA PENGANTAR

“

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berperan sangat penting untuk menyiapkan anak-anak memasuki jenjang pendidikan formal. PAUD juga berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan, mengurangi tingkat mengulang kelas, dan menekan angka putus sekolah. Lebih dari itu semua, PAUD berperan sentral dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun agar dapat berhasil sesuai yang direncanakan.

Pemerintah di berbagai negara mengakui peran penting PAUD dalam meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mewajibkan PAUD Pra-Pendidikan Dasar bagi anak usia 5 dan 6 tahun sebagai salah satu layanan minimal pendidikan yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 01 Januari 2019.

”

Dampak Pandemi COVID-19 mengakibatkan perubahan secara tiba-tiba keseharian aktivitas masyarakat di semua bidang. Salah satunya bidang pendidikan yang menjadi tantangan yang luar biasa dalam pelaksanaannya. Kemendikbud telah menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh untuk memastikan tetap berjalannya proses belajar-mengajar termasuk pada jenjang PAUD, sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan Kemenkes untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. BAPPENAS bekerjasama dengan KOMPAK melihat pentingnya mendokumentasikan Dampak Pandemi COVID-19 terhadap PAUD. Kegiatan pendalaman dilakukan di 3 (tiga) kabupaten yaitu Brebes, Pemalang dan Sumbawa.

Pembatasan fisik menghambat pergerakan dan pemenuhan layanan esensial anak usia dini. Kesulitan yang dialami oleh PAUD selama pandemi juga mengindikasikan tantangan yang sama bagi sektor-sektor lain, seperti gizi, kesehatan, kesejahteraan dan perlindungan anak usia dini. Dari laporan ini diketahui bahwa ada 7 (Tujuh) Kerentanan Berganda pada PAUD di Masa Pandemi yaitu: (1) Kerentanan Berbasis Infrastruktur, (2) Kerentanan Berbasis Kapasitas Pembelajaran, (3) Kerentanan Berbasis Usia dan Kondisi Peserta Didik, (4) Kerentanan Berbasis Ekonomi, (5) Kerentanan Berbasis Akses Informasi dan Pemberdayaan dalam Pencegahan COVID-19, (6) Kerentanan Berbasis Sistem dan Kepekaan Kebijakan, (7) Kerentanan Berbasis Gender. PAUD HI merupakan peluang untuk mengintegrasikan layanan dan peningkatan kualitas layanan bagi anak usia dini.

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan gambaran dasar mengenai dampak negatif Pandemi COVID-19 pada lembaga dan tenaga pendidik PAUD dan respon pemerintah melalui pendayagunaan kebijakan yang ada maupun melalui penerapan aturan-aturan khusus. Proses pengkajian juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan di tingkat nasional pada Tata Kelola PAUD yang dapat menjawab kebutuhan PAUD pada masa Pandemi.

Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan



Amich Alhumami, Ph.D

KATA PENGANTAR

“ PAUD di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama dua dekade terakhir. Di awal tahun 80-an, PAUD hanya dapat ditemukan di kota-kota besar. Namun sejak tahun 2000, PAUD telah membantu orang tua menjembatani proses transisi anak-anak sebelum pendidikan formal. Sejak pandemi, keberlangsungan PAUD terancam. Hal ini disebabkan oleh beberapa perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh PAUD dibandingkan jejak pendidikan lain yang lebih tinggi.. ”

Situasi pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah menjalankan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan mendorong Menteri Pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan peraturan pembelajaran daring untuk seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia dan relaksasi penggunaan BOP PAUD. Oleh karena itu perlu adanya dukungan kepada pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait kebijakan dalam mendukung PAUD di masa pandemi. Kabupaten, maupun kecamatan dan desa dapat mendampingi satuan PAUD dalam memaknai kebijakan yang dikeluarkan, termasuk dapat melakukan penyesuaian anggaran yang tersedia (APBD, Dana Desa, dll). Daerah juga perlu melakukan analisa kerentanan dan ketahanan, guna mendorong munculnya inovasi atau kesempatan pengembangan lainnya yang dapat mendukung satuan PAUD terdampak COVID-19.

Dukungan KOMPAK terhadap tata kelola penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan dengan mendampingi pemda untuk mempunyai kebijakan dan regulasi yang mendukung PAUD, mendorong adanya kerja lintas sektor untuk menyelenggarakan layanan PAUD terintegrasi dan memfasilitasi alokasi anggaran di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Kegiatan fasilitasi pemda mendukung PAUD pada masa pandemi COVID-19 ini juga dilakukan di 3 kabupaten (Pemalang, Brebes dan Sumbawa) berinteraksi dengan gugus tugas PAUD HI yang didalamnya terdiri dari lintas sektor/OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, satuan PAUD (pengelola, pendidik) dan juga orangtua yang harus mendampingi secara intensif anak-anak usia dini yang berada di rumah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dari hasil fasilitasi tersebut ditemukan dampak pandemi pada aspek pembelajaran dan tata kelola di satuan PAUD. Pada pembelajaran, hanya 61.25% yang melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan metode yang digunakan paling banyak dengan lembar kerja dan penugasan (46.78%), dimana jaringan internet merupakan tantangan PJJ tertinggi.

Sedangkan pada aspek pengelolaan, dampak pandemi menyebabkan pos pendapatan pada satuan PAUD mengalami penurunan baik dari iuran orangtua, SPP, dana desa dan APPBD. Selain itu, status tenaga pendidik banyak yang dirumahkan dan juga mengalami penghentian permanen. Dengan adanya kegiatan fasilitasi ini, hasil survei saat dikemukakan kepada para pihak di 3 kabupaten, telah ditanggapi dan menyepakati beberapa aksi yang dapat dilakukan secara kolaboratif yang dikawal oleh tim gugus tugas PAUD HI di tiap kabupaten.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemda mendukung PAUD dalam masa pandemi ini. Laporan ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan daerah baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Semoga laporan ini dapat dipakai sebagai acuan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk melakukan dukungan kepada satuan PAUD terkhusus dalam masa pandemi COVID-19.

Jakarta, 3 September 2020

KOMPAK


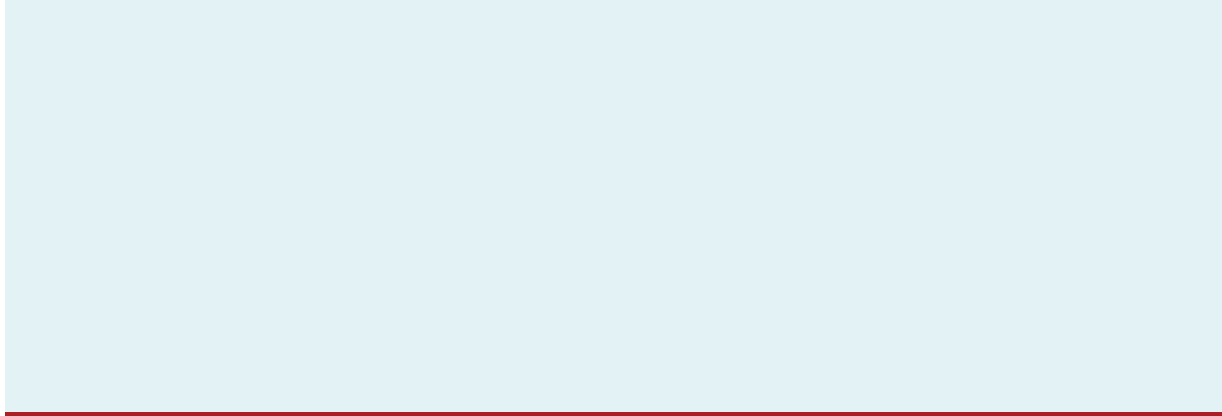


Theodore Weohau

Direktur Implementasi KOMPAK

DAFTAR SINGKATAN

AKB	: Adaptasi Keadaan Baru
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ARNEC	: Asia Pacific Regional Network for Early Childhood
ASN	: Aparat Sipil Negara
ATK	: Alat Tulis dan Kertas
BA	: Bustanul Athfal
Bappeda	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BDR	: Belajar Dari Rumah
BIMTEK	: Bimbingan Teknis
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BOP PAUD	: Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
HIMPAUDI	: Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia
IGRA	: Ikatan Guru Raudhatul Atfal
IGTKI	: Ikatan Guru Taman Kanak Kanak Indonesia
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IQR	: <i>Interquartile Range</i>
KB	: Kelompok Bermain
KDPDT	: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
KEMDIKBUD	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KEMENAG	: Kementerian Agama
KOMPAK	: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
MA	: Madrasah Aliyah
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD HI	: Perkembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
PERMENDIKBUD	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PJJ	: Pembelajaran Jarak Jauh
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PUS	: Pendidikan Untuk Semua
RA	: Raudhatul Atfal
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan



SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SP	: Satuan Pendidikan
SPP	: Sumbangan Pembinaan Pendidikan
SPS	: Satuan PAUD Sejenis
TK	: Taman Kanak Kanak
TK-ABA	: Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal
TPA	: Tempat Penitipan Anak
UNESCO	: United Nations for Educational, Sciencetific and Cultural Organizations
UNICEF	: United Nations Children's Fund

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	4
KATA PENGANTAR DIREKTUR AGAMA, PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	6
KATA PENGANTAR KOMPAK	8
DAFTAR SINGKATAN	10
BAGIAN 1: PENGANTAR DAN METODOLOGI	20
Latar Belakang	21
Tujuan dan Cakupan Fasilitasi	24
Cakupan Geografis	24
Tinjauan Singkat Dinamika Kebijakan Pada Masa Pandemi COVID-19	25
Dinamika Nasional.	25
Dinamika Kabupaten.	27
Status Penyebaran COVID-19 di Ketiga Kabupaten.	29
Metodologi kegiatan	30
Survei.	30
Lokakarya Fasilitasi.	31
Analisis Data.	33
Etik.	33
Keterbatasan.	34
BAGIAN 2: DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PAUD	37
Pendahuluan	38
Karakteristik Responden dan Partisipan	38
Satuan Pendidikan.	38
Tenaga Pendidik.	40
Peserta Fasilitasi Lokakarya.	41
Dampak COVID-19 Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh dan Daring	42
Perubahan Moda Pembelajaran.	42
Pembelajaran Daring.	43
Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh (Daring dan Luring).	45
Dampak COVID-19 pada Perencanaan dan Penganggaran PAUD	46
Perubahan Pendapatan dan Belanja di Tingkat Satuan Pendidikan.	46
Kemampuan Orang Tua Membayar Iuran.	49

Persepsi Kemampuan Bertahan: Seberapa Lama?	50
Dampak COVID-19 pada Tenaga Pendidik PAUD	51
Dampak Perubahan Moda Pembelajaran.	51
Pendapatan Tenaga Pendidik	51
Aspirasi Pendidik.	53
Adaptasi Kebiasaan Baru.	54
Respon Pemerintah Daerah	55
Persepsi Dinas Pendidikan Mengenai Dampak Pandemi Terhadap PAUD.	55
Pemanfaatan Pelonggaran Penggunaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP).	55
Koordinasi Antar Dinas / Dukungan Pemerintah.	58
Dana Desa dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Semasa Pandemi COVID-19.	59
Penutup Bagian 2	59

BAGIAN 3: KONSEPTUALISASI KERENTANAN BERGANDA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI	61
Pendahuluan	62
Kerentanan Berbasis Infrastruktur	62
Kerentanan Berbasis Kapasitas Pembelajaran	63
Kerentanan Berbasis Usia dan Kondisi Peserta Didik	64
Kerentanan Berbasis Sosio-Ekonomi	65
Keluarga Peserta Didik.	65
Tenaga Pendidik.	66
Kerentanan Berbasis Akses Informasi dan Pemberdayaan dalam Pencegahan COVID-19	68
Kerentanan Berbasis Sistem dan Kepekaan Kebijakan	68
Ketidaksetaraan dan Kesejahteraan Pendidik PAUD.	68
Kepekaan Pemerintah Daerah dan Dukungan Kabupaten.	69
Pemanfaatan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Dana Desa.	70
Pendidik PAUD dan Akses Jaring Pengaman Sosial Dampak COVID-19.	71
Kerentanan Berbasis Gender: Tak Kasat Mata?	73
Penutup Bagian 3	74

BAGIAN 4: MENATAP MASA DEPAN MELALUI PENINGKATAN KETAHANAN PAUD	76
Mengembalikan Eksistensi PAUD di Masyarakat.....	77
Menajamkan dan Mengintensifkan Peran PAUD Holistik Integratif	79
Penutup	79
DAFTAR PUSTAKA	80
ANNEX 1: MATRIKS REKOMENDASI	83
ANNEX 2: INSTRUMEN LOKAKARYA	91
ANNEX 3: PENDAPATAN DAN BELANJA PAUD BERDASARKAN BEBERAPA VARIABEL	92

DAFTAR PETA

Peta 1:	Peta Administrasi Kabupaten Brebes	16
Peta 2:	Peta Administrasi Kabupaten Pemalang	17
Peta 3:	Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sumbawa	18

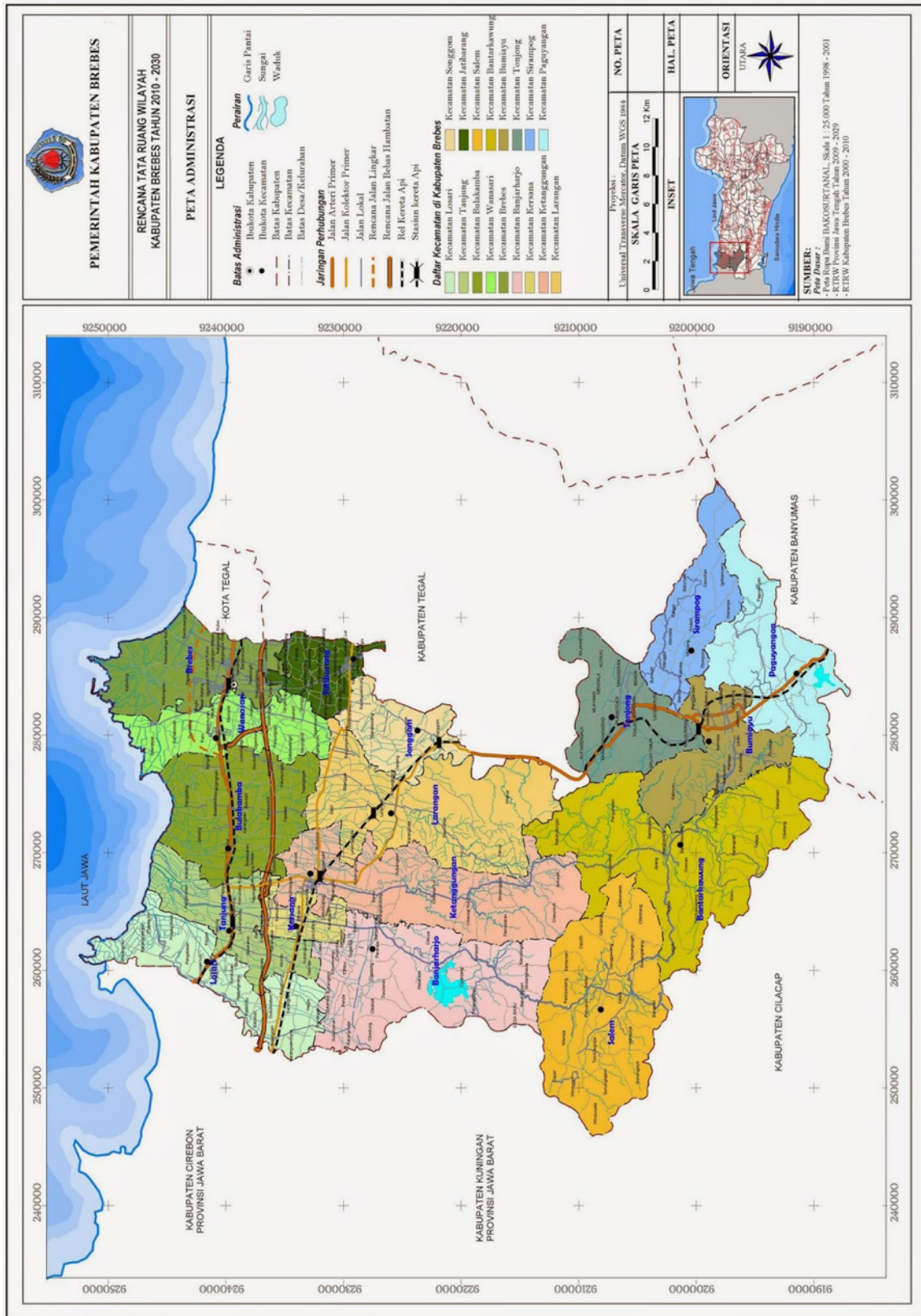
DAFTAR GRAFIK

Grafik 1:	Angka Partisipasi Kasar 2011-2017 di Tiga Kabupaten (Brebes, Pemalang, Sumbawa).....	28
Grafik 4:	Proporsi responden lembaga PAUD berdasarkan berbagai variabel (%)	39
Grafik 5:	Responden tenaga kependidikan berdasarkan beberapa variabel (%)	41
Grafik 6:	Pengalihan moda belajar di satuan pendidikan PAUD selama Pandemi COVID19 (%)	42
Grafik 7:	Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) selama Pandemi COVID19 (%)	43
Grafik 8:	Cakupan peserta didik melalui pendidikan daring berdasarkan kelompok usia (%)	44
Grafik 9:	Kesulitan pengajar dalam pembelajaran daring (%)	45
Grafik 10:	Kesulitan pembelajaran jarak jauh, baik luring ataupun daring (%).....	46
Grafik 11:	Boxplot, belanja non-personalia PAUD sebelum dan selama Pandemi COVID-19	48
Grafik 12:	Boxplot, distribusi belanja personalia sebelum dan selama Pandemi COVID-19	48
Grafik 13:	Boxplot, pendapatan sebelum dan selama Pandemi COVID-19	49
Grafik 14:	Penurunan pendapatan PAUD dari iuran / SPP orang tua (%)	49
Grafik 15:	Persepsi pengelola PAUD tentang keberlanjutan PAUD (Bila Pandemi COVID-19 > dari tiga bulan (%)	50
Grafik 16:	Status bekerja tenapa pendidik PAUD (%)	51
Grafik 17:	Hambatan penggunaan dana BOP PAUD (PERMENDIKBUD 20/2020)	56
Grafik 18:	Pemanfaatan pelonggaran dana BOP PAUD selama Pandemi COVID-19 (%)	57

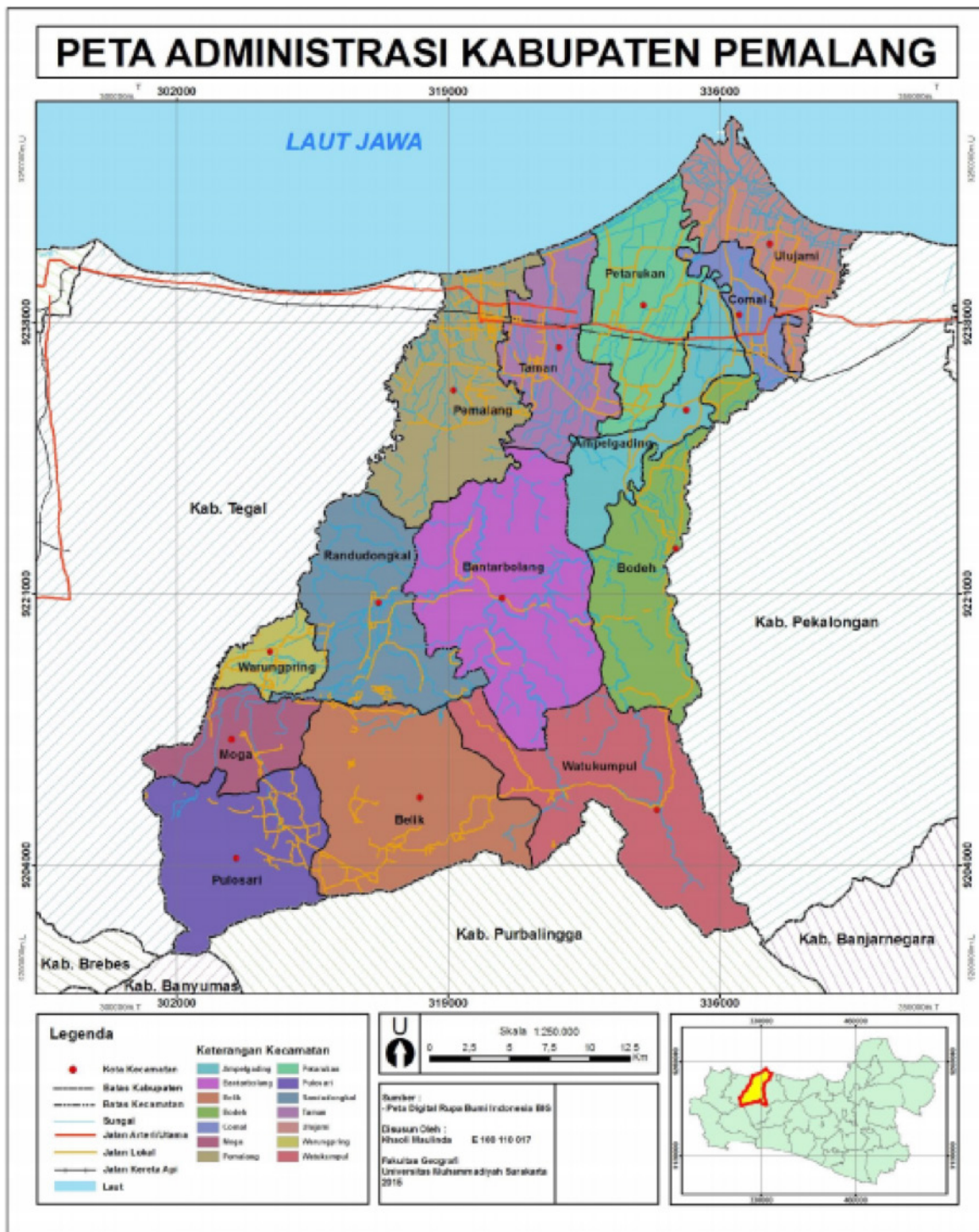
DAFTAR TABEL

Tabel 1:	Jadwal Pelaksanaan Lokakarya	32
Tabel 2:	Jumlah peserta lokakarya dan konsultasi hasil	32
Tabel 3:	Perbandingan median pendapatan dan belanja satuan pendidikan PAUD sebelum dan sesudah Pandemi COVID-19 (Tanpa BOP PAUD).....	47

PETA 1: PETA ADMINISTRASI KABUPATEN BREBES



PETA 2: PETA ADMINISTRASI KABUPATEN PEMALANG





BAGIAN 1

PENGANTAR DAN METODOLOGI

Latar Belakang

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memberikan pijakan kritis untuk anak-anak, tidak hanya dalam hal menjembatani mereka dari dunia pengasuhan keluarga dengan dunia institusi pendidikan, tetapi juga membantu pemenuhan layanan dasar kesehatan, memperbaiki cakupan akta kelahiran dan mencegah kekerasan dan pengabaian. Secara makro, PAUD dapat membantu orang tua dalam pengasuhan yang berkontribusi pada peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja, peningkatan produktivitas ekonomi dan juga aktualisasi diri¹. PAUD di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama dua dekade terakhir. Di awal tahun 80-an, pendidikan pra-sekolah hanya tersedia di kota-kota besar², namun dengan adanya ekspansi akses PAUD yang dilakukan sejak tahun 2000, PAUD memberikan kesempatan yang lebih besar kepada anak-anak di berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan stimulasi dini, pembekalan keterampilan sosial dan psikologis, kesiapan sekolah (*school readiness*) dan membantu peningkatan pemenuhan layanan kesehatan dan gizi dasar serta perlindungan dan pengasuhan³.

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) telah memengaruhi keberadaan PAUD dengan sangat signifikan⁴. Sebagai bagian dari sistem pendidikan di Indonesia⁵, pembelajaran di PAUD selama COVID-19 harus mematuhi pembatasan fisik, sehingga kegiatan harus dilaksanakan melalui mekanisme Belajar di Rumah (BDR) dan mengandalkan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) baik secara daring (*online*) ataupun luring (*offline*)⁶. Untuk mendukung peran lembaga PAUD dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan menanggulangi beban operasional yang muncul karena berkurangnya pemasukan bagi sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD) mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 20 tahun 2020 yang melonggarkan penggunaan dana biaya operasional penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD). Dengan adanya PERMENDIKBUD 20/2020, sekolah diperbolehkan untuk menggunakan dana BOP PAUD untuk membayar keperluan mendesak, seperti honorarium pendidik, membeli perlengkapan pencegahan (disinfektan, sabun cuci tangan, masker), serta keperluan paket data seluler⁷.

- 1 Studi oleh Woetzel et. al (2015) memperlihatkan bahwa kewajiban orang tua, terutama perempuan untuk mengasuh anak merupakan penyebab rendahnya pengembangan kapasitas dan partisipasi perempuan di dunia kerja. Studi yang dilakukan oleh Woetzel et.al memperkirakan bahwa dukungan pengasuhan anak dalam bentuk childcare dapat meningkatkan partisipasi perempuan dan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) 12 hingga 28 triliun dolar. Lihat Woetzel, Jonathan, Anu Madgavkar, Kweilin Ellingrud, Eric Labaye, Sandrine Devillard, Eric Kutcher, James Manyika, Richard Dobbs, and Mekala Krishnan. "How Advancing Women's Equality Can Add \$12 Trillion to Global Growth," July 4, 2019. <https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth>.
- 2 R. Murray Thomas, 'Early Childhood Education in Indonesia', in *Early Childhood Education in Asia and the Pacific: A Source Book* (New York: Garland Publishing, 1992), pp. 95–133.
- 3 Amer Hasan, Marion C Hyson, and Mae Chu Chang, *Early Childhood Education and Development in Poor Villages of Indonesia: Strong Foundations, Later Success*, ed. by Amer Hasan, Marilou Hyson, and Mae Chu Chang, *Directions in Development: Human Development* (Washington DC: The World Bank, 2013) <<https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9836-4>>.
- 4 Koalisi Nasional PAUD HI, *Policy Brief: Dukungan Dan Perlindungan Kepada Pendidik PAUD Terdampak Pandemi COVID 19* (Jakarta, Indonesia, 2020).
- 5 Pemerintah Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* [Republic of Indonesia Law No. 20 Year 2003 on National Education System] (Indonesia, 2003).
- 6 Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sesjen KEMDIKBUD), 'Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19)' (Jakarta, Indonesia, 2020).

Pembatasan interaksi di kondisi Pandemi COVID-19 berdampak mendalam pada PAUD. UNICEF menyatakan bahwa penutupan berbagai fasilitas PAUD memperberat beban perempuan yang harus membagi waktu antara bekerja dan mengasuh anak dan memperburuk pemenuhan layanan perlindungan sosial anak⁸. Sementara UNESCO mengindikasikan setidaknya 18.6 juta guru pra-sekolah di 48 negara Sub-Sahara Afrika dan 4.4 juta guru pra-sekolah (85% adalah perempuan) di berbagai negara di Kawasan Asia Pasifik berada dalam tekanan yang sangat besar, termasuk stres dan disrupsi yang disebabkan oleh pandemi. Di banyak negara, termasuk di Indonesia, tenaga pendidik PAUD di sektor non-formal masih harus bekerja dengan status yang rentan dikarenakan belum diakuinya profesi mereka dalam struktur legal⁹ - berbeda dengan guru-guru di jenjang pendidikan yang lebih tinggi¹⁰. Sheldon Shaefer dari ARNEC bahkan memperkirakan bahwa perkembangan akses PAUD akan mengalami penurunan yang sangat drastis dan mengembalikan banyak negara ke posisi sebelum Kesepakatan Incheon atau bahkan sebelum diluncurkannya Pendidikan Untuk Semua (PUS) dalam Dakar *Framework for Action* di tahun 1990¹¹.

Karakteristik layanan dan model pengelolaan PAUD berkontribusi pada pembentukan kerentanan ini. Secara spesifik, PAUD di Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Faktor pertama adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan pengelolaan PAUD. Tidak seperti jenjang pendidikan dasar dan menengah, sebagian besar PAUD, yaitu sebesar 98.51% adalah milik swasta, di mana harta kekayaan, aset dan biaya operasional ditanggung di luar anggaran pemerintah nasional, termasuk di antaranya adalah PAUD yang dimiliki pemerintah desa, yayasan ataupun perorangan; sedangkan hanya 1.49% yang berstatus negeri¹². Faktor kedua adalah usia peserta didik. Dengan segmen siswa yang masih sangat muda, yaitu di bawah usia 7 tahun, PAUD memberikan layanan yang mengkombinasikan pengasuhan, stimulasi edukasi, pengenalan interaksi sosial dan nilai-nilai dengan metode yang kompleks¹³. Pengalihan kegiatan belajar mengajar melalui tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi sebuah tantangan yang sangat besar, mengingat kebutuhan anak-anak usia dini dan sulitnya pelibatan tanpa interaksi langsung. Faktor ketiga adalah belum diakuinya tenaga pendidik PAUD non-formal dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.

7 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD), 'Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara' (Jakarta, Indonesia, 2020).

8 Anna Gromada, Dominic Richardson, and Gwyther Rees, *Childcare in a Global Crisis: The Impact of COVID-19 on Work and Family Life*, (Florence, Italy, 2020).

9 Berdasarkan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), status "guru" untuk jenjang PAUD hanya diperuntukan guru-guru PAUD Formal atau Taman Kanak Kanak.

10 UNESCO, 'COVID-19 Education Response Webinar: Ensuring Quality of Learning and Well-Being for Young Children in the Context of the COVID-19, 15 July 2020', 2020.

11 Sheldon Shaeffer, 'The World Post-COVID Might Be the World Pre-Incheon — or Even Pre-Dakar', ARNEC Conversations, 2020.

12 KEMDIKBUD, 'Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini per Provinsi', Data Referensi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2020 <<https://referensi.data.KEMDIKBUD.go.id/index21.php>> [accessed 28 July 2020]. (Jakarta, Indonesia, 2020).

13 Jayne Osgood, Jayne Osgood, *Narratives from the Nursery: Negotiating Professional Identities in Early Childhood* (Abingdon, Oxon: Routledge, 2012); Joanne Ailwood, 'Exploring the Care in Early Childhood Education and Care', *Global Studies of Childhood*, 7.4 (2017), 305–10 <<https://doi.org/10.1177/2043610617747977>>.

Tidak adanya pengakuan legal atas profesi pendidik PAUD non-formal¹⁴ berdampak pada pengecualian keberadaan mereka dari mekanisme profesionalisasi, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan¹⁵. Pendidik PAUD non-formal saat sangat signifikan dari sisi jumlah, yaitu 309.899 orang atau lebih dari 46% dari seluruh tenaga pendidik PAUD di Indonesia¹⁶. Faktor keempat yang sangat terkait dengan faktor sebelumnya adalah kenyataan bahwa lebih dari 99% tenaga PAUD adalah perempuan. Keberadaan perempuan sebagai pendidik PAUD tidak dapat dilepaskan dari dominasi persepsi mengenai pengasuhan sebagai tugas perempuan dengan kasih sayang yang feminin antara ibu dan anak - atau dikenal dengan istilah "feminisasi" PAUD¹⁷, bukan sebagai tugas yang membutuhkan keterampilan dengan kompleksitas yang tinggi. Opini mengenai pentingnya karakter keibuan bagi guru PAUD ini membuat posisi perempuan pengajar menjadi rentan. Oleh banyak pihak, kehadiran perempuan sebagai pendidik lebih diartikan sebagai perpanjangan tugas domestik yang bersifat informal dan bukan pekerjaan profesional. Persepsi ini masih sering berujung dengan diskriminasi kebijakan dan juga rendahnya penghargaan dalam bentuk penghasilan¹⁸.

Untuk memahami secara menyeluruh bagaimana Pandemi COVID-19 berdampak pada PAUD, pelaksanaan kebijakan serta kesenjangan yang muncul, diperlukan sebuah proses fasilitasi berbasis data dari lapangan yang dapat membantu respon di tingkat nasional ataupun kabupaten. Melalui mekanisme fasilitasi, KOMPAK mendukung pengembangan tata kelola PAUD, termasuk di periode Pandemi COVID-19, baik di tingkat nasional ataupun kabupaten. Kegiatan fasilitasi ini dilakukan dengan cara memberikan ruang kepada pemerintah daerah dan satuan PAUD untuk dapat berdiskusi, sehingga diharapkan pemerintah daerah lebih mengetahui permasalahan yang terjadi di lapangan dan menjadi pertimbangan ketika menetapkan kebijakan. Di level kabupaten, kegiatan pendampingan telah dilakukan sejak tahun 2019 dan berfokus pada fasilitasi asistensi kebijakan¹⁹ yang mendukung terwujudnya akses PAUD yang merata dan berkualitas. Fasilitasi KOMPAK berbasis dan difokuskan di wilayah dampingan untuk isu PAUD.

14 Pasal 28, Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No.23/2000) mengatur tiga jenis PAUD, yaitu: (1) PAUD Formal, terdiri atas Taman Kanak Kanak (TK) atau sederajat, termasuk TK-ABA (Taman Kanak Kanak Aisyiyah Bustanul Atfal) dan RA (Raudhatul Atfal); (2) PAUD Non-Formal, terdiri atas Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan Tempat Penitipan Anak (TPA); serta (3) PAUD informal berbasis keluarga dan masyarakat

15 Koalisi Nasional PAUD HI.

16 KEMDIKBUD, Statistik PAUD 2019/2020 (Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020) <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>.

17 Janice C Newberry, 'Women Against Children: Early Childhood Education and the Domestic Community in Post-Suharto Indonesia', *TRANS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 2.02 (2014), 271–91 <<https://doi.org/10.1017/trn.2014.7>>.

18 Yulida Pangastuti, 'Expansion of Early Childhood Education in Indonesia: Finding Voices, Telling Stories' (University of Auckland, Auckland, New Zealand, 2020).

19 KOMPAK, sejak tahun 2019, telah mendukung penyusunan regulasi dan perencanaan dalam bentuk peraturan bupati (PERBUP) atau pun rencana aksi daerah (RAD).

Tujuan dan Cakupan Fasilitasi

Di awal penyusunan konsep, tujuan kegiatan ini adalah untuk menghasilkan gambaran dasar mengenai dampak negatif Pandemi COVID-19 pada lembaga dan tenaga pendidik PAUD dan respon pemerintah melalui pendayagunaan kebijakan yang ada ataupun melalui penerapan aturan-aturan khusus. Proses pengkajian juga diharapkan dapat menghasilkan umpan balik bagi kebijakan di tingkat nasional. Dengan mempertimbangkan penahapan kegiatan, keterbatasan waktu dan faktor kesegeraan, maka secara spesifik, kegiatan ini lebih berfokus pada pembentukan pemahaman komprehensif yang dapat menjadi acuan dikembangkannya sebuah tinjauan operasional.

Berdasarkan isu, target utama cakupan dari kajian dan fasilitasi diskusi ini adalah pada level pelaksanaan, yaitu lembaga PAUD dan tenaga pendidik PAUD dikaitkan dengan respon pemerintah daerah dan nasional, dengan fokus pada pembelajaran, pengelolaan, dan ketenagaan. Diharapkan pemangku kebijakan di tingkat nasional, kabupaten dan desa dapat meningkatkan sensitivitas mereka melalui pelaporan kegiatan ini. Diharapkan laporan ini dapat memberikan masukan kepada pengambil keputusan di tingkat nasional, terutama KEMDIKBUD, KEMENAG, dan selaku perencana dan koordinator PAUD HI, BAPPENAS. Kajian ini juga diharapkan dapat menginspirasi kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia, kalangan akademisi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, dan politisi ataupun parlemen.

Cakupan Geografis

Kegiatan fasilitasi ini akan dilaksanakan di tiga kabupaten wilayah dampingan KOMPAK, yaitu di Kabupaten Brebes (Jawa Tengah), Kabupaten Pemasang (Jawa Tengah), dan Kabupaten Sumbawa (Nusa Tenggara Barat atau NTB). Ketiga kabupaten ini merupakan kabupaten yang secara spesifik mendapatkan dukungan KOMPAK untuk pendidikan anak usia dini dalam konsep holistik integratif atau PAUD HI. Pembahasan lebih jauh mengenai perkembangan PAUD di ketiga kabupaten ini akan dibahas di bagian "**Dinamika Kabupaten.**"

Tinjauan Singkat Dinamika Kebijakan pada masa Pandemi COVID-19

DINAMIKA NASIONAL

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya sebuah virus yang dikenal dengan nama *Corona Virus Diseases 19* (COVID-19). Virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Sampai dengan tanggal 18 Juli 2020, jumlah penderita virus COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai 13.876.441 dengan jumlah kematian sebanyak 593.087²⁰. Di Indonesia sendiri, pada tanggal yang sama jumlah penderita telah mencapai 84.882, dengan jumlah kematian sebanyak 4.016²¹. Dengan penyebaran virus yang sangat masif dan ditambah masih belum ditemukannya vaksin untuk mengatasi virus ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama menetapkan kebijakan-kebijakan untuk memperlambat laju kurva penularan, diawali dengan status tanggap darurat yang kemudian dilanjutkan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah.

Dunia pendidikan pun tidak terlepas dari keharusan menjalankan PSBB. Pada tanggal 17 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran (3692/MPK.A/HK/2020) yang memberlakukan pembelajaran daring untuk seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Ketentuan ini mengubah proses pembelajaran langsung menjadi Belajar di Rumah (BDR) dengan moda Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Hasil pendataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD), melalui pendataan dari tanggal 13 s.d 20 April 2020, menyatakan bahwa 97,6% sekolah, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), telah melakukan pembelajaran daring. Sementara itu untuk tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), survei yang dilakukan oleh Koalisi Nasional PAUD Holistik Integratif dari tanggal 4 s.d. 10 April 2020, menyatakan bahwa 92% guru berusaha untuk terus mengajar dari rumah²².

Untuk mendukung ketahanan operasional lembaga PAUD dalam konteks yang berubah, Kemendikbud juga mengeluarkan kebijakan terkait penyesuaian penggunaan BOP PAUD (PERMENDIKBUD no 20 tahun 2020) agar dapat digunakan untuk membayar honor pendidik PAUD, fleksibilitas prosentase alokasi BOP tanpa merujuk pada persentase berdasarkan tiga komponen pada Juknis BOP PAUD sebelumnya, dan penggunaan dana BOP PAUD untuk kebutuhan lainnya terkait COVID-19 untuk belajar dengan daring (internet, kuota data) dan pola bersih dan sehat (hand sanitizer, masker). Kebijakan ini disambut dengan sangat baik oleh satuan pendidikan, walaupun masih ditemukan beberapa tantangan dalam mengakses dana BOP PAUD sesuai dengan kelonggaran yang telah diberikan [isu ini akan dijabarkan lebih lanjut di bagian Pemanfaatan pelonggaran penggunaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)].

20 WHO, "WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard", diakses tanggal 19 Juli 2020, <https://covid19.who.int/>

21 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19, "Persebaran Data", diakses tanggal 19 Juli 2020, <https://covid19.go.id/>

22 policy brief

Pada pertengahan Mei 2020, sebagai salah satu upaya untuk memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaan pembelajaran, melalui Surat Edaran Nomor 15/2020, dikeluarkan ketentuan yang menguatkan pentingnya pembelajaran berdasarkan protokol kesehatan dan prinsip belajar di rumah dan diakuinya pelaksanaan kegiatan belajar dalam bentuk daring dan luring sebagai metode belajar selama Pandemi COVID-19 berlangsung. Kegiatan luring diharapkan dapat dilakukan bagi sekolah yang tidak memiliki sarana pra-sarana pembelajaran berbasis internet, sehingga harus menggunakan fasilitas televisi, radio, penugasan dengan lembar kerja, dan dengan alat peraga. Di dalam regulasi ini, tidak dijabarkan ketentuan yang spesifik untuk anak usia dini.

Untuk memastikan kelangsungan proses pembelajaran di saat Pandemi COVID-19, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD), bersama-sama dengan Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Kesehatan (Kemkes), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 01/KB/2020, No. 516/2020, No. HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-882/2020. Di dalam SKB tersebut, diatur bahwa tahun ajaran baru 2020/2021 untuk PAUD (bersama-sama dengan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) dimulai di bulan Juli 2020. Pembelajaran tatap muka hanya bisa dilakukan di wilayah zona hijau (tidak ada kasus)²³, dan terkhusus untuk PAUD, baru bisa dimulai 4 bulan (atau bulan ke-5) setelah pendidikan menengah dimulai di zona hijau. Peraturan ini kemudian direvisi dengan Keputusan MENDIKBUD Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus, yang melebarkan pembelajaran tatap muka sampai dengan zonasi kuning (resiko rendah) untuk melakukan pembelajaran²⁴. Walaupun akses tatap muka dapat dilakukan di zona kuning, PAUD tetap tidak dapat melakukan kegiatan tatap muka dalam waktu cepat.

Selain kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan pendidikan pada masa COVID-19, KEMDIKBUD juga telah menghasilkan berbagai panduan dan referensi pembelajaran, contohnya 12 buku saku untuk guru PAUD. Selain itu fasilitasi dengan metode webinar, bimbingan teknologi (BIMTEK) daring, pengimbasan oleh guru untuk luring, dan penguatan akses materi televisi dan radio pun dilakukan untuk mendukung kapasitas guru-guru dalam menghadapi moda pembelajaran yang berubah. Sementara secara umum, terkait dengan penanganan kerentanan, pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten telah menggulirkan beberapa kebijakan, seperti subsidi listrik, kartu sembako, kartu pra-kerja, Kartu Indonesia Pintar, program padat karya dan Bantuan Tunai Langsung (BLT). Pada dokumen ini akan dibahas kompleksitas dari kebijakan-kebijakan tersebut, khususnya dana BLT dan bagaimana implikasinya terhadap keberadaan satuan PAUD.

23 Peta Zonasi Risiko daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring pembobotan dari indikator epidemiologi, indikator surveilans dan kesehatan masyarakat serta indikator pelayanan kesehatan, dimutakhirkan per dua minggu sekali. Zona hijau diberikan untuk daerah tidak terdampak, zona kuning untuk daerah dengan resiko rendah, zona oranye diberikan pada daerah dengan resiko sedang dan merah merupakan daerah dengan resiko sangat tinggi. Lihat: <https://covid19.go.id/peta-risiko>

24 Nadiem Makarim, 'Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran Di Masa Pandemi COVID 19 [Powerpoint Presentation]' (Jakarta, Indonesia: KEMDIKBUD, 2020), pp. 1–26.

DINAMIKA KABUPATEN

Kegiatan fasilitasi dilakukan di Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sumbawa. Secara umum, terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan karakteristik dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Sumbawa. Pertama, berdasarkan skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketiga kabupaten berada dalam kelompok sedang²⁵, yaitu 66.12 untuk Kabupaten Brebes²⁶, 66.32 untuk Kabupaten Pemalang²⁷, dan 67.60 untuk Kabupaten Sumbawa²⁸. Dengan kisaran IPM yang sama ketiga kabupaten memiliki rentang harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan sekolah, serta per kapita pengeluaran yang sama²⁹. Dengan demikian, ketiga kabupaten dapat merepresentasikan kabupaten-kabupaten yang memiliki IPM sedikit di bawah IPM nasional, yaitu 71.92³⁰. Seperti banyak kabupaten lain di Indonesia, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Sumbawa merupakan kabupaten yang berhasil menekan angka dan prosentasi kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Brebes berhasil diturunkan Dari 459.300 jiwa (25.98%) di tahun 2008 menjadi 293.180 (16.22%) di tahun 2019. Di Kabupaten Pemalang, angka kemiskinan mengalami penurunan dari 330.800 jiwa (24.61%) menjadi 200.670 (15.41%). Di Kabupaten Sumbawa, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan, dari 904.500 jiwa (21.75%) menjadi 634.900 jiwa (13.90%).

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN BREBES, PEMALANG, DAN SUMBAWA

Berdasarkan jumlah lembaga PAUD, Kabupaten Brebes memiliki 1,222 PAUD dengan izin operasional, Kabupaten Pemalang memiliki 840 PAUD dengan izin operasional, sedangkan di Kabupaten Sumbawa, terdapat 589 PAUD dengan izin operasional. Ketiga kabupaten ini juga merepresentasikan kabupaten-kabupaten yang mengalami perkembangan pesat angka partisipasi PAUD usia 0-6 tahun. Perkembangan PAUD tertinggi terjadi di Kabupaten Pemalang, dimana PAUD mengalami lonjakan dari 32.1% di tahun 2011 berkembang menjadi 68.38% di tahun 2017. Di Kabupaten Brebes, lonjakan angka partisipasi juga terjadi, yaitu dari 27.74% di tahun 2011 menjadi 55.19 di tahun 2017. Sementara untuk Kabupaten Sumbawa, partisipasi PAUD meningkat dari 26.17% di tahun 2011 menjadi 53.04% di tahun 2017³².

-
- 25 Skor IPM sedang adalah 55.00 - 66.90, referensi klasifikasi dapat dilihat http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019_technical_notes.pdf
- 26 "Indeks Pembangunan Manusia (IPM, Metode Baru) Kabupaten Brebes, 2011-2019," BPS Kabupaten Brebes, 13 Juli 2020 diakses melalui <https://brebeskab.bps.go.id/dynamicstable/2020/03/18/417/ indeks-pembangunan-manusia-metode-baru-kabupaten-brebes-2011-2019.html>
- 27 "Tabel 1: Indikator IPM Tahun 2010-2019", BPS Kab. Pemalang, 13 Juli 2020 diakses melalui <https://pemalangkab.bps.go.id/statictable/2015/03/13/17/ ipm-pemalang-tahun-2010-2019.html>
- 28 "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa, 2010-2019 (Metode Baru)", BPS Kabupaten Sumbawa, 13 Juli 2020, diakses melalui <https://sumbawakab.bps.go.id/dynamicstable/2016/11/02/13/ indeks-pembangunan-manusia-ipm-kabupaten-sumbawa-2010-2019-metode-baru-.html>
- 29 Berdasarkan data IPM 2019, berikut adalah capaian IPM berdasarkan komponen. Harapan hidup - Brebes: 69.04, Pemalang: 73.11, Sumbawa: 67.31; Rata-rata lama sekolah - Brebes: 6.20, Pemalang: 6.32, Sumbawa: 7.91; Angka Harapan Lama Sekolah - Brebes: 12.03, Pemalang: 11.91, Sumbawa: 12.97; Rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan (ribu/orang/tahun)- Brebes: 10,238, Pemalang: 8,186, Sumbawa: 9,336
- 30 BPS, "Press Release: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2019 mencapai 71,92", diakses tanggal 13 Juli 2020 melalui <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/17/1670/ indeks-pembangunan-manusia--ipm--indonesia-pada-tahun-2019-mencapai-71-92.html>
- 31 Data diakses dari KEMDIKBUD, Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini, <https://referensi.data.KEMDIKBUD.go.id/index21.php> diakses 28 Juli 2020.

GRAFIK 1: ANGKA PARTISIPASI KASAR 2011-2017 DI TIGA KABUPATEN (BREBES, PEMALANG, SUMBAWA)



Sumber: KEMDIKBUD³³

Keberhasilan ketiga PAUD dalam meningkatkan akses PAUD, tidak terlepas dari komitmen dalam bentuk kebijakan dan penganggaran baik di tingkat kabupaten ataupun di tingkat desa. Dengan dukungan KOMPAK, ketiga kabupaten telah memiliki landasan hukum pelaksanaan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) dengan adanya Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 untuk Kabupaten Brebes, Peraturan Bupati No 40 Tahun 2019 untuk Kabupaten Pemalang, dan Peraturan Bupati No. 27 Tahun 2019 untuk Kabupaten Sumbawa. Selain peraturan bupati, Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang juga berhasil menuangkan komitmen kabupaten dalam pelaksanaan PAUD HI ke dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) yang memwadahi komitmen lintas sektor antara pendidikan, kesehatan, perlindungan, catatan sipil untuk terwujudnya pemenuhan layanan komprehensif bagi anak-anak di bawah usia 0-6 tahun. Meskipun demikian, dalam implementasinya pelaksanaan PAUD HI di ketiga kabupaten ini, belum sepenuhnya mengintegrasikan ketiga layanan dasar PAUD HI. Dalam situasi Pandemi COVID-19, layanan PAUD HI semakin mengalami hambatan dalam implementasi sebagaimana akan disampaikan pada laporan ini.

Dari sisi penganggaran, ketiga kabupaten telah menganggarkan dana untuk mendukung pelaksanaan PAUD dan kesejahteraan tenaga pendidik melalui APBD maupun Dana Desa (APBDes). Penganggaran ini nampaknya masih berangkat dari kemampuan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah desa, dan belum berdasarkan analisis satuan biaya atau pun analisis kesenjangan kualitas. Untuk anggaran APBD, sebelum Pandemi COVID-19 terjadi,

32 Terdapat perbedaan penghitungan APK dari tahun 2000 - 2017, yang menghitung berdasarkan usia 0-6 tahun menjadi hanya mencakup usia 3-6 tahun di tahun 2018. Untuk keperluan memperlihatkan trend perkembangan, maka laporan ini membatasi penggunaan data hanya sampai dengan tahun 2017. Data di tingkat kabupaten diperoleh dari www.apkapm.data.KEMDIKBUD.go.id diakses tanggal 28 Juli 2020.

33 Diolah dari KEMDIKBUD, dashboard APK-APM, <http://apkapm.data.KEMDIKBUD.go.id/>

Kabupaten Pemalang telah menganggarkan APBD untuk membantu honorarium pengajar PAUD sebesar Rp. 200.000,- per bulan untuk 2,217 pendidik. Sedangkan di Kabupaten Sumbawa menganggarkan Rp. 350.000,- untuk guru honor PAUD. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh KOMPAK, belanja dana desa untuk PAUD di Kabupaten Brebes mencapai Rp. 34,405,333 (47% dari total belanja pendidikan), di Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 24,020,000 (33% dari total belanja pendidikan) dan di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp. 75,759,168 (93% dari total belanja pendidikan).

STATUS PENYEBARAN COVID-19 DI KETIGA KABUPATEN

Pada awal dilakukan kajian, baik Brebes, Pemalang, maupun Sumbawa merupakan kabupaten yang berada di "zona kuning", yaitu kabupaten beresiko rendah tetapi masih mendapati penularan lokal walaupun dalam jumlah dan persebaran yang sangat kecil³⁴. Secara kumulatif sampai dengan awal penulisan laporan per tanggal 13 Juli 2020, Brebes memiliki 45 orang positif COVID-19, 128 suspek, dan 2,362 orang dalam kategori kontak erat. Kemudian di Pemalang memiliki 55 kasus positif COVID-19, 326 suspek, 3,237 kontak erat. Sedangkan Sumbawa, memiliki 48 kasus positif COVID-19, 125 suspek dan, 495 kontak erat. Penyebaran COVID-19 di wilayah kabupaten juga tidak merata; sebagai contoh, walaupun seluruh kecamatan di ketiga kabupaten tersebut setidaknya memiliki kasus kontak erat, jumlah kasus pasien positif COVID-19 terkonsentrasi di 7 kecamatan di Brebes (dari total 17), 6 kecamatan di Pemalang (dari total 14), dan 13 kecamatan di Sumbawa (dari total 24). Walaupun tidak terangkum dalam data dan informasi yang dikumpulkan, studi ini merekam dinamika perkembangan kasus COVID-19 yang tinggi. Keberadaan tiga kabupaten di zona kuning dan persebaran yang tidak merata turut mempengaruhi wacana Adaptasi Kebiasaan Baru (ABK) serta aspirasi mengenai kemungkinan diselenggarakannya tatap muka. Di akhir penulisan, Kabupaten Sumbawa mengalami perubahan zonasi, yaitu dari kuning (resiko rendah) ke oranye (resiko sedang) dengan akumulasi kasus konfirmasi sebanyak 103 orang, suspek sebanyak 728 orang, dan kontak erat menjadi 10,107 orang.

Sementara Kabupaten Pemalang (kumulatif konfirmasi: 149 orang, suspek: 486 orang, dan kontak erat: 3,764) dan Kabupaten Brebes (kumulatif konfirmasi: 64 orang, suspek: 345, kontak erat: 349).

34 Zona kuning, berdasarkan Peta Resiko (<https://covid19.go.id/peta-risiko>) didasarkan hasil dari pembobotan skor dari 15 indikator epidemiologi. Zona kuning diberikan kepada daerah dengan skor 2.5-3.0, yang menandakan masih adanya kemungkinan transmisi lokal walaupun resiko penularannya kecil.

Metodologi Kegiatan

Pengumpulan data dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama dengan menggunakan survei untuk penjangkaran informasi awal kondisi satuan PAUD di ketiga kabupaten ini. Pendekatan kedua menggunakan lokakarya sebagai strategi yang dilakukan ketika melakukan fasilitasi. Prinsip fasilitasi, yaitu data tidak hanya dikumpulkan dan dianalisis, tetapi juga secara kontinyu dikonsultasikan di berbagai tingkatan, yaitu di tingkat satuan pendidikan, di tingkat desa dan kecamatan, kabupaten lalu sampai dengan di tingkat nasional. Dengan model fasilitasi ini, diharapkan terjadi interaksi dan keterikatan antar data dan respon sehingga analisis dapat menjadi umpan balik yang sekaligus meningkatkan sensitivitas pemangku kebijakan di berbagai tingkatan. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai kedua pendekatan ini

SURVEI

Survei dilakukan untuk menjangkari informasi mengenai dampak Pandemi COVID-19 di tataran pelaksanaan program PAUD. Idealnya survei dilakukan dengan metode sampling acak untuk mendapatkan gambaran trend yang lebih homogen dan memperkecil kemungkinan bias data mengenai dampak COVID-19 di tiga kabupaten. Namun dikarenakan kendala, dikarenakan kendala mobilitas sehubungan dengan Pandemi COVID-19, keterbatasan dana dan juga waktu, maka dilakukan snowball sampling, dengan mengandalkan jejaring organisasi profesi, seperti HIMPAUDI, IGTKI dan IGRA, dan juga secara formal melalui dinas pendidikan. Penggunaan model jejaring ini tentunya memiliki bias (pembelokan data) tersendiri yang berpengaruh pada hasil analisis data.

Instrumen survei terdiri atas dua buah survei dengan responden yang berbeda, yaitu: (1) Survei satuan PAUD, diisi oleh kepala sekolah atau pengelola atau pengurus yayasan; (2) Survei tenaga pendidik PAUD, diisi oleh kepala sekolah dan pendidik. Pertimbangan digunakannya dua survei adalah adanya beberapa pertanyaan yang cukup sensitif, seperti misalnya isu pengelolaan keuangan, pendapatan guru, serta kesulitan-kesulitan dalam penyelenggaraan PAUD. Selain itu juga, pemisahan survei dilakukan dengan mempertimbangkan muatan dan panjang pertanyaan [bila survei digabung menjadi satu]. Secara rinci, survei (1) satuan PAUD terdiri atas enam bagian, yaitu identitas pengisi data, identitas dan fasilitas PAUD, dampak Pandemi COVID-19 pada pembelajaran, pengelolaan dan personalia, serta profil guru dan siswa. Sedangkan, survei untuk (2) kepala sekolah dan tenaga pendidik terdiri atas tiga bagian, yaitu identitas tenaga pendidik, dampak COVID-19 pada penghasilan tenaga pendidik, dan persepsi mengenai penularan COVID-19 di masyarakat dan sekolah.

Survei dilakukan secara daring dengan menggunakan dukungan fasilitas antarmuka (*interface*) Survey Monkey yang disebarluaskan melalui tautan di media sosial (*WhatsApp Group, Facebook*) selama 30 hari, dari tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan 5 Juli 2020. Karakteristik responden akan dijelaskan lebih lanjut di bagian "**Karakteristik Responden dan Partisipan**" sedangkan instrumen survei terlampir di **Annex 1**.

LOKAKARYA FASILITASI

Selain menggunakan survei, lokakarya dilakukan sebagai teknik (1) pelibatan pemangku kepentingan yang secara tidak langsung bertujuan untuk meningkatkan dan mendiskusikan pemahaman dan sensitivitas kebijakan; bersama dengan tenaga pendidik dan organisasi profesi pendidik PAUD (HIMPAUDI, IGTKI dan IGRA), (2) mempertajam dan menguji keterandalan serta keterwakilan informasi yang dikumpulkan melalui survei; serta melalui penggabungan pemangku kebijakan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa serta tenaga pendidik, (3) memfasilitasi pertukaran informasi, memperluas kesempatan untuk diskusi dan interaksi antara pemerintah daerah dan tenaga pendidik.

Sebagai pedoman, instrumen lokakarya dikembangkan yang berisi pertanyaan-pertanyaan pemantik diskusi. Pertanyaan-pertanyaan untuk pemangku kebijakan berfokus pada respon kebijakan serta hambatan pelaksanaan kebijakan, baik kebijakan normal yang telah disusun sebelum Pandemi COVID-19, maupun kebijakan kedaruratan. Pertanyaan-pertanyaan untuk tenaga pendidik, lebih diarahkan pada verifikasi atas hasil pengumpulan data melalui survei. Daftar pertanyaan diskusi terlampir dalam **Annex 2**.

Lokakarya dilakukan di tiga kabupaten, diselenggarakan sesuai dengan karakteristik masing-masing kabupaten berdasarkan masukan staf KOMPAK di lapangan. Lokakarya terdiri atas dua tahap, yaitu tahap pertama (1) melibatkan pemangku kepentingan, di antaranya yaitu Sekretaris Daerah (SEKDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hadir sebagai perwakilan pemerintah nasional di acara diskusi dengan pemangku kebijakan. Pada tahap kedua (2), diskusi melibatkan pelaku dan praktisi PAUD, organisasi profesi (HIMPAUDI, IGRA, IGTK), perwakilan kantor camat, kelurahan atau desa. Jadwal pelaksanaan dapat dilihat di *Tabel 1: Jadwal Pelaksanaan Lokakarya*.

TABEL 1: JADWAL PELAKSANAAN LOKAKARYA

Tanggal	Kegiatan	Lokasi Koordinasi Virtual
11 Juni 2020	Lokakarya persiapan daerah	Kab. Brebes
11 Juni 2020	Lokakarya 1: Pemangku Kebijakan	Kab. Sumbawa
12 Juni 2020	Lokakarya 1: Pemangku Kebijakan	Kab. Pemalang
17 Juni 2020	Lokakarya 1: Pemangku Kebijakan	Kab. Brebes
18 Juni 2020	Lokakarya 2: Satuan PAUD dan Pemdes	Kab. Sumbawa
19 Juni 2020	Lokakarya 2: Satuan PAUD dan Pemdes	Kab. Pemalang
23 Juni 2020	Lokakarya 2: Satuan PAUD dan Pemdes	Kab. Brebes
22 Juli 2020	Konsultasi tim KOMPAK	Jakarta
28 Juli 2020	Diseminasi dan konsultasi di tk. nasional	BAPPENAS

Proses konsultasi di tingkat nasional dilakukan bersama-sama dengan tim KOMPAK di Jakarta dan perwakilan dari tiga kabupaten pada tanggal 22 Juli 2020. Proses konsultasi di tingkat nasional direncanakan dilakukan pada tanggal 28 Juli 2020, melibatkan Bappenas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (KDPDT). Profil partisipan lokakarya dibahas lebih lanjut di bagian "Karakteristik Responden dan Partisipan"

TABEL 2: JUMLAH PESERTA LOKAKARYA DAN KONSULTASI HASIL

Lokakarya	Kab. Brebes	Kab. Pemalang	Kab. Sumbawa
I	30 orang (18 P, 12 L) 15 OPD Kab, 5 Org. Profesi, 5 PAUD; 5 Pem. Kecamatan	27 Orang (19 P, 8 L) 14 OPD Kab; 4 Org. Profesi, 6 PAUD; 1 Pem. Kecamatan	29 Orang (16 P, 13 L) 20 OPD Kab; 6 Org Profesi; 3 Pem Kecamatan
II	29 Orang (18 P, 11 L) 10 OPD Kab; 15 PAUD; 3 PemDes & Bunda PAUD	33 Orang (21 P, 12 L) 12 OPD Kab; 17 PAUD; 55 Pem. Desa & Bunda PAUD	26 Orang (14 P, 12 L) 10 OPD; 10 PAUD; 6 Pem Desa & Bunda PAUD
Konsultasi Internal KOMPAK			
[Nurman]			
BAPPENAS			
33 Orang [16 Perempuan; 17 Laki Laki] 27 K/L; 4 OPD (Pemalang & Sumbawa); 2 Lembaga Kebijakan dan PBB.			

ANALISIS DATA

Data mentah hasil survei diolah dengan bantuan perangkat lunak, yaitu *Microsoft Excel* dan *SPSS*. Dikarenakan rendahnya pengisian data yang lengkap, pengkajian ini menggunakan seluruh data yang dikumpulkan. Untuk mendapatkan informasi mengenai urban dan rural, integrasi data dilakukan dengan *Master File* Desa provinsi Nusa Tenggara Barat³⁵ dan Jawa Tengah³⁶ pada data responden berdasarkan nama desa. Dengan integrasi ini, dilekatkan pula kode wilayah dan desa versi BPS untuk memudahkan penggabungan dataset kajian dengan data-data BPS di level desa bila diperlukan. Selain data BPS, data mengenai status COVID-19 diintegrasikan pada level kecamatan 13 Juli 2020. Analisis tabulasi silang (*crosstab*) sederhana dilakukan menelaah besaran populasi kelompok spesifik pada kecenderungan tertentu.

Informasi yang dirangkum baik secara kuantitatif dan kualitatif kemudian pilah untuk melahirkan dimensi-dimensi kerentanan PAUD selama Pandemi COVID-19. Identifikasi kerentanan dilakukan berdasarkan tema-tema yang dihasilkan survei dan pembahasan isu yang berkembang selama proses fasilitasi diskusi. Selanjutnya, temuan-temuan ini dihubungkan kembali secara garis besar ke dalam kerangka kebijakan di tingkat pusat dan komitmen daerah, maupun ditempatkan sebagai kesenjangan yang belum direspon oleh kebijakan.

ETIK

Penerapan etik penelitian dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek. Pertama, partisipasi responden dalam survei dan kehadiran dalam lokakarya daring bersifat sukarela, yaitu tidak ada paksaan bagi responden untuk mengisi instrument survei atau pun dalam berpartisipasi di lokakarya. Kedua, izin dari pemerintah daerah didapatkan melalui BAPPEDA di ketiga kabupaten. Seluruh kegiatan ini dilakukan dengan sepengetahuan mereka dan merupakan bagian dari program kerjasama KOMPAK dengan pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Pematang Jaya dan Kabupaten Sumbawa dalam penguatan tata kelola PAUD.

Selain memastikan ijin dari responden, kegiatan ini juga memastikan kerahasiaan seluruh responden yang berasal dari tenaga pendidik PAUD. Seluruh nama tenaga pendidik yang ditulis dalam laporan ini menggunakan nama samaran untuk melindungi mereka atas informasi yang diberikan, yang mungkin dianggap sensitif oleh pihak lain dan menghindari retaliasi. Sedangkan, responden-responden yang mewakili institusi pemerintah daerah atau pun organisasi profesi, tidak dapat dirahasiakan karena tidak mungkin (mudah dideteksi) dan, dibanyak konteks, dianggap mewakili institusi kebijakan pemerintah daerah atau pun umpan balik (*feedback*) bagi kebijakan di tingkat nasional. Melalui lokakarya konsultasi di tingkat nasional, dapat dipastikan bahwa responden dari pemerintah daerah tidak keberatan dengan hal ini.

35 Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), "Master File Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Semester I Tahun 2019", Mataram: BPS Provinsi NTB

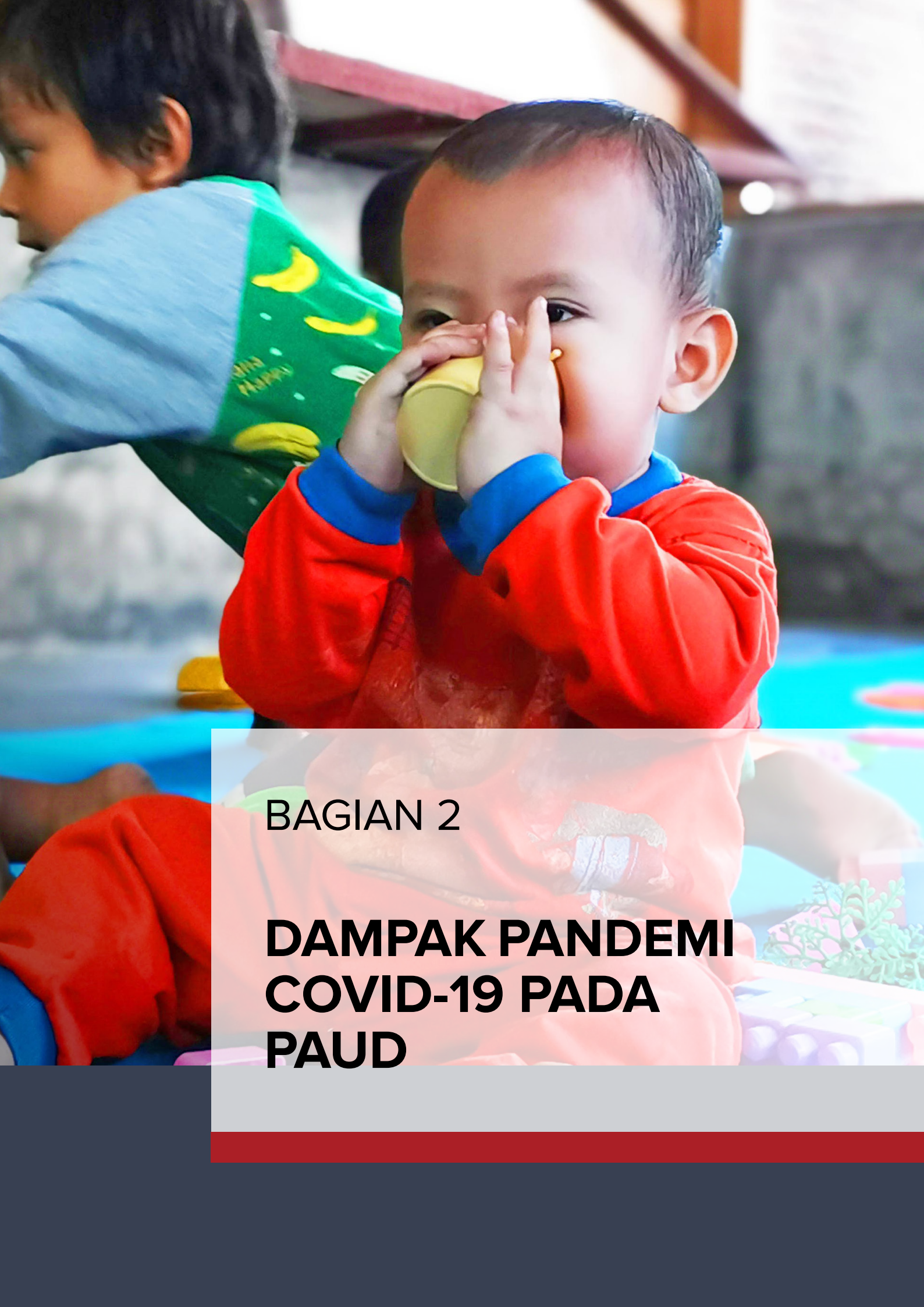
36 BPS Jawa Tengah, "Master Wilayah Provinsi Jawa Tengah, 2018", Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah

KETERBATASAN

Berdasarkan cakupan isu, informasi yang diperoleh mengenai dampak COVID-19 adalah informasi yang bersifat jepretan (*snapshot*) yang sangat dipengaruhi dimensi ruang dan waktu. Secara detail, dampak COVID-19 pada PAUD yang disampaikan mencerminkan kondisi dan dinamika di Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sumbawa selama Pandemi COVID-19 di antara bulan Juni dan Juli 2020. Hasil yang diperoleh dapat beresonansi secara parsial dengan kondisi di kabupaten-kabupaten lain, sehingga diperlukan penyesuaian penafsiran. Tingginya dinamika situasi dan respon kebijakan di saat Pandemi COVID-19 juga menuntut kehati-hatian pembaca dalam membaca relevansi dan kontekstualisasi laporan ini. Kajian dan fasilitasi diskusi yang dilakukan sangat menyadari pentingnya peranan penting orang tua dan juga suara anak dan layanan usia dini. Namun, dikarenakan fokus dari kegiatan adalah pada satuan pendidikan dan dikaitkan dengan respon kebijakan, kegiatan ini tidak mencakup dimensi pengasuhan orang tua, keluarga, suara dan keberadaan anak, atau intervensi-intervensi kesehatan dan perlindungan secara mendalam termasuk anak penyandang disabilitas.

Tanpa bantuan enumerator khusus dalam pengisian data dan keterbatasan waktu di saat lokakarya, tim fasilitasi juga menyadari kemungkinan terjadinya bias baik responsif atau pun non-responsif yang disebabkan oleh kesalahpahaman interpretasi pertanyaan-pertanyaan. Model pengumpulan data yang dilakukan juga menghasilkan keterbatasan bias sampling tersendiri. Penggunaan survei daring dengan metode penyebaran yang menggunakan jejaring berpotensi menghasilkan informasi yang bias pada responden yang dapat menggunakan gawai dan memiliki akses internet atau seluler. Hal ini tercermin dalam rendahnya respon dari Kabupaten Sumbawa untuk survei daring yang kemungkinan disebabkan kurangnya fasilitas dan jaringan seluler, serta jarak antar rumah tangga, fasilitas, dan desa yang lebih jauh di dibandingkan di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes. Dengan demikian, sangat besar kemungkinan informasi yang diperoleh tidak mencerminkan kelompok tenaga pendidik atau pun satuan pendidikan yang dalam kondisi paling rentan. Pengumpulan data dengan model daring juga menghasilkan ketidakkonsistenan respon di tiap item pertanyaan, seperti yang disebutkan sebelumnya mengenai prosentase respon lengkap, sebagaimana disinggung dalam bagian "**Analisis Data**", sehingga informasi yang dihasilkan hanya bisa memberikan jepretan dan memiliki keterbatasan dalam analisis-analisis yang bersifat asosiasi korelasi. Penyebaran data yang menggunakan jejaring organisasi formal profesi pendidik PAUD dan tingginya peran pemerintah daerah juga kemungkinan membatasi penjangkauan informasi dari satuan PAUD yang tidak terdaftar atau belum mendapatkan izin operasional.

Pelaksanaan lokakarya dengan metode daring juga memberikan keterbatasan-keterbatasan yang mempengaruhi cakupan dan juga keterbatasan informasi yang diperoleh selama diskusi. Ujaran-ujaran yang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun oleh tenaga pendidik, tidak dengan mudah dapat diverifikasi karena batasan jarak. Sebagai contoh, besarnya dana alokasi APBD atau pun APBDes tidak dapat diverifikasi dengan menggunakan dokumen atau pun prosedur surat pertanggung jawaban (SPJ) sebagaimana dimungkinkan dalam kondisi normal. Contoh yang lain adalah misalnya tidak dimungkinkannya verifikasi silang (*cross check*) mengenai klaim alokasi Dana Desa untuk PAUD yang belum merata. Selain itu, kendala kualitas jaringan internet / seluler masih sangat mempengaruhi kualitas partisipasi peserta lokakarya. Pengulangan ujaran, hilangnya beberapa kata karena sinyal yang buruk, mempengaruhi kualitas data yang diperoleh dan juga menjadi penghalang bagi peserta lokakarya yang ingin urun pendapat. Untuk mendapatkan konsistensi pesan atau ujaran, tim fasilitator melakukan verifikasi silang secara interna dan dibantu oleh tim KOMPAK di kabupaten.



BAGIAN 2

**DAMPAK PANDEMI
COVID-19 PADA
PAUD**

Pendahuluan

Bagaimana Pandemi COVID-19 berdampak pada PAUD? Dengan menggabungkan data-data yang diperoleh dari survei dan fasilitasi daring-luring, pada bagian ini, tim fasilitasi menyajikan beberapa temuan penting mengenai dampak PAUD di tiga ranah utama, yaitu pembelajaran, pengelolaan dan ketenagaan.. Berbagai isu dibahas, di antaranya adalah penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), penurunan penghasilan dan belanja di tingkat PAUD, dampak pada pendapatan tenaga pendidikan, serta aspirasi mereka akan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Bagian ini juga akan melihat bagaimana pemangku kepentingan di kabupaten, kecamatan dan di desa merespon dampak negatif dari berhentinya pembelajaran tatap muka di PAUD. Sebelum masuk pada bagian temuan, terlebih dahulu akan disajikan karakteristik responden survei daring dan partisipan lokakarya. Berikut adalah pembahasannya secara lebih terperinci.

Karakteristik Responden dan Partisipan

Kegiatan ini melibatkan dua jenis responden, yaitu responden survei dan responden lokakarya. Responden survei terdiri atas satuan pendidikan (SP), pengajar dan kepala sekolah. Sedangkan untuk lokakarya terdiri atas pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan juga organisasi profesi.

SATUAN PENDIDIKAN

Jumlah satuan pendidikan (SP) yang terlibat dalam survei adalah sebanyak 1,075 lembaga PAUD dengan rata-rata siswa sebesar 40 per lembaga dan jumlah tenaga pendidik sebanyak 5 orang per lembaga. Sebanyak 49.49% (532 SP) berasal dari Kabupaten Brebes, 35.72% (384 SP) berasal dari Kabupaten Pemalang, dan 14.79% (159 SP) berasal dari Kabupaten Sumbawa. Secara keseluruhan, 532 SP dari Kabupaten Brebes mewakili 43% dari total PAUD di kabupaten (1,222). Sedangkan untuk Kabupaten Pemalang, total responden survei SP, mewakili 44% dari total PAUD (868). Untuk Kabupaten Sumbawa, jumlah responden adalah 26% dari total keseluruhan PAUD di kabupaten³⁷.

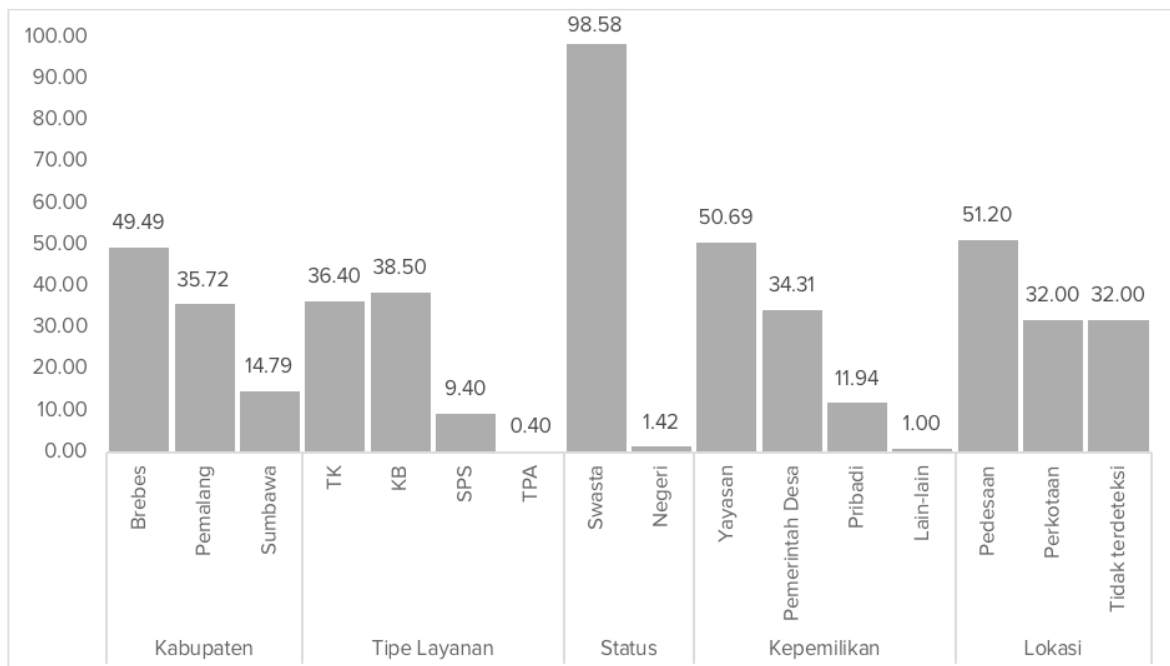
Rendahnya partisipasi Kabupaten Sumbawa kemungkinan besar disebabkan jarak antara PAUD di desa yang jauh dari kecamatan dan kurangnya sarana infrastruktur telekomunikasi, seperti sinyal, akses tenaga pendidik dan pengelola pada perangkat keras, seperti gawai atau komputer, dan keterbatasan dana untuk mengakses paket internet berbasis telepon genggam. Dengan demikian, survei daring ini memiliki keterbatasan dalam memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai keadaan PAUD di Kabupaten Sumbawa.

37 Referensi jumlah SP PAUD berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses secara daring melalui laman <https://referensi.data.KEMDIKBUD.go.id/index21.php>

Sebanyak 38.5% (424) responden satuan pendidikan berbentuk layanan Kelompok Bermain (KB), diikuti oleh Taman Kanak Kanak (TK), yaitu sebesar 36.4% (401), termasuk Bustanul Athfal (TK-ABA) dan Raudhatul Athfal (RA), lalu Satuan PAUD Sejenis (SPS) berada di urutan ketiga terbanyak, sebesar 9.4% atau 86, sedangkan Tempat Penitipan Anak hanya 0.4% (4) yang berpartisipasi. Dengan demikian, mengacu pada klasifikasi PAUD berdasarkan Pasal 28 Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), maka lebih dari setengah responden berasal dari PAUD non-formal, yaitu 56.2% atau 514 SP, sisanya adalah PAUD formal (TK). Sebanyak 186 responden tidak mengisi bentuk layanan PAUD. Perlu dicatat, berdasarkan kabupaten, data dari Kabupaten Brebes sebagian besar berasal dari TK (69%, 302 SP); sedangkan data dari Kabupaten Pemalang cenderung bias KB (63%, 211 SP) begitu pula dengan data dari Kabupaten Sumbawa (66%, 82 SP). Namun pada level agregat, terdapat keseimbangan antara TK (44%, 391 SP) dan KB (46%, 415 SP).

Berdasarkan status swasta-negeri (privat-publik), 98.58% (904 SP) PAUD yang mengisi berstatus swasta. PAUD berstatus negeri hanya 1.42% (13 SP). Berdasarkan kepemilikan, 50.60% (466 SP) adalah milik yayasan, lalu 34.31% (316) merupakan milik pemerintah desa, 11.94% (110 SP) adalah milik pribadi, dan sisanya adalah milik pemerintah daerah (kabupaten / provinsi, 1.0% atau 11 SP). Tingginya kepemilikan oleh pemerintah desa menimbulkan isu tersendiri, khususnya mengenai alokasi dan penggunaan dana desa.

GRAFIK 4: PROPORSI RESPONDEN LEMBAGA PAUD BERDASARKAN BERBAGAI VARIABEL (%)



PAUD yang telah memiliki izin operasional mendominasi pengisian survei ini, yaitu 99.46% (916 SP). Sebanyak 0.5% (5 SP) yang belum memiliki SP adalah 1 TK dan 1 SPS dari Kabupaten Brebes, serta 3 KB dari Kabupaten Pemalang. Penggunaan survei daring yang mengandalkan jejaring profesi dan kebijakan formal menghasilkan keterbatasan kemampuan survei ini dalam menjangkau PAUD yang belum memiliki izin operasional. Untuk konteks desa-kota, mayoritas responden survei untuk Satuan Pendidikan berasal dari pedesaan (51.20% atau 564 SP), dibandingkan

dengan PAUD perkotaan yang sebesar 32% (352 SP). Sedangkan data yang kosong, tanpa informasi mengenai desa atau pun kelurahan sebesar 16.8% (185 SP).

TENAGA PENDIDIK

Jumlah tenaga pendidik yang berpartisipasi dengan mengisi survei khusus tenaga pendidik [Survei 2] adalah sebesar 1,863 orang terdiri atas 1,156 guru (62.1%) dan 797 (37.9%) kepala sekolah. Berdasarkan kabupaten, 630 guru dan 314 kepala sekolah, total 944 pendidik berasal dari Kabupaten Brebes, 410 guru dan 305, total 715 tenaga pendidik berasal dari Kabupaten Pemalang, sedangkan Kabupaten Sumbawa terdiri atas 116 guru dan 88 kepala sekolah, atau total 204 tendik.

Dari seluruh tenaga pendidik, 95.3% atau 1,775 orang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau EMIS milik Kementerian Agama. Sementara 45 orang (2.4%) mengaku belum terdaftar (24 dari Kabupaten Brebes, 20 dari Kabupaten Pemalang dan 1 (satu) dari Kabupaten Sumbawa), dan 43 orang (2.3%) tidak mengetahui status terdaftar atau tidaknya nama mereka (20 dari Kabupaten Brebes, 19 dari Kabupaten Pemalang dan 4 (empat) dari Kabupaten Sumbawa). Dari mereka yang tidak terdaftar, termasuk di antaranya adalah 29 guru, dan 16 kepala sekolah. Sedangkan, sebanyak 8 kepala sekolah dan 35 guru tidak mengetahui status mereka dalam sistem. Status terdaftar atau tidak ini sangat mempengaruhi kriteria kelayakan guru dan kepala sekolah dalam memanfaatkan perubahan penggunaan dana Biaya Operasional PAUD (BOP) sesuai dengan PERMENDIKBUD No. 20 / 2020.

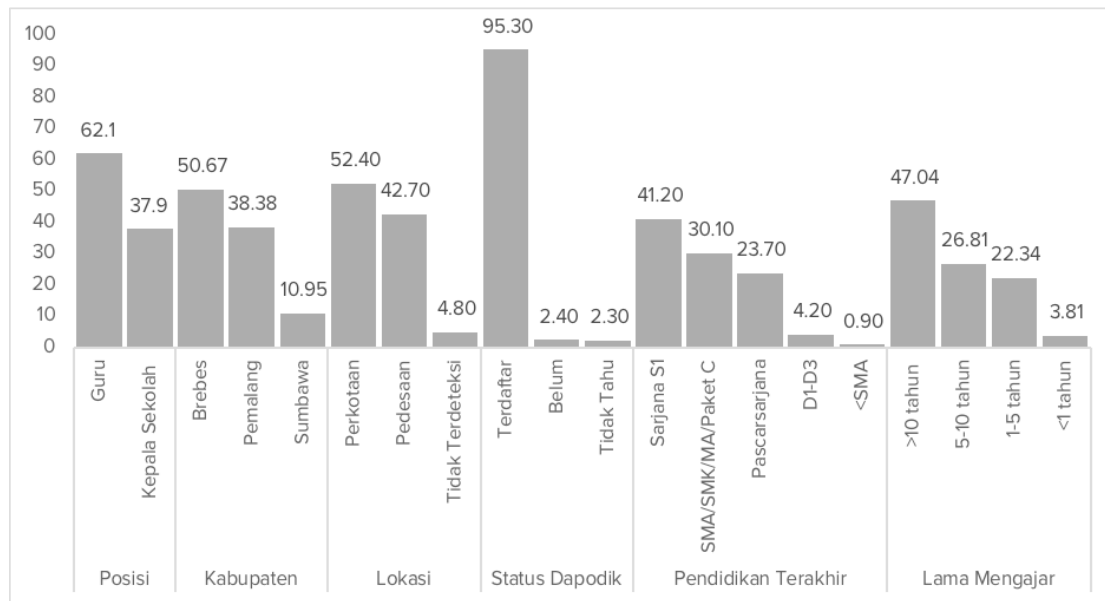
Berdasarkan pendidikan terakhir, 41.2% (768 orang) dari tenaga pendidik mengaku telah menamatkan Sarjana S1 atau Diploma 4. Prosentase terbesar kedua adalah lulusan SMA/SMK/MA/Paket C, yaitu sebesar 30.1%, dan Pascasarjana, sebanyak 23.7% (441 orang). Guru yang menamatkan jenjang D1- D3 hanya sebesar 4.2% (78 orang), dan SMP/MTs/Paket B sebesar 0.9% (16 orang). Prosentase responden dengan latar belakang pendidikan S1 terbesar berasal dari Kabupaten Pemalang (Tenaga Pendidik S1: 44% dari total responden yang mengisi), sedangkan proporsi di Kabupaten Brebes adalah 41% dan Kabupaten Sumbawa 35%. Hasil ini perlu ditelaah lebih lanjut untuk membuktikan apakah terjadi peningkatan jumlah tenaga pendidik S1 atau lebih dikarenakan adanya bias mengingat pelaksanaan survei daring ini kemungkinan lebih mungkin diakses oleh lulusan sarjana.

Selaras dengan hasil survei untuk satuan pendidikan mengenai tingginya prosentase PAUD swasta, 93.19% (1,807) tenaga pendidik berstatus non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dan hanya 6.81% (132 orang) yang berstatus ASN. Lebih dari separuh (52% atau 64 orang) dari mereka yang berstatus ASN memiliki kualifikasi Sarjana S1. Mereka yang berstatus ASN, sebagian besar berasal dari PAUD Formal dalam bentuk TK (TK Pertiwi, TK Pembina, TK PGRI) dan juga BA atau RA.

Sebagian besar responden (47.04% atau 914 orang) adalah tenaga pendidik senior dengan pengalaman kerja di atas 10 tahun. Tenaga pendidik dengan pengalaman kerja 5-10 tahun menjadi kelompok terbesar kedua dengan prosentase 26.81% atau 521 orang. Hanya 74 orang (3.81%) yang memiliki pengalaman di bawah 1 (satu) tahun.

Dari 1,943 responden yang mengisi, 52.4% (1,019 orang) tenaga pendidik berasal dari wilayah urban, 42.7% (830) berasal dari wilayah pedesaan, dan 4.8% (94 orang) tidak mencantumkan asal desa atau kelurahan sehingga tidak memungkinkan identifikasi berdasarkan perkotaan-pedesaan. Keterwakilan perkotaan paling tinggi di Kabupaten Pemalang (62% atau 443 tenaga pendidik, berbanding 38% atau 267 guru yang berasal dari pedesaan), paling rendah di Kabupaten Sumbawa (43% atau 86 tenaga pendidik, berbanding 57% atau 116 guru serta kepala sekolah yang berasal dari pedesaan). Sementara proporsi pedesaan dan perkotaan dari responden Kabupaten Brebes adalah 48% untuk pedesaan (447 orang) dan 52% untuk perkotaan (490 orang)

GRAFIK 5: RESPONDEN TENAGA KEPENDIDIKAN BERDASARKAN BEBERAPA VARIABEL (%)



PESERTA FASILITASI LOKAKARYA

Peserta fasilitasi lokakarya sebagaimana dikemukakan di halaman x terdiri dari perwakilan dari pemerintah daerah yang melibatkan perwakilan dari Dinas Pendidikan, Kementerian Agama BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa. Selain itu terdapat juga perwakilan dari IGTKI, HIMPAUDI, Satuan PAUD baik TK, KB maupun RA. Kegiatan fasilitasi lokakarya sendiri dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di masing-masing kabupaten. Sehingga total kegiatan yang diselenggarakan adalah 6 (enam) pertemuan.

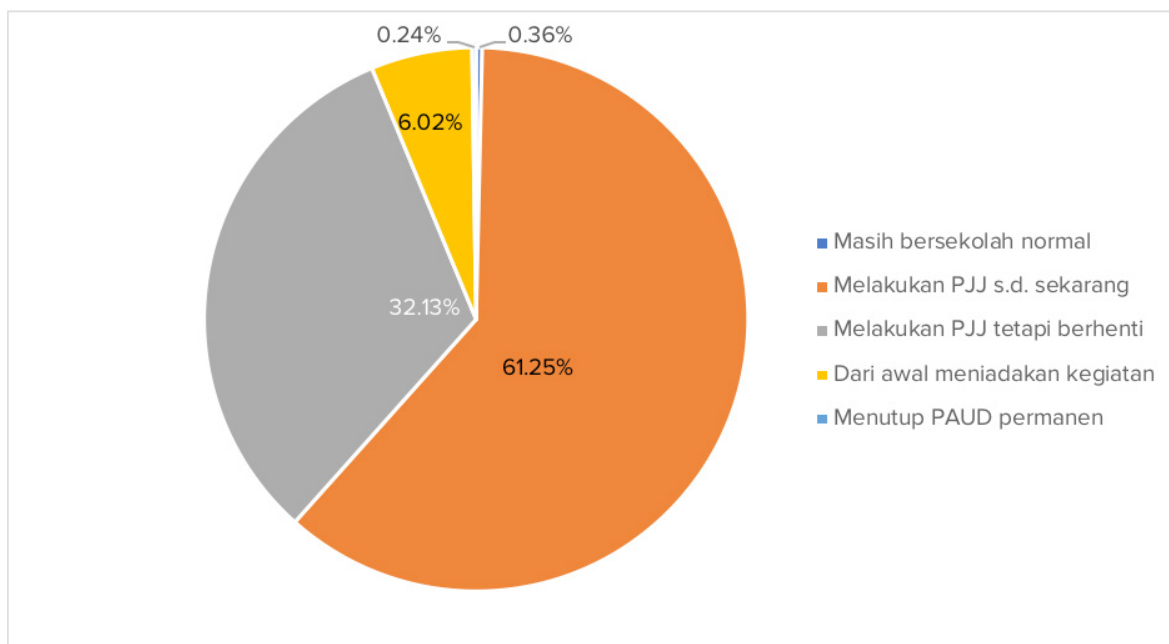
Dampak COVID-19 Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh dan Daring

PERUBAHAN MODA PEMBELAJARAN

Pandemi COVID-19 mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran PAUD. Baik dari jumlah hari maupun jumlah jam pembelajaran. Sebelum wabah COVID-19 berjangkit, 68.11% (566 SP) melakukan layanan pembelajaran sebanyak enam hari per minggu, 27.92% (232) SP melakukan lima hari per minggu, sedangkan hanya 2.88% (24 SP) yang melakukan di bawah lima hari per minggu.

Dengan diberlakukan pembatasan fisik, 61.25% (509 SP) mengalihkan moda pembelajaran mereka dari tatap langsung di sekolah menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan bertahan hingga saat ini. Sementara 31.13% (267 SP) mengaku pernah melakukan PJJ namun terpaksa diberhentikan karena beberapa kendala, 6.02% (50 SP) mengaku telah menghentikan total seluruh kegiatan PAUD sampai kondisi kembali normal, dan 0.24% (2SP) tutup secara permanen.

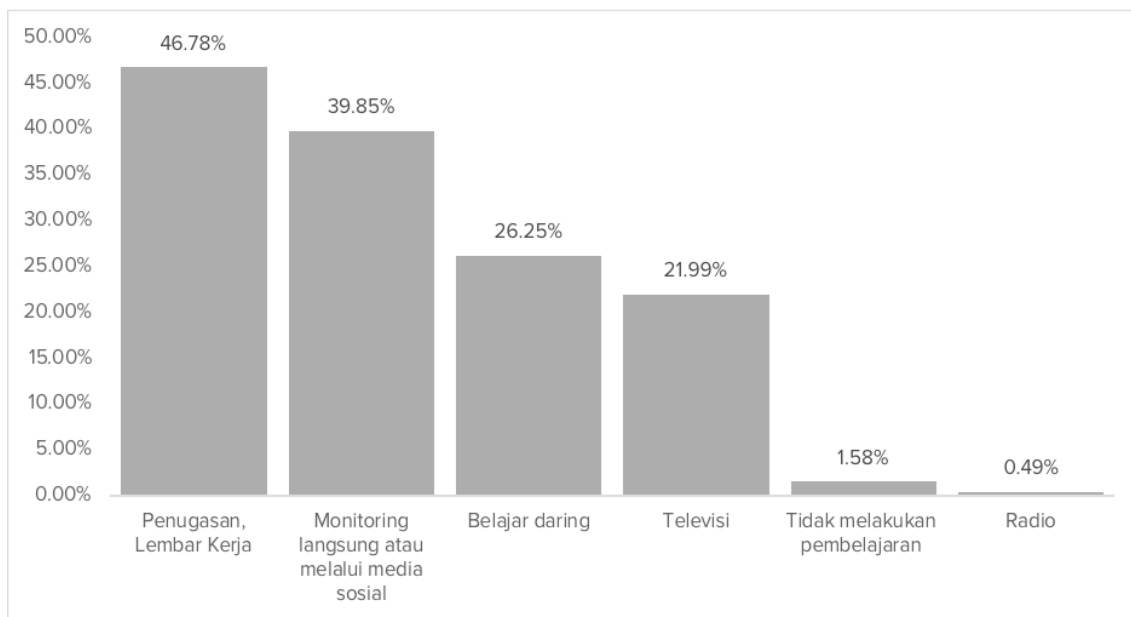
GRAFIK 6: PENGALIHAN MODA BELAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN PAUD SELAMA PANDEMI COVID19 (%)



Tingginya prosentase sekolah yang melakukan PJJ tidak berarti sekolah dapat melakukan pembelajaran daring. Sekolah pun harus menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan pembelajaran. Dari beberapa pilihan (sekolah boleh memilih lebih dari satu), data memperlihatkan bahwa pembelajaran daring dilakukan oleh 26.25% (216 SP) PAUD responden. Penugasan melalui Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diberikan melalui sosial media atau pun langsung menjadi pilihan yang paling banyak dilakukan oleh sekolah. Pemberian tugas dilakukan oleh 46.78% (385 SP) sekolah. Selain itu, 39.85% (328 SP) tetap berupaya menjalin komunikasi dengan orang tua melalui kunjungan-kunjungan langsung atau pun melalui secara daring (SMS, Whatsapp). Media sosial, seperti *Facebook*, *Messenger*, atau pun *WhatsApp* menjadi

fasilitas utama yang digunakan untuk melakukan pembelajaran daring (88.92% atau 682). Hanya 46 PAUD yang mengaku telah menggunakan fasilitas *video conference* dan manajemen kelas, seperti *Zoom*, *Skype*, atau pun *Google Classroom*. Sebagai alternatif dari penurunan frekuensi belajar-mengajar PAUD, sekolah meminta anak-anak untuk dapat mengikuti program pembelajaran PAUD yang disiarkan oleh media massa, yaitu televisi³⁸ (21.99% atau 181 SP) dan radio³⁹ (0.49% atau 4 SP).

GRAFIK 7: PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) SELAMA PANDEMI COVID19 (%)



PEMBELAJARAN DARING

Dengan model pembelajaran daring, sebagian besar sekolah hanya dapat melakukan pembelajaran dengan frekuensi satu kali setiap 2-3 hari (57.75%, 436 SP). Sementara 22.12% (167 SP) hanya bisa melakukan PJJ sekali setiap 4-6 hari, 13.77% (104 SP) bisa melakukan PJJ setiap hari, sedangkan 6.36% (48SP) melakukan PJJ hanya satu kali dalam beberapa minggu. Dalam satu kali pertemuan, mayoritas sekolah (50.46% atau 382 SP) hanya dapat menyelenggarakan pertemuan di bawah 30 menit, sementara 46.76% (354 SP) masih bisa bertemu dengan durasi sampai dengan satu jam. Berdasarkan petunjuk teknis KEMDIKBUD, pelaksanaan Pos PAUD untuk anak usia 0-2 tahun adalah 120 menit (2 jam) per minggu, Kelompok Bermain memberikan batasan bahwa anak-anak usia 2-4 tahun berkegiatan minimum selama 360 menit (6 jam) per minggu, sementara untuk Taman Kanak Kanak dan 4-6 tahun berkegiatan selama 900 menit (15 jam) per minggu⁴⁰.

38 KEMDIKBUD bekerja sama dengan TVRI menayangkan program "Belajar dari Rumah" (BDR) melalui televisi selama Pandemi COVID 19 berlangsung, termasuk di antaranya adalah tayangan untuk program PAUD.

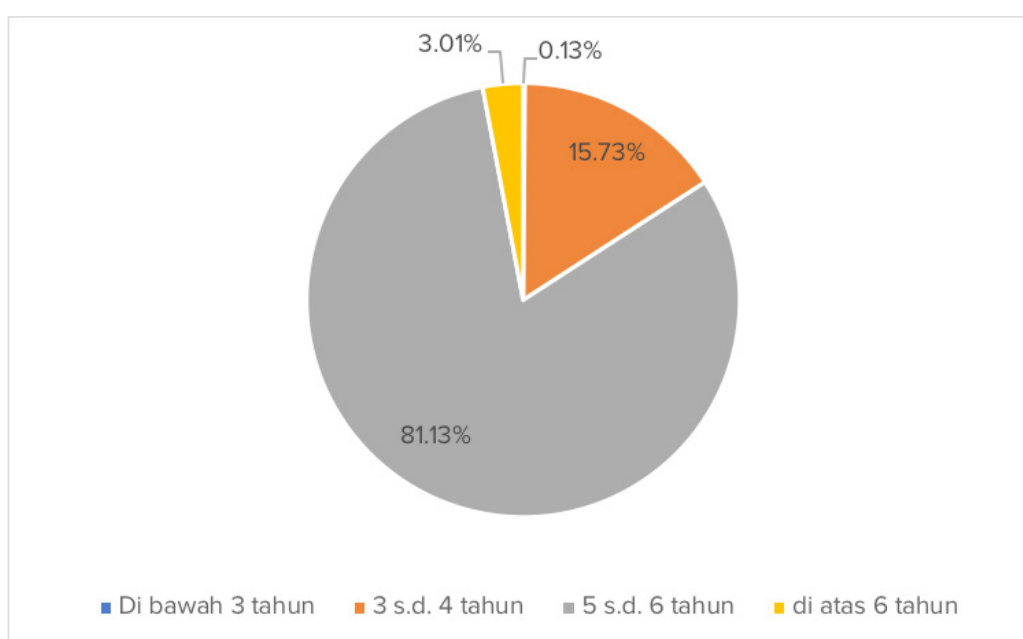
39 Di beberapa daerah, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI) ikut melakukan penyiaran di 105 daerah untuk membantu siswa melakukan Belajar Dari Rumah

40 Lihat: Kemdiknas, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (Jakarta: Kemdiknas, 2011); MoEC, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain (Jakarta, Indonesia: KEMDIKBUD, 2015); KEMDIKBUD, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD (Jakarta, 2015); KEMDIKBUD, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, NSPK : Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015).

Model pembelajaran daring juga tidak dengan merata dapat melibatkan seluruh usia anak PAUD. Anak berusia 5-6 tahun adalah kelompok usia yang relatif dapat dirangkul melalui PJJ (81.13% atau 619 SP). Sementara pelibatan anak usia 3-4 tahun hanya dilakukan oleh 15.73% (120 SP). Hampir tidak ada lembaga PAUD yang dapat memenuhi kebutuhan stimulasi edukasi bagi anak di bawah tiga tahun. Data ini memperlihatkan bahwa PJJ yang dikembangkan saat ini hanya merangkul anak-anak yang sudah

bisa mengerjakan tugas atau berinteraksi melalui daring, tetapi belum bisa memenuhi kompleksitas interaksi pengasuhan dan emosi, kasih sayang yang sebelumnya dipraktikkan melalui interaksi langsung guru-guru di sekolah terutama kepada anak-anak yang lebih muda. Dengan demikian, dibandingkan dengan kondisi normal, dimana kegiatan dilakukan 5-6 kali per minggu dengan durasi pertemuan 1-3 jam perhari (untuk KB, TK dan SPS), terjadi penurunan tatap muka yang cukup besar di masa Pandemi COVID-19, tidak hanya dari pengurangan frekuensi hari belajar dan durasi kegiatan, tetapi juga dari cakupan kelompok usia yang sangat tidak seimbang.

GRAFIK 8: CAKUPAN PESERTA DIDIK MELALUI PENDIDIKAN DARING BERDASARKAN KELOMPOK USIA (%)



Dalam mengembangkan kreativitas dan mempertahankan keberadaan PAUD melalui PJJ, lembaga PAUD paling banyak mengaku mendapatkan bantuan teknis dari sesama guru dan pengelola (dipilih 67.48% atau 550 SP) dan orang tua siswa (dipilih oleh 65.77% atau 536 SP). Hanya 11.90% atau 97 PAUD yang merasakan dukungan dari dinas pendidikan. Referensi dan inspirasi pembelajaran yang disediakan di situs web milik KEMDIKBUD, seperti Ruang Guru atau Anggun PAUD juga hanya diakses oleh 6.99% (57 SP). Pemanfaatan situs-situs web milik KEMDIKBUD ini lebih rendah dibandingkan pemanfaatan informasi yang diperoleh tenaga pendidik dari webinar-webinar atau video youtube yang mencapai 10.06% (82 SP).

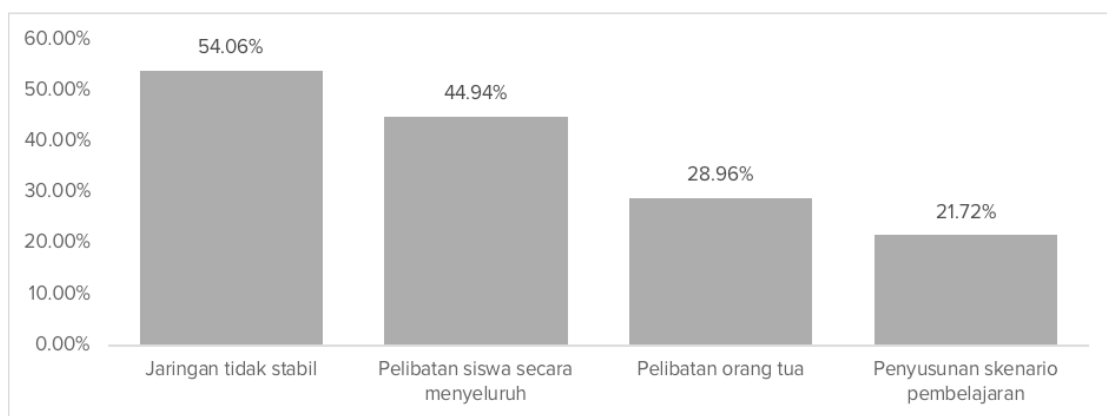
Hasil ini memperlihatkan peran penting relasi organik lembaga PAUD dengan pihak-pihak yang berada dalam posisi relatif dekat dan langsung, yaitu jejaring profesi pendidik atau pengelola

bagi lembaga PAUD dan juga kemitraan dengan orang tua, tidak hanya sebagai penerima manfaat pelayanan PAUD tetapi juga sebagai kontributor pengembangan dan ketahanan PAUD.

HAMBATAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH (DARING DAN LURING)

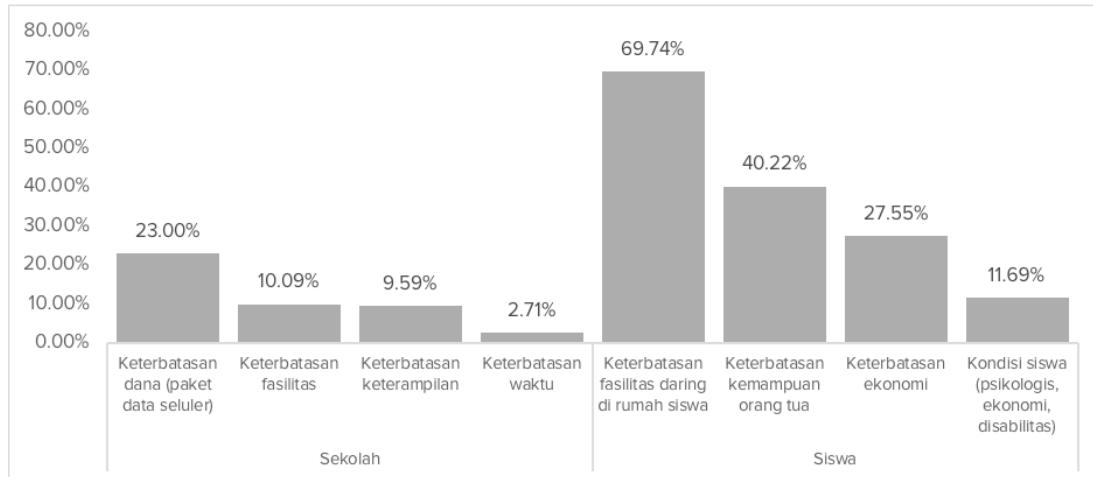
Hambatan terbesar dalam melakukan PJJ berasal dari jaringan telekomunikasi yang masih sangat tidak stabil (54.06% atau 433 SP). Tetapi, hambatan tidak hanya terkait dengan infrastruktur telekomunikasi. Sebanyak 44.94% (360 SP) PAUD mengeluhkan, PJJ membuat mereka sangat kesulitan dalam mendapatkan perhatian dan pelibatan emosi siswa (*emotional engagement*), yang kembali memunculkan karakteristik spesifik PAUD sebagai pembelajaran yang sangat didominasi oleh hubungan langsung guru dan anak. Selain itu, beberapa PAUD (28.96% atau 232 SP) merasa sulitnya melibatkan orang tua.

GRAFIK 9: KESULITAN PENGAJAR DALAM PEMBELAJARAN DARING (%)



Mengenai persepsi kondisi orang tua siswa, 47.99% atau 393 lembaga PAUD menganggap kesulitan terbesar orang tua adalah minimnya fasilitas perangkat keras (gawai, komputer dan modem) dan juga ketiadaan infrastruktur (sinyal) yang memadai (44.69% atau 366 SP). Selain kendala di bidang teknologi dan perlengkapan, tingginya beban rumah tangga selama Pandemi COVID-19 juga berkontribusi pada kesulitan orang tua dalam membagi waktu antara bekerja untuk mengatasi tekanan ekonomi dan mengurus rumah, dan menemani anak belajar. (42%, 344 SP). Secara umum, baik untuk luring dan daring, sekolah merasa bahwa faktor terbesar yang membuat tidak bisa melakukan pembelajaran secara optimal dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu keterbatasan yang dimiliki oleh satuan pendidikan termasuk pengajar dan keterbatasan di sisi siswa.

GRAFIK 10: KESULITAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH, BAIK LURING ATAU PUN DARING (%)



Dampak COVID-19 pada Perencanaan dan Penganggaran PAUD

PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DI TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Salah satu dampak terbesar Pandemi COVID-19 pada PAUD adalah menurunnya operasi layanan PAUD yang mempengaruhi besarnya nilai pendapatan dan juga belanja mereka. Salah satu pertanyaan dalam survei adalah rata-rata besarnya pendapatan⁴¹ sekolah dan juga belanja per bulan⁴². Berdasarkan median, hampir semua pos pendapatan dan juga belanja mengalami penurunan atau konstan. Secara total, pendapatan sekolah dari pos-pos yang dicantumkan di dalam survei pada kondisi normal adalah sebesar Rp. 2,210,000 per bulan, mencakup pendapatan dari iuran sukarela (median: Rp. 160,000), SPP (median: 500,000), dana yayasan bagi sekolah milik yayasan (median: Rp. 500,000), dana desa (bagi yang menerima, median: Rp. 600,000), dan dana dengan sumber APBD (median: Rp. 450,000). Nilai pemasukan sekolah dari BOP tidak bisa dimasukkan dikarenakan kerumitan penghitungan estimasi. Pendapatan sekolah secara umum (minis BOP PAUD) mengalami penurunan di luar BOP, seperti yang bisa dilihat di Tabel 1. Penurunan terbesar adalah anggaran dari pemerintah daerah (dari median Rp. 450,000 di saat kondisi normal menjadi Rp. 325,000 di kondisi krisis), lalu diikuti pemasukan dari orang tua, sebesar 40% untuk SPP, dan 37.5% dari iuran sukarela. Secara keseluruhan, penurunan pemasukan di tingkat agregat tiga kabupaten kurang lebih sebesar 27.60%.

Berkurangnya nilai pemasukan otomatis mengurangi belanja lembaga PAUD. Secara keseluruhan belanja PAUD mengalami penurunan kecuali pos belanja internet yang naik 100% dari median

41 Butir-butir yang ditanyakan di dalam survei mencakup: iuran sukarela, SPP, dana yayasan, dana desa, dana BOP, anggaran APBD dan sumber lainnya. Dilihat dari hasil responden, nilai BOP sangat sulit diintegrasikan ke dalam penghitungan, yaitu: besaran yang berbeda-beda ditentukan oleh jumlah murid, termin BOP yang mengacu pada kuartal (per-tiga bulanan), dan metoda survei daring yang menyulitkan klarifikasi dengan responden.

42 Dalam pertanyaan mengenai belanja per bulan, butir-butir yang ditanyakan mencakup iuran bulanan (listrik, air, iuran lingkungan), internet, sewa ruangan, alat tulis dan kertas, kegiatan ekstra kurikuler, kegiatan gugus PAUD, gaji guru, tunjangan guru, gaji petugas, tunjangan petugas, pelatihan guru dan kebutuhan lain-lain. Dalam penghitungan, sewa ruangan dan pengeluaran lain-lain tidak dihitung. Untuk sewa ruangan, jumlah responden yang mengisi sangat kecil. Sedangkan untuk butir "lain-lain", responden tidak memasukkan pos pengeluaran.

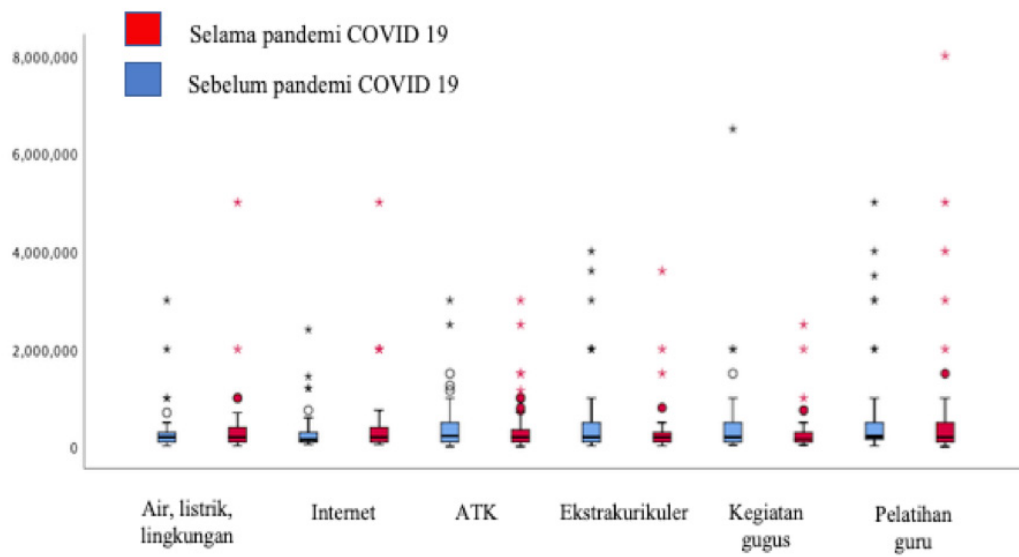
Rp. 100,000 menjadi Rp. 200,000. Pos yang mengalami penurunan adalah belanja listrik, air, dan iuran lingkungan dari Rp. 149,844 menjadi Rp. 100,000), pos Alat Tulis dan Kertas (ATK) dari Rp. 225,000 menjadi Rp. 175,000, pos ekstrakurikuler dari Rp. 200,00 menjadi Rp. 175,000. Nilai belanja untuk gaji guru (Rp. 750,000), tunjangan guru (Rp. 400,000), gaji petugas (Rp. 150,000) dan tunjangan petugas (Rp. 100,000) tidak mengalami kenaikan atau pun penurunan

TABEL 3: PERBANDINGAN MEDIAN PENDAPATAN DAN BELANJA SATUAN PENDIDIKAN PAUD SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19 (TANPA BOP PAUD)

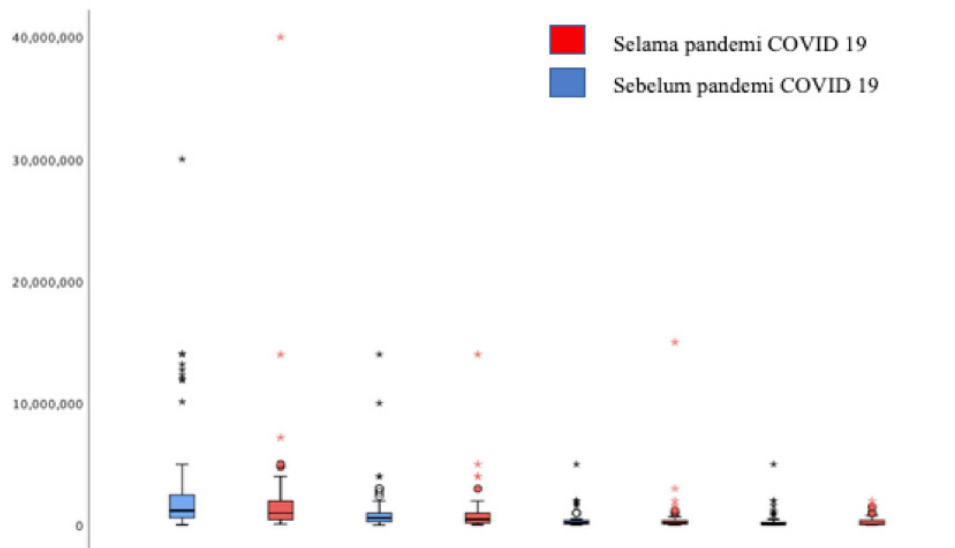
	NORMAL	PANDEMI	STATUS	KESENJANGAN
PENDAPATAN				
Iuran orang tua	160,000.00	100,000.00	TURUN	60,000.00
SPP	500,000.00	300,000.00	TURUN	200,000.00
Dana Yayasan	500,000.00	500,000.00	SAMA	
Dana Desa	600,000.00	500,000.00	TURUN	100,000.00
APBD	450,000.00	200,000.00	TURUN	250,000.00
BELANJA				
Listrik, air, iuran masyarakat	149,844.56	100,000.00	TURUN	49,844.56
Internet	100,000.00	200,000.00	NAIK	(100,000.00)
Alat tulis dan kertas	225,000.00	175,000.00	TURUN	50,000.00
Kegiatan ekstra-kurikuler	200,000.00	150,000.00	TURUN	50,000.00
Kegiatan gugus PAUD	150,000.00	150,000.00	SAMA	
Gaji guru (total)	750,000.00	750,000.00	SAMA	
Tunjangan guru (total)	400,000.00	400,000.00	SAMA	
Gaji petugas sekolah	150,000.00	150,000.00	SAMA	
Tunjangan petugas sekolah	100,000.00	100,000.00	SAMA	
Pelatihan guru (non-gugus)	200,000.00	200,000.00	SAMA	

Penurunan pendapatan dan belanja dialami PAUD dari berbagai dimensi (lihat **Annex 3: Pendapatan dan Belanja PAUD** berdasarkan beberapa variabel), baik di tingkat kabupaten (Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sumbawa), pedesaan-perkotaan, atau pun berdasarkan tipologi layanan (TK, KB, dan SPS). PAUD di Kabupaten Brebes, PAUD dari daerah urban, dan TK merupakan kelompok yang mengalami kesenjangan tertinggi di luar dana BOP, yaitu sebesar Rp. 1,570,000 untuk Kabupaten Brebes, Rp. 815,000 untuk PAUD urban, dan Rp. 2,893,840 untuk PAUD TK. Sedangkan untuk belanja, PAUD urban dan PAUD KB adalah kelompok yang memiliki kesenjangan cukup besar, yaitu Rp. 387,500 untuk PAUD perkotaan dibandingkan kesenjangan Rp. 180,000 pada PAUD pedesaan; PAUD KB, sebesar Rp. 375,000 dibandingkan sisa Rp. -135,000 di antara PAUD TK dan Rp. 120,000 untuk SPS. Sementara, di tingkat kabupaten, tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sumbawa. Ketiga kabupaten memiliki kesenjangan belanja di kisaran Rp. 300,000 rupiah, yaitu Rp. 298,631 untuk Kabupaten Brebes, Rp. 299,315 untuk Kabupaten Sumbawa dan Rp. 300,000 untuk Kabupaten Pemalang.

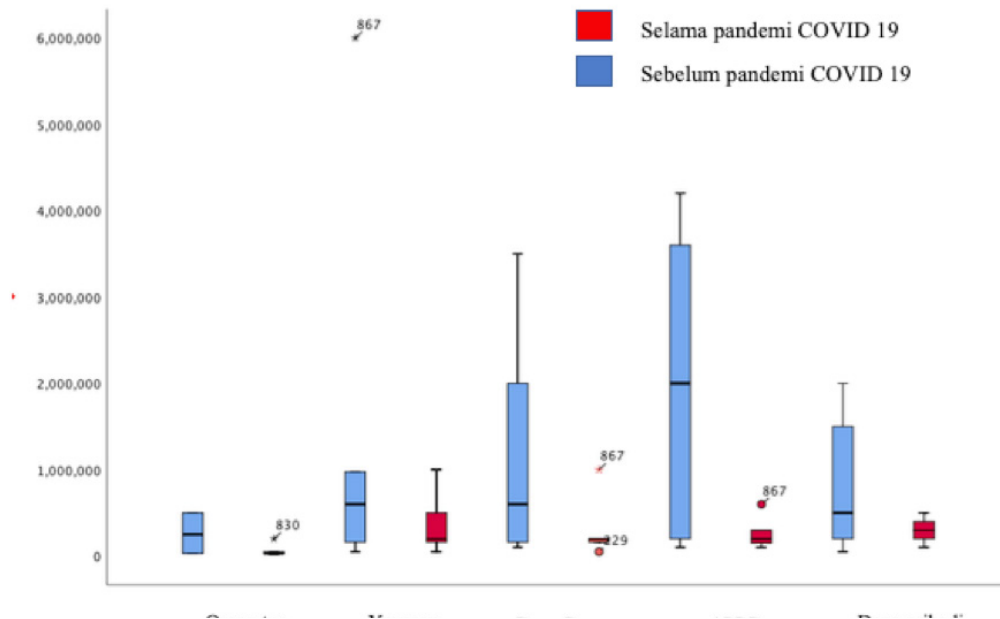
GRAFIK 11: BOXPLOT, BELANJA NON-PERSONALIA PAUD SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19



GRAFIK 12: BOXPLOT, DISTRIBUSI BELANJA PERSONALIA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19



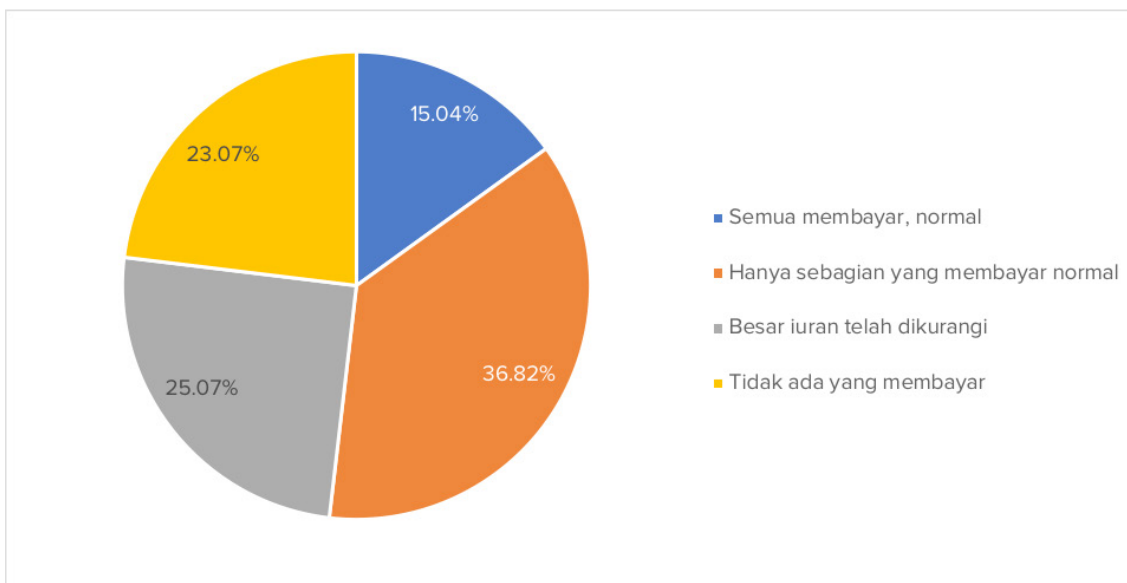
GRAFIK 13: BOXPLOT, PENDAPATAN SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19



KEMAMPUAN ORANG TUA MEMBAYAR IURAN

Dampak pandemi COVID-19 dirasakan pada pendapatan sekolah yang berasal dari iuran orang tua. Dari 698 respon yang terkumpul, hanya 9.5% (105 SP) yang masih bisa menarik iuran dengan normal. Sementara, pendapatan 90.5% PAUD berkurang dikarenakan orang tua membayar iuran berkurang drastis (23.30% atau 257 SP), atau memang sekolah telah diminta untuk menerapkan pemotongan iuran orang tua (15.9% atau 175 SP). Dalam konteks pengurangan pembiayaan, keadaan tersulit dialami oleh 161 PAUD (14.6%) yang menyatakan tidak ada orang tua yang mampu membayar iuran.

GRAFIK 14: PENURUNAN PENDAPATAN PAUD DARI IURAN / SPP ORANG TUA (%)

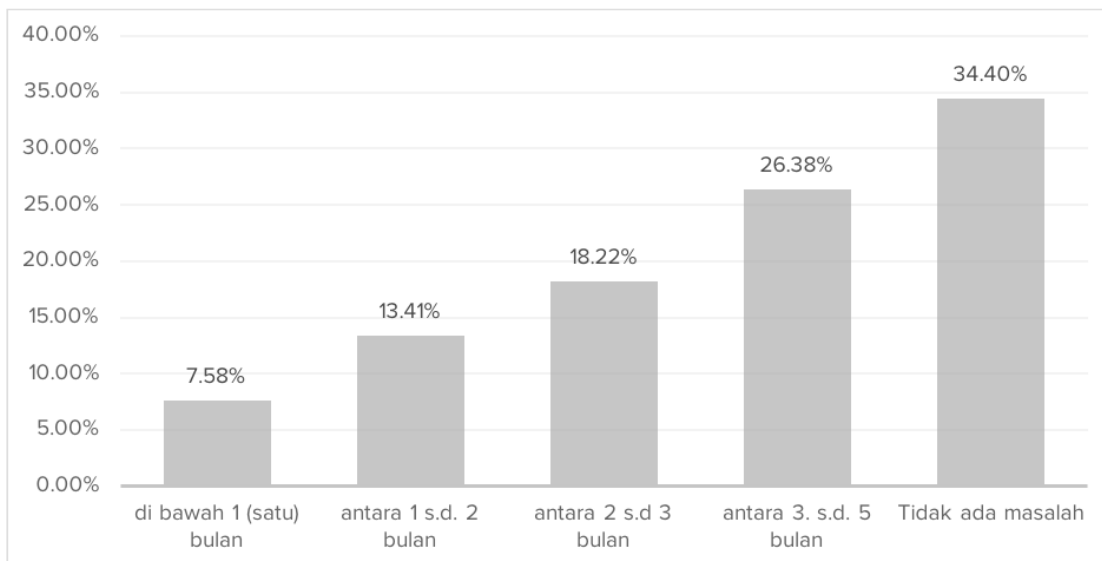


Ditinjau dari tipe layanan, PAUD yang mengalami ketiadaan pemasukan dari iuran orang tua, 56% berbentuk KB (89 SP), 26% adalah TK (39 SP), 18% adalah SPS (28), sedangkan TPA sebanyak 2 SP (1%). Walaupun secara kuantitas TPA jumlahnya sangat sedikit dibandingkan tipe layanan lainnya, 2 TPA yang menyatakan tidak menerima pendapatan sama sekali adalah 50% dari total TPA yang menjadi responden dari survei ini. Sehingga, walaupun relatif sangat kecil dari sudut jumlah responden, kemunculan TPA mengingatkan tantangan yang lebih besar yang diakibatkan oleh COVID-19, terutama bagi tempat pengasuhan anak.

PERSEPSI KEMAMPUAN BERTAHAN: SEBERAPA LAMA?

Besarnya tantangan PAUD selama Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada psikologis pengelola lembaga dalam melihat prospek ketahanan mereka selama krisis kesehatan ini. Sebanyak 34.40% lembaga PAUD (236 SP) mengaku bahwa mereka tidak masalah bagi mereka bila krisis pandemi berlangsung lebih dari tiga bulan. Sedangkan 65% (561 SP) merasa sangat kesulitan untuk bertahan di atas 5 bulan, bahkan 13.4% merasa hanya sanggup bertahan hingga 2 bulan (92 SP), dan 7.6% hanya satu bulan (52 SP). Berdasarkan tabulasi silang sederhana, tidak ditemukan karakter khusus (tipe layanan, kepemilikan bangunan) yang dapat menjadi pembeda ketahanan PAUD. Namun, 34% dari menjawab di bawah ketahanan di bawah satu bulan adalah PAUD yang tidak mendapatkan pemasukan sama sekali dari iuran orang tua.

GRAFIK 15: PERSEPSI PENGELOLA PAUD TENTANG KEBERLANJUTAN PAUD (BILA PANDEMI COVID-19 > DARI TIGA BULAN (%))



Dampak COVID-19 pada Tenaga Pendidik PAUD

DAMPAK PERUBAHAN MODA PEMBELAJARAN

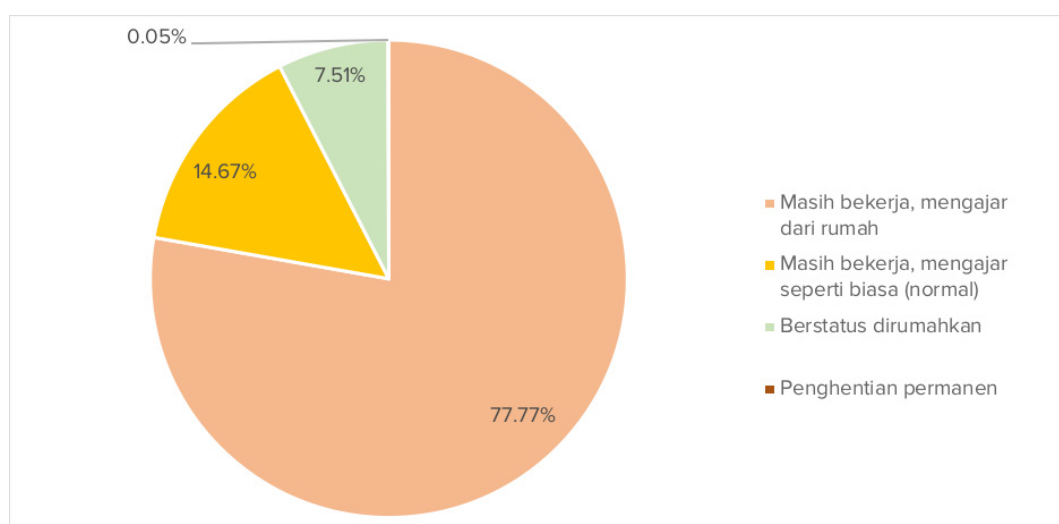
Dengan diberlakukannya pembatasan fisik dan pengalihan moda pembelajaran PAUD, sebanyak 77.77% tenaga pendidik (1,511 orang) mengalami transformasi pekerjaan, dimana mereka harus mengubah model dan moda pembelajaran dari tatap muka di sekolah menjadi pembelajaran tidak langsung melalui PJJ. Selain itu, terdapat 146 guru (7.51%) yang dalam status 'dirumahkan' karena tidak adanya kegiatan di PAUD tempat mereka bekerja. Dari mereka yang di rumahkan, 72.3% (102 orang) berasal dari Kabupaten Brebes, 19.9% (28 orang) dari Kabupaten Pemasang, dan Kabupaten Sumbawa terdapat 11 tenaga pendidik (7.8%). Guru-guru yang telah dirumahkan percaya bahwa kondisi ini adalah sementara, dan mereka akan kembali bekerja di PAUD yang sama setelah kondisi kembali normal.

Secara rata-rata, keyakinan mereka mencapai 80% bahwa mereka akan kembali bekerja seperti sedia kala.

PENDAPATAN TENAGA PENDIDIK

Salah satu dampak terbesar dari berlangsungnya krisis COVID-19 bagi tenaga pendidik PAUD adalah masalah pendapatan. Sebagai acuan, median pendapatan tenaga pendidik dari 1,854 tenaga pendidik per bulan adalah Rp. 465,799. Pendapatan terkecil adalah '0' - kemungkinan besar mengindikasikan bahwa satuan PAUD tersebut mengalami hambatan dari segi pembayaran SPP orang tua dan pencairan dana BOP. Dengan median pendapatan Rp. 300,000, kepala sekolah cenderung memiliki median pendapatan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan guru, dengan median Rp. 225,000. Tidak ditemukan peningkatan penghasilan yang berarti pada tenaga pendidik dengan pengalaman di bawah 1 tahun s.d. 10 tahun, yaitu tetap pada kisaran Rp. 200,000 per bulan. Secara kecenderungan, baru terdapat perbedaan median pendapatan setelah guru bekerja lebih dari 10 tahun, yaitu sebesar Rp. 350,000 per bulan.

GRAFIK 16: STATUS BEKERJA TENAGA PENDIDIK PAUD (%)



Dilihat dari nilai nominal minimum, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan SMP - pascasarjana, memperlihatkan bahwa tenaga pendidik yang masih bekerja tanpa mendapatkan pendapatan. Namun, kualifikasi pendidikan mempengaruhi median pendapatan, pendapatan maksimum, dan kisaran interkuartil (IQR). Secara umum, semakin tinggi pendidikan tenaga pendidik semakin tinggi kemungkinan dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik, walaupun tidak menjamin pendapatan minimum. Walaupun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan dalam hal pendapatan, antara tenaga pendidik dengan status ASN dan non-ASN. Berdasarkan distribusi nilai, tenaga pendidik dengan status ASN memiliki gaji minimum Rp. 2,000,000 per bulan, atau 319% kali lebih besar dari nilai maksimum pendapatan tenaga pendidik non-ASN.

Jumlah pendapatan yang sangat kecil juga tercermin pada rendahnya kontribusi pendapatan tenaga pendidik pada pengeluaran rumah tangga. Secara keseluruhan, pendapatan tenaga pendidik PAUD secara rerata adalah 37% dan median 29%. Dengan rendahnya pendapatan yang diperoleh tenaga pendidik, menimbulkan pertanyaan mengenai pendidik PAUD sebagai profesi yang dihargai secara materi dan juga ketegangan antara tekanan ekonomi dan kewajiban moral seorang pendidik. Di sisi lain, sebanyak 25.7% responden (669 orang) menyatakan kontribusi pendapatan mereka bagi pengeluaran keluarga di atas 50%, atau bisa dikatakan cukup signifikan bagi keluarga. Rata-rata, 79.82% (534 orang) pendidik yang berkontribusi >50% ini berstatus menikah, 8.52% (57 orang) berstatus janda, dan 11.66% (78 orang) berstatus menikah. Kelompok ini memiliki median pendapatan sebesar Rp. 350,000, dengan 400 orang berpenghasilan kurang dari 2 juta, dan 134 orang berpenghasilan sebesar 2 juta ke atas. Mereka yang memiliki penghasilan lebih dari 2 juta kebanyakan adalah guru PNS atau guru bersertifikasi dengan rata-rata tunjangan Rp. 2 juta per bulan. Perlu pula digarisbawahi, bahwa 99% tenaga pendidik PAUD di Indonesia adalah perempuan, yang kemudian menimbulkan kebutuhan akan analisis gender dalam kerangka pendidik dan ketenagakerjaan.

Dari 1,886 tenaga pendidik, 57.64% (1,087 orang) mengaku mendapatkan pendapatan secara teratur setiap bulan, sementara 18.19% (313 orang) hanya mendapatkan pendapatan tiga bulan sekali, kemungkinan karena menggunakan mekanisme BOP atau pun dana desa. Selama Pandemi COVID-19 berlangsung, 66.81% (1,260 orang) masih menerima pendapatan mereka secara utuh. Tetapi, sebanyak 17% (328 orang) mengalami pemotongan pendapatan hingga 50%, dan 14.90% (281 orang) tidak mendapatkan pendapatan sama sekali.

Sebagian besar tenaga pendidik (42.42% atau 800 orang) berasal dari kelompok yang memiliki rerata belanja rumah tangga sebesar 1 s.d. 2 juta per bulan dan 29.64% (559 orang) membutuhkan 2-3 juta per bulan. Hanya 13.39% (260 orang) tenaga pendidik dengan keluarga berpengeluaran di atas 3 juta. Sementara, krisis wabah telah berdampak cukup signifikan pada penghasilan keluarga. Dengan membandingkan rerata, untuk kelompok dengan pendapatan 1-2 juta per bulan ditemukan bahwa COVID-19 telah mengurangi pendapatan keluarga sebesar 58.73%, atau lebih dari setengah pendapatan bulanan mereka. Pada kondisi ini, tentu diperlukan bantuan bagi keluarga tenaga pendidik PAUD.

Dengan penurunan penghasilan yang cukup drastis di tingkat keluarga, sebagian besar tenaga pendidik PAUD harus kreatif dan melakukan pekerjaan sampingan (45.65% atau 861 orang), sementara 23.81% (449 orang) mengandalkan tabungan, termasuk menjual aset dan barang berharga, atau berhutang kepada orang lain (non keluarga, sebesar 14.16% atau 267 orang).

ASPIRASI PENDIDIK

Pendidik melihat urgensi kebutuhan PAUD terutama dalam kondisi pandemi. Disampaikan oleh beberapa PAUD dalam lokakarya, Ibu Artalita (nama samaran) menyatakan bahwa di desa tempat ia bekerja, sebagian besar orang tua adalah petani dan peladang yang harus bekerja sepanjang hari, pelibatan orang tua sangat jauh dari gambaran ideal. Sehingga pendidikan pengasuhan pun tidak dapat dilakukan, dan meningkatkan kebutuhan akan PAUD bagi perkembangan anak semakin tinggi. Guru-guru dari seluruh kabupaten, mengekspresikan niat mereka untuk melakukan pendampingan berkala pada anak-anak. Dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran daring, Ibu Dahliati (bukan nama sebenarnya) , bersama dengan guru-guru lainnya, Ibu Dahliati mencoba untuk tetap membantu, mengevaluasi dan juga menjadi komunikasi dengan anak-anak didiknya setidaknya sekali setiap 4-5 hari. Komunikasi dengan peserta didik dilakukan melalui home visit dan juga komunikasi melalui *WhatsApp* atau SMS.

Selain itu pendidik-pendidik pun mencoba mengatasi kesulitan didalam melakukan pembelajaran daring atau jarak jauh dengan cara menggabungkan beberapa metode pembelajaran dengan menggabungkan wacana pembelajaran daring dan pada saat yang sama masih melakukan kegiatan yang melibatkan pertemuan dengan anak atau orang tua. Di kabupaten Pematang Jaya, menurut penuturan ibu Reni (nama samaran), salah seorang pengelola PAUD, guru di lembaganya melakukan kegiatan kunjungan ke rumah untuk membantu menjelaskan kepada orang tua kegiatan yang dapat dilakukan dengan anak di rumah. Kunjungan ke rumah dilakukan dengan cara guru mendatangi rumah siswa sehingga orang tua dapat berkomunikasi langsung dengan guru bagaimana strategi melakukan kegiatan di rumah. Meskipun demikian dari hasil lokarya ditemukan bahwa pendekatan kunjungan rumah ini cukup memakan biaya dimana guru harus mengeluarkan biaya transport untuk mendatangi kediaman peserta didik. Dalam melakukan kunjungan-kunjungan, pendidik berupaya untuk selalu menggunakan masker dan melakukan praktik CTPS (cuci tangan pakai sabun); namun, seperti yang dikatakan oleh Ibu Dahliati, mereka pun khawatir dengan potensi penularan COVID-19.

Beberapa guru, seperti Ibu Lina (nama samaran) dari Kabupaten Brebes dan juga Ibu Sinta dari Kabupaten Pematang Jaya merasa ada kebutuhan yang sangat tinggi di masyarakat akan PAUD, baik itu dilihat dari sudut anak-anak yang ingin kembali bertemu dengan teman-teman, atau pun dari sudut orang tua yang kewalahan dengan anak-anak yang harus berada di rumah. Mereka memiliki harapan agar peraturan yang terkait dengan pembukaan kembali satuan PAUD dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Di daerah Ibu Lina dan Ibu Sinta misalnya, mereka merasa yakin tidak ada kasus COVID-19, sehingga mereka berharap agar aturan pembukaan satuan PAUD dapat direlaksasi sesuai dengan kondisi kesehatan di daerah masing-masing. Hal ini mengindikasikan perlu adanya kebijakan yang kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal. Saat ini SKB 4 Menteri masih mensyaratkan bahwa seluruh satuan PAUD baru

dapat kembali beroperasi di bulan November, itupun di daerah dengan kategori Zona Hijau atau Zona Kuning.

Bila krisis berlangsung lebih dari tiga bulan, dari sisi pembelajaran, 84.12% PAUD (694 SP) berkeinginan untuk meningkatkan kemampuan mereka beradaptasi dengan kondisi pandemi. Sebanyak 41.59% PAUD (346 SP) membutuhkan keterampilan untuk membantu orang tua melakukan pengasuhan. Hal ini mengisyaratkan adanya kebutuhan satuan PAUD untuk dapat mengembangkan modul-modul kegiatan yang dapat membantu orang tua selama pandemi ini. Selain itu sebanyak 40.87% (340 SP) menginginkan keterampilan dalam mengembangkan pembelajaran yang adaptatif, baik daring atau pun luring. Sementara 36.66% (305 SP) menggarisbawahi pentingnya dukungan paket data internet untuk guru dan orang tua.

ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Persepsi mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru (ABK), atau yang dahulu lebih dikenal sebagai New Normal, merupakan diskursus yang penting bagi tenaga pendidik, karena faktor keterikatan dengan murid, tekanan ekonomi, kebebasan beraktivitas dan mengaktualisasi identitas. Menjawab mengenai pertanyaan tentang COVID-19, 79.91% atau 1,368 guru dan kepala sekolah merasa bahwa tidak ada kasus COVID-19 di tempat mereka tinggal. Hanya 20.09% (344 orang) yang menyatakan bahwa wilayah mereka terjangkit COVID-19.

Persepsi tenaga pendidik mengenai keamanan wilayah mereka dari COVID-19 tidak sepenuhnya benar. Hanya 33.48% 541 orang persepsi yang sesuai dengan kondisi mereka di wilayah bebas kasus positif COVID-19; dan 15% (250 orang) yang menjawab sesuai dengan keadaan tentang keberadaan riwayat kasus positif COVID-19 di wilayah mereka tinggal. Kesenjangan antara persepsi dan keadaan COVID-19 ini memperlihatkan bahwa sebagai tenaga pendidik, guru dan kepala sekolah perlu dibekali dan dilibatkan dalam perkembangan infeksi COVID-19 di wilayah mereka.

Walaupun demikian, rata-rata guru dan kepala sekolah meyakini hingga 62% (1,712 responden) bahwa penularan COVID-19 sangat mungkin terjadi di daerah di mana mereka tinggal. Dalam kondisi krisis wabah, sekolah dan kegiatan PAUD akan menjadi medium penularan yang mengancam kesehatan anak, pendidik dan masyarakat sekitar (rata-rata hingga 67%, dari 1,712 responden). Dari 1,712 responden guru dan kepala sekolah, rata-rata cukup yakin dengan pengetahuan dan informasi yang mereka dapat mengenai penularan COVID-19. Dengan optimisme tersebut, sebanyak 31.37% (537) responden yakin bahwa sekolah sudah dapat kembali beraktivitas dalam 1 bulan ke depan, diikuti 29.96% (513 responden) yang merasa bahwa sekolah sudah dapat melakukan tatap muka dalam 2-3 bulan ke depan. Walaupun demikian, 39.7% (637) memperkirakan kondisi normal baru bisa dirasakan di atas 3 bulan.

Respon Pemerintah Daerah

PERSEPSI DINAS PENDIDIKAN MENGENAI DAMPAK PANDEMI TERHADAP PAUD

Secara umum dinas pendidikan di ketiga kabupaten ini menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini memiliki dampak terhadap PAUD. Hal ini terlihat dari hasil lokakarya yang menunjukkan bagaimana pandemi ini memaksa dinas pendidikan untuk merelokasi anggaran mereka di bidang PAUD. Sebagaimana dikemukakan oleh Kabid PNFI Dindikpora Kabupaten Brebes:

Drs. Imam Sugiharto, diantara beberapa kegiatan yang dihilangkan dari anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes adalah anggaran perjalanan dinas, rapat dan monev. Sementara itu anggaran untuk kegiatan BIMTEK dan pelatihan peningkatan kapasitas tenaga pendidik sebesar 140 juta masih bisa dipertahankan.

Di kabupaten Sumbawa, penyesuaian anggaran ini mempengaruhi bantuan insentif untuk guru PAUD. Awalnya, sebelum masa pandemi, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa dapat mengalokasikan insentif sebesar Rp 350.000,00 untuk guru-guru honorer di TK formal selama setahun. Akan tetapi dengan realokasi anggaran ini, pemerintah Kabupaten Sumbawa hanya mampu menyediakan insentif selama enam bulan.

Dinas Pendidikan di ketiga kabupaten mengakui bahwa Pembelajaran Daring atau Pembelajaran Jarak Jauh masih memiliki kendala dalam implementasinya. Dinas Pendidikan di Kota Brebes sebagaimana dikemukakan oleh Drs. Imam Sugiharto menyatakan bahwa selama masa pandemi ini, mereka kesulitan melakukan koordinasi dengan satuan PAUD di wilayahnya karena persoalan akses internet. Hal ini sesuai dengan hasil survei yang menyatakan bahwa hanya sekitar 11.9% guru yang merasakan dukungan dari dinas pendidikan selama masa pandemi ini.

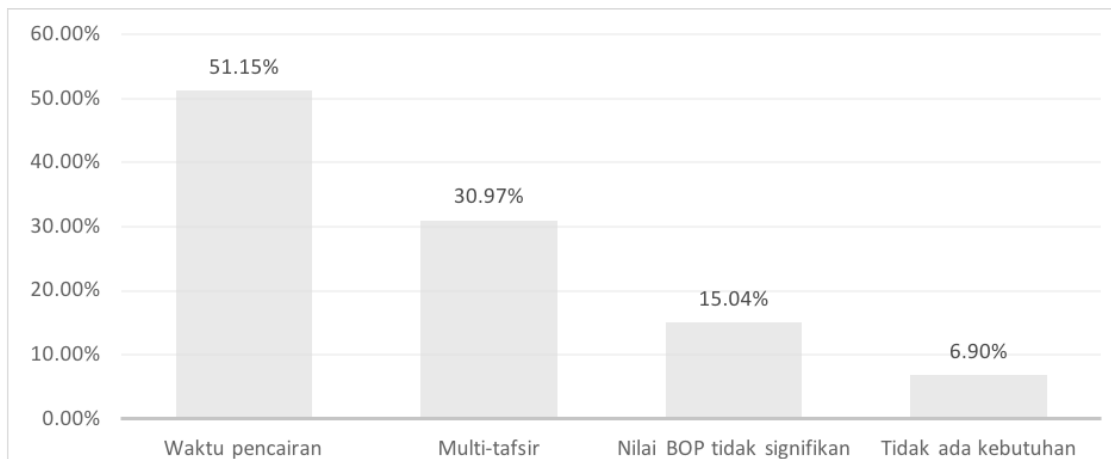
PEMANFAATAN PELONGGARAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (BOP)

Dinas Pendidikan di ketiga kabupaten dalam kegiatan fasilitasi ini telah mengetahui aturan terkait relaksasi dana BOP PAUD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 19/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOS dan PERMENDIKBUD Nomor 20/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOP PAUD dan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19. DAK Non-Fisik BOP PAUD selama masa pandemi ini diprioritaskan penggunaannya untuk: 1) komponen kegiatan pembelajaran dan bermain, yang meliputi pembelian pulsa atau paket data serta mendukung layanan pendidikan daring berbayar, dan 2) komponen kegiatan pendukung seperti pembiayaan honor pendidik dan pembelian alat-alat kesehatan seperti cairan disinfektan, sabun cair, masker dan alat penunjang lainnya.

Mayoritas PAUD (88.24% atau 615 SP) mengetahui mengenai perubahan penggunaan dana BOP, sesuai dengan PERMENDIKBUD No. 20/2020; hanya 11.76% sekolah (82 SP) yang tidak mengaku tidak mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan PERMENDIKBUD 20/2020. Walaupun klaim ketidaktahuan informasi lebih tinggi (11.7%), namun jumlah sekolah yang telah mendapatkan manfaat dari relaksasi BOP sedikit lebih tinggi, yaitu 93.92% (649 SP) dan yang

tidak mendapatkan manfaatnya hanya 6.08% (42 SP). Brebes menjadi kabupaten yang memiliki jawaban tertinggi (57.1% atau 24 SP) dari belum dapat dimanfaatkannya kebijakan relaksasi BOP, diikuti oleh Sumbawa (23.8% atau 10 SP) dan Pematang Jaya (16.7% atau 7 SP).

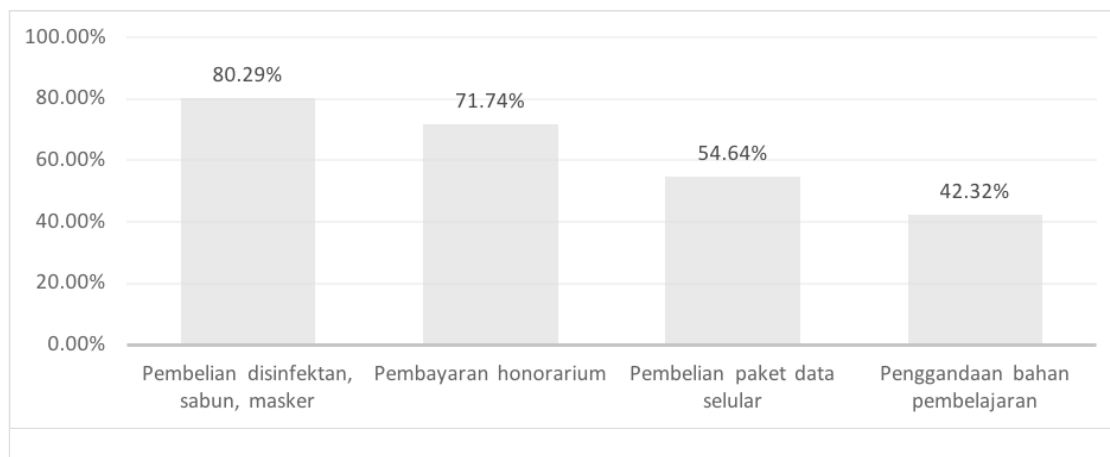
GRAFIK 17: HAMBATAN PENGGUNAAN DANA BOP PAUD (PERMENDIKBUD 20/2020)



Beberapa kendala menghalangi penggunaan BOP secara optimal. Sebanyak 51.15% (289 SP) merasa bahwa waktu pencairan BOP tidak tepat. Hal ini tercermin dengan hasil lokakarya, di mana pemanfaatan BOP di Kabupaten Brebes mengalami kendala pencairan. Pada saat lokakarya, disebutkan bahwa dari 17 kecamatan di Kabupaten Brebes, hanya 4 kecamatan yang bisa mengakses dana BOP sesuai dengan jadwal, sedangkan di kabupaten Sumbawa dari total Rp 14 Miliar dana BOP yang harus dicairkan, baru sekitar Rp 6 Miliar yang sudah dicairkan.

Selain adanya keterlambatan pencairan, 30.97% responden merasa bingung dengan penafsiran kebijakan yang berbeda (175 lembaga) atau tafsir berganda. Dari perjalanan fasilitasi, setidaknya ditemukan dua bentuk perbedaan pemahaman. Bentuk yang pertama adalah, rasa "takut salah" yang diungkapkan oleh pengelola PAUD Pelangi (bukan nama sebenarnya) yang mengatakan bahwa untuk menghindari 'sanksi' yang tidak diinginkan dikarenakan adanya multi-tafsir, mereka tetap merasa lebih "aman" jika pembayaran honorarium tetap menggunakan istilah "transportasi" dan bukan "insentif" atau pun "honorarium." Hal ini tentu mengakibatkan kesulitan tersendiri, terutama bagi KEMDIKBUD dalam memonitor penggunaan dana BOP di saat Pandemi COVID. Bentuk kedua adalah pemahaman yang parsial atau informasi yang sepotong-sepotong. PAUD Mentari Ceria (bukan nama sebenarnya) mengeluhkan ketidakhadanya informasi yang lengkap tentang pelonggaran BOP dengan dikeluarkannya PERMENDIKBUD 20/2020. Di awal-awal pencairan BOP, mereka hanya mendapatkan informasi bahwa BOP digunakan untuk pencegahan COVID-19, dan tidak mengetahui tentang butir 2.b, yaitu dipergunakan untuk membeli disinfektan, sabun, dan masker. Andaikan mereka mengetahui secara keseluruhan mengenai manfaat PERMENDIKBUD 20/2020, mereka akan menggunakan BOP untuk membiayai pos-pos yang lebih penting, yaitu honorarium guru dan paket data selular.

GRAFIK 18: PEMANFAATAN PELONGGARAN DANA BOP PAUD SELAMA PANDEMI COVID-19 (%)



Persoalan lain terkait dengan pencairan dana BOP ini juga berkaitan dengan kerjasama lintas sektoral atau lintas Kementerian Lembaga (K/L). Di Kabupaten Brebes misalnya, terdapat dikotomi jumlah BOP yang dikelola oleh satuan PAUD yang berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dengan Raudhatul Athfal (RA) yang berada di bawah pengawasan Dinas Agama. Hal ini dikemukakan oleh salah satu staff perwakilan Kementerian Agama, Kabupaten Brebes yang menyatakan bahwa BOP bagi RA mengalami pengurangan dari Rp. 600.000,- menjadi Rp. 400.000,-. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia telah melaksanakan otonomi daerah menurut UU. No 33 Tahun 2004 yang memberikan kebebasan bagi daerah untuk melakukan penganggaran, akan tetapi dalam implementasi BOP, daerah masih sepenuhnya mengacu kepada aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Agama, Kabupaten Brebes harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Hal ini mengindikasikan belum adanya koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama dalam hal pengelolaan dana BOP.

Meskipun demikian, terdapat juga praktek baik di Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang saat ini berada dalam posisi 10 besar di Provinsi Jawa Tengah sebagai kabupaten yang paling cepat mencairkan dana BOP. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang menyatakan bahwa sebesar 97% satuan PAUD di Kabupaten Pemalang telah memanfaatkan relaksasi dana BOP ini. Meskipun demikian, terdapat harapan dari pemerintah Kabupaten Pemalang agar dana BOP dapat lebih difleksibelkan. Sebagai contoh, aturan PERMENDIKBUD No 13 Pasal 10 Tahun 2020 melarang pembelian laptop dan infrastruktur yang bersifat fisik. Tentunya dalam situasi pandemi yang menuntut pembelajaran dilakukan secara daring atau jarak jauh, aturan ini diharapkan dapat ditinjau kembali.

KOORDINASI ANTAR DINAS / DUKUNGAN PEMERINTAH

Salah satu masalah yang muncul pada saat pandemi ini berkaitan dengan isu koordinasi antar dinas dalam pengelolaan dana BOP misalnya, koordinasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama masih sangat minim sehingga mengakibatkan terjadinya perbedaan jumlah BOP antara satuan PAUD dan RA.

Meskipun demikian, koordinasi di Kabupaten Pemalang telah cukup baik dimana masing-masing Dinas telah memiliki tupoksi yang jelas terkait untuk membantu keberadaan satuan PAUD di daerahnya. Sebagai contoh, dana desa tetap dapat digunakan untuk memberikan insentif tambahan kepada guru PAUD, disamping digunakan untuk melakukan penyemprotan terhadap lembaga PAUD yang ada di desa tersebut. Dinas kesehatan pun dengan menggunakan protokol kesehatan yang jelas, tetap melakukan perawatan di rumah untuk balita yang mengalami stunting. Meskipun demikian tidak bisa dinafikan situasi pandemi ini membuat layanan Posyandu menjadi mengalami hambatan karena banyak Posyandu yang tidak bisa melaksanakan fungsinya.

Dari hasil lokakarya yang dilakukan di tiga kabupaten, ditemukan bahwa persoalan koordinasi yang paling utama adalah terkait dengan masih simpang siurnya interpretasi pemerintah desa mengenai alokasi dana desa untuk PAUD. Kecuali di Kabupaten Pemalang, di Kabupaten Brebes dan Sumbawa, dana desa ini menjadi persoalan tersendiri. Di Kabupaten Brebes misalnya, sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dari Kementerian Agama, Kabupaten Brebes bahwa aturan yang menyatakan bahwa dana desa dapat digunakan untuk membantu PAUD milik desa seringkali diterjemahkan sebagai PAUD yang dimiliki oleh pemerintah desa, melalui SK yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Akibatnya RA yang sebagian besar dimiliki oleh yayasan atau pribadi seringkali tidak mendapatkan bantuan dari desa.

Persoalan koordinasi dengan pemerintah desa ini berdampak terhadap penggunaan dana desa selama situasi pandemi ini. Bagian berikutnya secara spesifik akan membahas lebih lanjut mengenai alokasi Dana Desa dan penyaluran Biaya Langsung Tunai (BLT) semasa pandemi COVID-19.

Belum optimalnya keberadaan Satuan Gugus PAUD di tiga daerah ini. Hal ini mengakibatkan solusi yang diambil masih dilakukan tanpa memperhatikan kerjasama lintas sektoral. Sebagai contoh, di kabupaten Brebes, dana BOP banyak digunakan untuk membangun tempat cuci tangan, Mandi Cuci Kakus, dan pembelian masker; ketika sebetulnya Dinas Kesehatan memiliki anggaran yang dapat diserap untuk kegiatan tersebut. Dalam situasi pandemi, hal ini mengakibatkan tidak optimalnya perlindungan terhadap satuan PAUD. Dalam konteks program PAUD HI, hal ini juga menunjukkan belum terintegrasinya layanan PAUD HI di daerah tersebut.

DANA DESA DAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI SEMASA PANDEMI COVID-19

Berdasarkan lokakarya di tingkat kabupaten, terlihat bahwa pengalokasian Dana Desa untuk PAUD masih bersifat acak dan belum dilakukan secara sistematis dan merata di semua wilayah. Walaupun demikian, banyak PAUD yang telah merasakan manfaat dari Dana Desa. Bapak Zulfikar, seorang penilik PAUD berpendapat bahwa banyak desa di kabupatennya yang telah mendapatkan dana desa walaupun komitmen dan cakupannya berbeda-beda. Bapak Budiharto, seorang kepala desa dari Desa Giri (nama partisipan dan desa disamarkan), telah mengalokasikan dukungan sebesar 1.5 juta rupiah untuk kepala sekolah dan satu juta rupiah untuk pendidik untuk membantu personalia PAUD. Walaupun demikian, keputusannya masih sangat terbatas untuk PAUD milik pemerintah desa saja, karena terganjal dengan tafsir dan arahan dari Dinas BPMD yang mensyaratkan PAUD milik desa sebagai penerima dana desa. Di Kabupaten Brebes dan Sumbawa, masih terdapat interpretasi bahwa dana desa hanya digunakan untuk PAUD yang dimiliki oleh pemerintah desa. Sehingga sebelum masa pandemi ini pun, penggunaan dana desa untuk kepentingan satuan PAUD belum optimal.

Kesadaran mengenai kerentanan PAUD masih belum dirasakan di tingkat desa, sehingga dalam situasi pandemi ini ketika Dana Desa dipaksa mengalami relokasi, justru anggaran Dana Desa untuk PAUD dialihkan untuk dana penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Asumsi kultural yang menganggap bahwa laki-laki merupakan pencari nafkah utama sehingga menjadi prioritas penerima dana BLT, membuat guru PAUD yang mayoritas merupakan perempuan tidak menjadi prioritas penerima dana BLT ini. Dalam situasi pandemi, hal ini semakin menjadi persoalan karena Dana Desa untuk PAUD dialihkan untuk alokasi dana BLT.

Penutup Bagian 2

Melalui Bagian 2, berbagai temuan survei dan fasilitasi telah dijabarkan. Dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak dan mengubah pelaksanaan PAUD. Pembelajaran tatap muka dengan mendadak harus ditransformasikan menjadi PJJ yang membutuhkan banyak perubahan dan kesiapan dari tingkat sekolah, pendidik dan juga keluarga siswa. Di lain pihak, temuan - temuan ini mengingatkan bahwa selain berusaha untuk memenuhi layanan terhadap siswa, lembaga PAUD dan tenaga PAUD pun harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahan, terutama dengan dampak sosial-ekonomi. Apa yang dapat dijadikan pembelajaran dari temuan-temuan ini? Tim Fasilitasi melakukan analisis berdasarkan model induksi dengan pengendapan-pengendapan muatan di Bagian 3. Rumusan kerentanan berganda PAUD di masa pandemi COVID-19.



BAGIAN 3

**KONSEPTUALISASI
KERENTANAN
BERGANDA
PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI**

Pendahuluan

Pada bagian ini, tim fasilitasi melakukan sintesis antara informasi yang diperoleh selama kajian dan fasilitasi dengan konteks di luar lingkup pendataan, baik itu trend di tingkat nasional atau dengan kajian-kajian lain. Dari proses induksi ini dihasilkan kerentanan berganda PAUD dalam periode pandemi COVID-19. Seperti yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, pandemi COVID-19 mempengaruhi pelaksanaan PAUD di tiga ranah, yaitu pembelajaran, pengelolaan dan personalia. Beberapa kebijakan spesifik penanganan COVID-19 telah diupayakan, terkhususnya oleh KEMDIKBUD dan KEMENAG dengan pemanfaatan dana BOP PAUD di masa pandemi COVID-19.

Pemaparan temuan di Bagian 2 secara garis besar menegaskan mengenai kerentanan PAUD dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dengan menggunakan hasil analisis di Bagian 2 dan digabungkan dengan tren, observasi dan kajian yang terlebih dahulu dilakukan, pada Bagian 3 ini, dikembangkan lebih jauh mengenai kerentanan berganda PAUD. Dari konteks di Kabupaten Brebes, Kabupaten Pematang dan Kabupaten Sumbawa, setidaknya bisa diidentifikasi 7 dimensi kerentanan berganda yang saling berkaitan (*intersecting*). Berikut penjelasan lebih lanjut.

Kerentanan Berbasis Infrastruktur

Sebagai jenjang pendidikan yang berkembang dengan teramat pesat. Persebaran PAUD tidak hanya terkonsentrasi di perkotaan seperti di dekade sebelumnya. Kampanye Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui gerakan PAUD-isasi dan Satu-Desa-Satu-PAUD, membuat PAUD juga berkembang pesat di berbagai pelosok tanah air. Sayangnya, perkembangan dari sisi jumlah ini tidak serta-merta diiringi dengan perbaikan infrastruktur serta fasilitas yang dapat menunjang kinerja guru-guru dalam mengajar siswa didik, terutama pada saat pandemi. Seperti yang telah sebelumnya, kesenjangan infrastruktur sangat mempengaruhi kemampuan pendidik dalam menjangkau anak-anak peserta didik baik secara daring atau pun secara luring. Tiga akses penting yang dapat mendukung PJJ adalah: akses listrik, akses internet, dan akses terhadap perangkat keras (gawai atau komputer dengan modem).

Data SUSENAS 2018 menyebutkan masih ada 1.49% rumah tangga tanpa listrik, 0.12% di perkotaan dan 3.14% di pedesaan. Sedangkan akses internet di Indonesia baru dapat dinikmati oleh 19% penduduk berusia lebih dari 5 tahun, dengan kesenjangan perkotaan (25.85%) dan pedesaan (10.83%). Untuk akses komputer, baru dirasakan oleh 20.05% rumah tangga, rerata dari 28.43% urban dan 9.93% rural.

Kesenjangan-kesenjangan ini pun di rasakan di Kabupaten Brebes, Kabupaten Pematang dan Kabupaten Sumbawa. Dari data disagregat di tingkat kabupaten, didapatkan gambaran parsial⁴³ mengenai masih adanya rumah tangga yang hidup tanpa listrik dan internet atau pun seluler. Di Kabupaten Sembawa, data disagregat SUSENAS menunjukkan bahwa masih terdapat 137,133 rumah tangga tanpa listrik, di Kabupaten Pematang, masih terdapat 100,180 rumah tangga, dan

di Kabupaten Sumbawa, 38,880. Sedangkan akses internet, gambaran parsial dari data susenas adalah, masih ada setidaknya dari 142,000 rumah tangga dengan anak usia 7-12 tanpa internet, 103,000 rumah tangga dari Kabupaten Pematang Jaya, dan 42,853 dari Kabupaten Sumbawa.

Kajian ini memperlihatkan kendala infrastruktur internet dan perangkat keras pendukung sebagai salah satu penyebab pendidik tidak dapat menjangkau siswa-siswi PAUD dikarenakan kendala pembatasan fisik selama pandemi COVID-19 [lihat **Grafik 9** dan **Grafik 10**]. Sebagian besar tenaga pendidik mengandalkan akses selular mandiri seperti yang dibahas dalam bagian "Pembelajaran Daring." di halaman 26. Mendukung pemenuhan akses jaringan telekomunikasi, perangkat pendukung, dan juga keterampilan pembelajaran dapat membantu tenaga pendidik menjangkau lebih banyak siswa selama pandemi. Penyediaan infrastruktur perlu dikaitkan dengan kendala sosio-ekonomi di mana terdapat kesenjangan dalam kemampuan untuk membeli paket data, kebiasaan dan keterampilan dalam penggunaan gawai untuk pendidikan anak usia dini baik bagi pendidik atau pun orang tua. Walaupun demikian, pembelajaran daring atau pun luring tidak serta merta dapat menggantikan nilai penting PAUD di mana interaksi fisik, sosial dan psikologis turut membantu perkembangan anak-anak dan membekali mereka dengan berbagai kemampuan akademik dan non-akademik.

Kerentanan Berbasis Kapasitas Pembelajaran

Ketersediaan akses listrik, internet dan perangkat keras, tidak semerta-merta dapat mengatasi masalah pembelajaran. Sesuai dengan aspirasi guru mengenai kebutuhan keterampilan pembelajaran yang adaptatif [lihat bagian "Aspirasi Pendidik."]. Guru dengan akses internet masih sangat membutuhkan bantuan yang bersifat teknis, seperti menyediakan dan mengelola ruang siber, atau pun yang bersifat muatan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi, menyederhanakan, meramu, dan mengkonversikan pokok pembelajaran ke dalam bentuk nir tatap muka, serta melakukan monitoring secara berkala untuk memantau efektivitas pembelajaran. Rangkaian kegiatan ini membutuhkan pemahaman dan keterampilan bagi guru disesuaikan dengan kondisi masing-masing, dan perlu dilakukan asistensi dan evaluasi secara berkala.

Seperti disebutkan di bagian terdahulu, bahwa dengan masih rendahnya akses internet di Indonesia, maka diperlukan inovasi yang dapat membantu guru dalam menangani penjangkauan anak-anak usia dini yang berada di luar jaringan komunikasi. Dalam Surat Edaran Nomor 15/2020, disebutkan mengenai penyelenggaraan belajar dari rumah (BDR), disebutkan bahwa pembelajaran luar jaringan mencakup televisi, radio, modul belajar dan lembar tugas, bahan ajar cetak dan alat peraga. Kajian ini memperlihatkan bahwa pembelajaran televisi dan radio tidak terlalu banyak dilakukan, karena sifatnya yang pasif. Kebanyakan sekolah memilih untuk menerapkan penggunaan lembar kerja yang diiringi dengan sesekali melakukan kunjungan rumah [lihat **Grafik 7**]. Agar optimal, penggunaan lembar kerja tetap memerlukan mekanisme

43 Dikarenakan penggunaan metode block sampling untuk keperluan data di tingkat nasional, penggunaan data Susenas di level kabupaten tidak dapat memberikan gambaran utuh mengenai kondisi akses listrik dan internet untuk telaah di tingkat kabupaten; sehingga perlu berhati-hati dalam menggunakan angka absolut.

interaksi dengan guru dalam rangka umpan balik, evaluasi, dan juga kesempatan untuk membangun hubungan sosial, sehingga orang tua dan anak-anak tidak merasa hanya dibebani dengan tugas-tugas, tetapi juga dengan pengalaman belajar yang bermanfaat, dipahami, tanpa mengabaikan aspek sosial dari proses pembelajaran.

Dalam pembelajaran dengan metode luring, dikarenakan karakter PAUD yang secara intensif melibatkan interaksi fisik-psikologis dengan peserta didik dan antar-peserta didik, diperlukan review dan telaah secara berkesinambungan antara pemerintah (pendidikan, kesehatan, dan desa) bersama-sama dengan guru dan orang tua untuk mengatasi masalah pembatasan interaksi sosial anak-anak dan kemungkinan melakukannya secara aman dan dapat dipercaya melalui pembekalan protokol kesehatan yang memadahi.

Kerentanan Berbasis Usia dan Kondisi Peserta Didik

Salah satu kerentanan PAUD dilatarbelakangi oleh usia peserta didik (0-6 tahun) yang masih sangat memerlukan stimulasi interaksi secara sosial dan psikologis baik dengan pendidik atau pun dengan sesama siswa. Usia yang sangat muda, membuat pengalihan pembelajaran dari tatap muka langsung ke pelibatan melalui pembelajaran virtual sangat sulit dilakukan. Kajian ini juga memperlihatkan bahwa PJJ hanya menjangkau kelompok usia 5-6 tahun, dan sangat sedikit bisa menjangkau anak di bawah 5 tahun [lihat kembali **Grafik 8**, **Grafik 9**, dan **Grafik 10**]

Sebagai catatan, pada masa awal ekspansi PAUD ke seluruh pelosok Indonesia, salah satu semangat yang disebarkan adalah pentingnya stimulasi pendidikan untuk membantu perkembangan verbal dan sosial-emosional anak-anak⁴⁴. Dari beberapa perkembangan wacana pengasuhan oleh orang tua dapat diambil sebagai salah satu kebijakan untuk mengatasi kesenjangan stimulasi dini, namun beberapa program pengasuhan banyak diletakan pada asumsi universal bahwa orang tua memiliki ruang, waktu, fasilitas, kemampuan dan kebutuhan yang sama untuk melakukan pengasuhan anak. Pendalaman modul-modul parenting diperlukan untuk 'mendukung' orang tua dalam mengasuh anak-anak, terutama di masa pandemi COVID-19, dari berbagai latar belakang usia, kebutuhan, sosio-ekonomi dan budaya.

Rendahnya cakupan PAUD juga menjadi indikasi tentang tantangan pemenuhan kebutuhan holistik anak-anak usia dini, terutama di saat pandemi COVID-19. Di saat pandemi COVID-19, anak-anak dengan usia lebih muda menjadi relatif lebih sulit dijangkau dengan layanan. Laporan Kementerian Kesehatan dan UNICEF menyatakan bahwa pandemi COVID-19 telah menurunkan cakupan layanan dengan ditutupnya 76% Posyandu. Penutupan Posyandu berdampak pada penghentian monitoring tumbuh kembang anak (dilaporkan 86% fasilitas kesehatan), penundaan imunisasi dasar (dilaporkan 55% fasilitas kesehatan), distribusi Vitamin A (dilaporkan 46% fasilitas kesehatan), dan pelayanan antenatal (dilaporkan 46% fasilitas kesehatan)⁴⁵. Laporan

44 Mae Chu Chang and others, *Early Childhood Education and Development in Indonesia: An Investment for A Better Life* (Washington, D.C., 2006); UNICEF, *UNICEF Indonesia Issues Brief: Education and Early Childhood Development Critical Link* (Jakarta, 2012).

45 UNICEF, *Report of Rapid Health Assessment : Ensuring Sustainability of Essential Health Services for Children and Mothers during the COVID 19 Pandemic in Indonesia* (Jakarta, Indonesia, 2020).

WHO pun menunjukkan adanya penurunan cakupan dalam rentang dari 10% - 40 % untuk beberapa jenis imunisasi di bulan Maret-April 2020, dibandingkan periode yang sama di tahun 2019⁴⁶. Sementara walaupun tidak secara spesifik menyebutkan kelompok usia, laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mencatat 3,000 kasus kekerasan terhadap anak⁴⁷. Turunnya cakupan layanan dapat memperburuk kondisi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak secara holistik, terutama anak-anak dari keluarga termiskin atau anak-anak dengan kebutuhan khusus. Di satu sisi, anggaran pemerintah telah mengalami refocusing atau keterlambatan pencairan dana, sehingga menyulitkan untuk memberikan asistensi langsung kepada penerima manfaat.

Dalam kondisi yang sama-sama sulit, anggota Gugus Tugas PAUD HI penting untuk berkolaborasi dan berinovasi untuk memanfaatkan kader, bidan desa, tenaga pendidik, dan penyuluh untuk secara bersama-sama memanfaatkan keberadaan di lokasi yang sulit, juga jejaring untuk menjangkau, memantau, dan bila memungkinkan, memberikan layanan holistik kepada anak-anak, terutama yang berusia muda dan dari kelompok yang sangat sulit dijangkau.

Kerentanan Berbasis Sosio-Ekonomi

KELUARGA PESERTA DIDIK

Berdasarkan estimasi proyeksi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan mengalami penurunan, menjadi 4.5% untuk skenario terbaik dan -3.5% untuk skenario terburuk. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini akan memunculkan 1.3 juta, dalam kondisi terbaik, sampai dengan, dalam kondisi terburuk, 19.7 juta orang miskin baru⁴⁸. Belajar dari krisis ekonomi Asia, masalah kemiskinan di Indonesia tidak hanya terkait dengan hilangnya pendapatan dan menurunnya konsumsi, tetapi juga dapat berimplikasi pada kemampuan mereka dalam mengakses layanan dasar (kesehatan, pendidikan, perlindungan) yang berkualitas. Dalam konteks pandemi COVID-19, dimana pendapatan keluarga berkurang dengan sangat signifikan, banyak orang tua yang terpaksa tetap harus bekerja untuk waktu yang lebih lama dan terpapar pada resiko infeksi COVID-19. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rohiyati (bukan nama sebenarnya), bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang semakin berkurang, orang tua anak-anak sering tidak bisa berada di rumah dan meninggalkan anak-anak di rumah tanpa pengawasan. Di satu sisi, pembatasan fisik juga meningkatkan tekanan di ranah domestik, di mana orang tua, terutama perempuan, merasa kewalahan untuk melakukan pengasuhan yang dibarengi dengan kewajiban untuk bekerja dari rumah dan kegiatan-kegiatan rumah lainnya [lihat kembali **Grafik 10**]⁴⁹.

46 WHO, COVID-19 Situation Report 13, World Health Organization (Jakarta, Indonesia, 2020), XIII.

47 Tirto.id, 'Kemen PPPA Catat 3.000 Kasus Kekerasan Anak Selama Pandemi COVID-19', 2020 <<https://tirto.id/kemen-pppa-catat-3000-kasus-kekerasan-anak-selama-pandemi-covid-19-fk3j>> [accessed 4 August 2020].

48 Asep Suryahadi, Ridho Al Izzati, and Daniel Suryadarma, 'Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56.2 (2020), 175–92 <<https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>>.

49 UNDP Indonesia, 'Economic and Human Development Inequalities Widen During -COVID-19 Pandemic', 2020 <<https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2020/Economic-and-Human-Development.html>> [accessed 4 August 2020].

Selain itu, Pandemi COVID-19 memperdalam dan memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin atau kelompok-kelompok rentan lainnya, tidak hanya dari ekonomi tetapi dalam mengakses fasilitas⁵⁰. Sebagai contoh, pembelajaran daring hanya dilakukan secara terbatas, yaitu hanya 26% menurut hasil survei daring [lihat kembali **Grafik 7**]. Keberhasilan pembelajaran daring, tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas atau infrastruktur, tetapi juga pada keterbiasaan dan keterampilan penggunaan perangkat keras dan lunak, serta kapasitas untuk mengelola informasi yang didapatkan. Literatur mengenai internet dan dunia maya di Indonesia menyebutkan bahwa kemampuan ini didominasi oleh anak-anak muda berpendidikan dan dari kelompok ekonomi menengah ke atas⁵¹. Anak-anak dari keluarga miskin atau dalam pengasuhan lansia atau berasal dari wilayah tanpa fasilitas tentu akan lebih sulit untuk beradaptasi dengan pembelajaran daring yang sebelumnya sangat jauh dari dunia mereka.

Untuk kondisi di mana infrastruktur, fasilitas, dan keterampilan pembelajaran daring rendah dikarenakan keadaan sosio-ekonomi, pendidik PAUD merasa perlu untuk tetap aktif menjangkau anak-anak. Pedoman pelaksanaan PJJ yang telah dikeluarkan oleh KEMDIKBUD telah mengadopsi pendekatan luring, tetapi masih sangat terbatas pada pemberian tugas atau pun peragaan yang belum spesifik menjawab kebutuhan stimulasi anak usia dini yang kompleks⁵². Dengan demikian, perlu dikembangkan metode luring yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan protokol kesehatan yang ketat, dilakukan secara teratur, sehingga anak-anak dari kelompok ini tetap mendapatkan layanan yang layak. Proses penerapan pembelajaran luring ini perlu mendapatkan asistensi dan pelatihan yang cukup dari pemerintah kabupaten dan dukungan modul atau pun referensi di tingkat pemerintah pusat.

TENAGA PENDIDIK

Kerentanan sosio-ekonomi yang kedua adalah kerentanan tenaga pendidik. Sebelum pandemi COVID-19, pendidik PAUD telah mengalami kerentanan dari sudut penghasilan. Pendapatan mereka sebesar Rp. 465,799 sangat tidak sepadan dengan jerih payah dan tanggung jawab mereka sebagai pendidik. Sebelum pandemi COVID-19 terjadi, pendidik PAUD telah bekerja selama 6 hari per minggu [lihat **Perubahan Moda pembelajaran.**]. Sedangkan selama pandemi COVID-19, walaupun terjadi pengurangan tatap muka, berdasarkan ujaran-ujaran beberapa guru di ketiga kabupaten yang melakukan kunjungan rumah, dapat diasumsikan bahwa banyak di antara mereka yang justru harus mengalokasikan waktu lebih banyak. Berdasarkan median pendapatan, nominal yang mereka dapatkan juga masih jauh di bawah standar upah minimum regional (UMR) 1.8 juta untuk Kabupaten Pematang Jaya dan Kabupaten Brebes, dan 2.2 juta untuk Kabupaten Sumbawa. Kecilnya pendapatan yang diterima oleh tenaga pendidik juga membuat kontribusi mereka tidak signifikan bagi keuangan keluarga, terutama di saat pandemi COVID-19

50 UNDP, 'Coronavirus vs. Inequality How We'll Pay Vastly Different Costs for the COVID-19 Pandemic', 2020 <<https://feature.undp.org/coronavirus-vs-inequality/>> [accessed 4 August 2020].

51 Merlyna Lim, 'Dis/Connection: The Co-Evolution of Sociocultural and Material Infrastructures of the Internet in Indonesia', *Indonesia*, 105.1 (2018), 155–72 <<https://doi.org/10.1353/ind.2018.0006>>; Lia Puspitasari and Kenichi Ishii, 'Digital Divides and Mobile Internet in Indonesia: Impact of Smartphones', *Telematics and Informatics*, 33.2 (2016), 472–83 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.11.001>>.

52 Vina Adriany and Jo Warin, 'Preschool Teachers' Approaches to Care and Gender Differences within a Child-Centred Pedagogy: Findings from an Indonesian Kindergarten', *International Journal of Early Years Education*, 22.3 (2014), 315–28 <<https://doi.org/10.1080/09669760.2014.951601>>.

berlangsung dimana penghasilan keluarga pendidik pun berkurang drastis [untuk pendidik lihat kembali "**Pendapatan Tenaga Pendidik**".].

Upaya pemerintah yang memberikan kelonggaran penggunaan BOP PAUD yang memperbolehkan penggunaan BOP untuk honorarium pendidik (PERMENDIKBUD 20/2020, Pasal 9A b.1) merupakan angin segar bagi kondisi keuangan tenaga pendidik; namun, seperti yang telah disampaikan, pencairan BOP PAUD di beberapa kabupaten pun masih terkendala [lihat kembali bagian "**Pemanfaatan Pelonggaran Penggunaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP)**"]; begitu juga dengan Dana Desa yang mengalami pengurangan atau pun keterlambatan pencairan [lihat "**Dana Desa dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Semasa Pandemi COVID-19**"]. Sebagian besar pendidik harus mencari pekerjaan lain atau sampingan, menjual aset, atau berhutang kepada orang lain. Tekanan ekonomi tentunya mempengaruhi fokus guru pada pemberian pembelajaran. Tekanan ini semakin bertambah dengan kebutuhan guru-guru akan gawai dan paket data seluler yang menjembatani komunikasi dan juga dalam melakukan kunjungan rumah selama pandemi.

Secara sosio-kultural, peran pendidik PAUD, terutama PAUD non-formal, masih dianggap pekerjaan yang berlandaskan kesukarelawanan dan keterpanggilan perempuan sebagai ibu atau istri⁵³ yang sarat dengan nilai-nilai pengasuhan feminin yang secara sempit hanya mengacu pada idealisme mengenai ibu rumah tangga⁵⁴. Keterlibatan perempuan di PAUD hanya dianggap sebatas sumbangsih informal perempuan di masyarakat, dan sangat jarang diasosiasikan dengan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dari sektor formal atau pun pendapatan yang layak apalagi sebagai sebuah karir yang profesional. Persepsi pendidik PAUD yang belum menekankan pada pentingnya kompetensi dan profesionalitas ini kemudian memiliki implikasi pada pembayaran yang belum sepadan⁵⁵. Konsepsi sosial budaya yang demikian sangat memberatkan terutama bagi pendidik PAUD yang harus menjadi tulang punggung keluarga atau menjadi orang tua tunggal dengan tanggungan keluarga⁵⁶.

Dalam kondisi pandemi COVID-19, pendidik PAUD harus menghadapi kesulitan berganda dalam mengakses dana bantuan kedaruratan. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) adanya kecenderungan pengabaian perempuan pencari nafkah dalam program bantuan kedaruratan dan (2) skema bantuan kedaruratan yang secara struktur masih sering mengecualikan profesi pendidik. Kesulitan pendidik PAUD dalam mengakses bantuan penanggulangan dampak COVID-19 merupakan sebuah kerentanan yang multidimensi. Secara lebih lanjut, pengabaian pendidik PAUD akan dibahas lebih jauh di "**Kerentanan Berbasis Sistem: PAUD dan Kebijakan Selama Situasi Krisis Wabah**" dan juga di bagian "**Kerentanan Berbasis Gender: Tak Kasat Mata?**"

53 Pangastuti.

54 Janice C Newberry, *Durable Assemblage: Early Childhood Education in Indonesia*, Working Paper Series (Singapore, 2012) <http://www.ari.nus.edu.sg/docs/wps/wps12_194.pdf> [accessed 8 August 2014].

55 Persepsi demikian tertangkap oleh Jan van Ravens, *Holistic ECD for All in Indonesia: Supporting Communities to Close the Gap* (Jakarta, Indonesia, 2010).

56 SMERU, *Menguak Keberadaan Dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga*, 2014.

Kerentanan Berbasis Akses Informasi dan Pemberdayaan dalam Pencegahan COVID-19

Dengan berbagai tantangan dan sulitnya mengadakan PJJ untuk anak usia dini, banyak lembaga PAUD melakukan model kunjungan rumah untuk fungsi penjangkauan dengan berbekal persepsi keamanan atau pun kekhawatiran tentang penyebaran infeksi COVID-19 yang belum tentu berbasis fakta yang mutakhir. Keadaan di mana pendidik melakukan kunjungan dan berinteraksi dengan anak-anak dan orang tua juga merupakan sebuah kerentanan, karena dengan adanya interaksi fisik, pendidik berpotensi untuk terpapar atau menularkan virus COVID-19 tanpa disadari. Di mana kondisi mengharuskan pendidik untuk melakukan kunjungan rumah atau interaksi-interaksi fisik lain, maka pendidik PAUD perlu membekali diri mereka dengan perkembangan mutakhir kondisi daerah-daerah di mana siswa tinggal terkait dengan zonasi COVID-19. Selain bantuan masker, disinfektan, dan perlengkapan CTPS, tenaga pendidik PAUD juga perlu dibekali informasi mengenai protokol kesehatan dan manajemen resiko.

Secara lebih luas, pandemi COVID-19 memberi peringatan mengenai kerentanan dan ketidaksiapan PAUD dalam menghadapi penyakit menular secara umum. Sebagai contoh, selama pandemi COVID-19, berjangkit juga penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang sebagian besar di derita oleh anak-anak dan remaja. Diperkirakan 11.63% dari penderita DBD adalah anak-anak berusia 0-5 tahun dengan Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur sebagai kontributor angka kesakitan terbesar untuk DBD. Angka ini belum ditambah dengan penyakit diare atau pun pneumonia yang sering merenggut jiwa anak-anak usia dini. Belajar dari kerentanan ini, maka pendidik PAUD perlu dilibatkan dalam kerangka pencegahan, melalui bimbingan teknis dan materi yang cukup, tidak hanya sekedar pemberian infografis. Pemberdayaan pendidik PAUD terkait dengan penyakit menular dapat dilakukan bersama-sama dengan frontliners program masyarakat lainnya, seperti bidan desa, kader posyandu, kader Bina Keluarga Balita (BKB) sehingga selaras dengan aspirasi mereka mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Kerentanan Berbasis Sistem dan Kepekaan Kebijakan

KETIDAKSETARAAN DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK PAUD

Seperti telah disebutkan di bagian pendahuluan, salah satu penyebab kerentanan pendidik PAUD yang bersifat sistemik adalah masih terhambatnya pengakuan legalitas profesi pengajar PAUD. Di Indonesia, ketidaksetaraan ini masih terjadi dengan adanya dikotomi PAUD Formal (TK) dan PAUD Non-Formal (KB, SPS dan TPA) pada Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional, No. 20/2003 yang berdampak pada pengakuan status "guru" pada Pasal 1, Undang Undang Guru dan Dosen, No. 14/2005 yang dibatasi pada pendidik PAUD formal (TK) saja. Sumir-nya status legal profesi pendidik PAUD non-formal sangat mempengaruhi hak guru, sesuai dengan yang digariskan oleh Pasal 14 (1) Undang Undang Guru dan Dosen yang menjadi sangat kritis di saat pandemi COVID-19. Hak-hak tersebut termasuk perlindungan penghasilan dan sistem renumerasi, kesempatan mengikuti peningkatan kompetensi termasuk program sertifikasi dan

program-program inovasi untuk "guru", serta jaminan rasa aman dalam melaksanakan tugas. Walaupun pelaksanaan pemenuhan hak-hak ini masih sangat sulit, seperti yang diperlihatkan dengan masih rendahnya pendapatan pendidik [lihat "**Pendapatan Tenaga Pendidik**"], kesetaraan tenaga pendidik PAUD dapat memicu ketahanan yang lebih baik di sektor PAUD dan memperkecil jurang perbedaan kesempatan peningkatan kapasitas pendidik formal dan non-formal dan akses terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan di saat sulit seperti pada masa pandemi COVID-19. Dalam krisis wabah seperti saat ini, peran sentral pendidik PAUD sangat dirasakan. Salah satu rekomendasi the *National Association for the Education of Young Children* (NAEYC) untuk krisis pengasuhan selama pandemi COVID-19 adalah penyepadanan pendapatan pendidik PAUD dengan jerih payah mereka, terutama selama pandemi COVID-19 berlangsung⁵⁷.

KEPEKAAN PEMERINTAH DAERAH DAN DUKUNGAN KABUPATEN

Berdasarkan beberapa tanggapan di tingkat kabupaten dan desa, pentingnya PAUD bagi pertumbuhan anak belum mendapatkan perhatian dan intervensi yang memadai, terutama sebagai bagian dari kebijakan tanggap darurat COVID-19, baik di tingkat kabupaten atau pun di tingkat nasional. Sebagian besar pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan bahkan desa yang tidak menyadari kerentanan PAUD sampai dilakukannya kegiatan fasilitasi. Di kalangan masyarakat, tidak beroperasinya PAUD lebih dianggap sebagai sebuah kewajaran atau sekedar "dampak" pendidikan, dan bukan sebuah hilangnya kesempatan stimulasi yang perlu dikaji, difasilitasi dan ditindaklanjuti. PAUD masih belum dianggap sebagai prioritas dibandingkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan kondisi ini adalah masih didiidentikkannya PAUD dengan ranah perempuan dan kasih sayang yang tidak memerlukan keterampilan pedagogi dibandingkan jenjang yang lebih tinggi. Diperlukan advokasi mengenai dampak COVID-19 pada PAUD secara terus-menerus, terutama di forum-forum tanggap bencana.

Komitmen pemerintah daerah untuk PAUD di saat normal merupakan faktor penting yang membantu ketahanan PAUD dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dokumen perencanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan penganggaran yang dihasilkan setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati memberikan struktur bagi pemangku kebijakan dan amunisi bagi lembaga PAUD, dari sudut keuangan, program, dan juga kepekaan mengenai problematika PAUD atau pun PAUD HI. Sebagai contoh, alokasi anggaran APBD Kabupaten untuk kesejahteraan tenaga pendidik PAUD (dikenal dengan APBD Kesra) sebesar Rp. 200,000 per bulan dapat membantu pendidik PAUD bertahan di saat pandemi COVID-19. Sementara itu, di Sumbawa, surat edaran bupati mengenai batas minimum insentif tenaga PAUD sebesar Rp. 350,000 per guru melalui pendanaan desa⁵⁸ dan pemahaman mengenai pentingnya PAUD dan kerentanan PAUD di kondisi pandemi COVID-19 telah menghindarkan dana untuk pendidik PAUD dari pemotongan dana (*refocusing*).

57 Rhian Evans Allvin and Lauren Hogan, 'There's No Going Back : Child Care after COVID 19', NAEYC, 2020 <<https://www.naeyc.org/resources/blog/theres-no-going-back-child-care-after-covid-19>> [accessed 5 August 2020].

58 Bupati Sumbawa, Surat Edaran BUPATI SUMBAWA NO 421.9/177/DIKBUD/2019 (Sumbawa Besar, Indonesia, 2019).

PEMANFAATAN BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD DAN DANA DESA

Seperti yang telah disampaikan di bagian [Grafik 14], penghasilan lembaga PAUD masih relatif kecil. Pemasukan yang kecil bagi lembaga PAUD ini kemudian juga berkontribusi pada rendahnya penghasilan tenaga PAUD. Keberadaan BOP PAUD dan Dana Desa sangat membantu keberlangsungan lembaga PAUD terutama di wilayah dengan angka kemiskinan yang tinggi, walaupun jumlahnya masih jauh di bawah kelayakan pendapatan. Di kondisi normal, penggunaan BOP PAUD lebih diorientasikan untuk menekan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua dan belum ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan lembaga atau pun tenaga pendidik PAUD. Dalam kondisi normal, alokasi untuk guru di tahun 2000 hanya dapat dilakukan dalam konteks peningkatan kapasitas dengan maksimal 35% dari total BOP PAUD, atau sebesar-besarnya hanya Rp. 210,000 per pencairan BOP PAUD. Laporan pembiayaan KOMPAK untuk kondisi normal mennggarisbawahi belum cukupnya suntikan BOP PAUD untuk mencukupi kebutuhan mendasar operasional PAUD, terutama disebabkan oleh ketentuan prosentase⁵⁹.

Walaupun masih sangat jauh dari cukup, BOP PAUD telah menjadi sumber dana tetap bagi banyak PAUD di Indonesia dan pengeluaran rutin bagi KEMDIKBUD. Dukungan BOP PAUD menjadi sangat penting dan strategis dalam meminimalisir dampak pandemi COVID-19 pada lembaga PAUD. Dengan dikeluarkannya ketentuan pelonggaran penggunaan BOP PAUD melalui PERMENDIKBUD 20/2000, lembaga PAUD sangat terbantu dalam mengatasi pos-pos pembiayaan yang memerlukan penyesuaian selama masa pandemi. Dengan diberlakukannya PERMENDIKBUD 20/2020, honorarium pendidik diperbolehkan untuk dibayar dengan BOP PAUD dan pembatasan ketentuan ini dihapuskan⁶⁰. Sebagian besar lembaga PAUD telah mengetahui dan juga menggunakan manfaat dari pelonggaran BOP [lihat kembali, walaupun masih terdapat juga lembaga PAUD yang belum mendapatkan manfaatnya secara tepat waktu dan signifikan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh KEMDIKBUD, terdapat 4 (empat) faktor yang menentukan efektivitas BOP PAUD, yaitu pengetahuan dan pemahaman, sosialisasi, persyaratan dan pemanfaatan yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga⁶¹. Dalam kondisi pandemi COVID-19, sosialisasi mengenai pelonggaran PAUD menjadi keutamaan yang sangat penting. Sayangnya, masih ditemukan beberapa multi-tafsir dari penggunaan BOP. Selain itu, mekanisme pencairan yang masih mengandalkan proses dan termin seperti di situasi normal belum mencerminkan kedaruratan kebutuhan di lapangan. Walaupun BOP PAUD sudah mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan kritis lembaga PAUD seperti insentif honor, pembelian paket data seluler, dan juga kebutuhan akan masker, disinfektan dan sabun cuci tangan, masih terdapat ganjalan di mana sekolah masih harus menanggung beban pembelian gawai atau

59 KOMPAK, Laporan Kajian Costing Dan Pemanfaatan Dana BOP PAUD (Jakarta, Indonesia, 2019).

60 Secara spesifik, ketentuan pembayaran honorarium dimungkinkan oleh Pasal 9A(1b) sedangkan pembatasan berdasarkan prosentase dicabut dengan diberlakukannya kondisi kedaruratan COVID 19 melalui Pasal 9A (3). Lihat Kemdikbud, 'Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dna Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan'.

61 KEMDIKBUD, Analisis Efektivitas Program BOP PAUD Pada Satuan Pendidikan Tahun 2018 (Jakarta, Indonesia: KEMDIKBUD, 2018).

komputer untuk bisa melakukan pembelajaran daring. Perbedaan tata kelola dan besaran nominal antara BOP KEMDIKBUD dan BOP Kemenag juga memicu kesenjangan di antara PAUD di bawah pengelolaan KEMDIKBUD (TK, KB, SPS, TPA) dan PAUD agama di bawah pengelolaan Kementerian Agama yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan PAUD KEMDIKBUD.

Untuk kontribusi Dana Desa, walaupun honorarium untuk tenaga PAUD dipertahankan di Peraturan KDPDTT No. 6/2020, prosentase pengalokasian honorarium pendidik PAUD dalam belanja PAUD tertinggi hanya 51%, yaitu di Kabupaten Pemalang, 8% di Kabupaten Brebes dan 0% di Kabupaten Sumbawa⁶². Pun, seperti yang disampaikan sebelumnya, dalam penerapannya masih terjadi diskriminasi yang disebabkan tafsiran yang menganggap peruntukkan Dana Desa hanya dapat diakses oleh PAUD milik desa yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Pemerintah Desa. Selain itu berdasarkan hasil diskusi, belanja PAUD masih belum tersistematisasi menurut besaran nominal dan penggunaan maupun dialokasikan merata di seluruh desa. Di masa pandemi COVID-19, prioritas penyaluran BLT - Dana Desa kepada masyarakat terdampak COVID-19, banyak menunda pencairan Dana Desa untuk membayar honorarium pendidik PAUD, seperti yang dialami pendidik PAUD dari Kabupaten Brebes dan Kabupaten Sumbawa. Perlu diingat, akses Dana Desa saat ini masih terbatas di wilayah-wilayah dengan status "desa." Pendidik PAUD di wilayah dengan status "kelurahan" belum mendapatkan fasilitas yang sama. Dari daerah kajian, Kabupaten Brebes memiliki 5 kelurahan, Kabupaten Pemalang terdapat 11 kelurahan, dan Kabupaten Sumbawa mempunyai 8 kelurahan.

PENDIDIK PAUD DAN AKSES JARING PENGAMAN SOSIAL DAMPAK COVID-19

Seperti yang telah disampaikan di bagian 3, penghasilan PAUD masih relatif kecil. Pemasukan yang kecil bagi lembaga PAUD kemudian berkontribusi pada rendahnya penghasilan tenaga PAUD. Bila pandemi COVID-19 berlangsung lebih lama, dukungan jaring pengaman sosial menjadi kebutuhan kritis pendidik PAUD, terutama bagi mereka yang menjadi pencari nafkah utama. Dengan kesadaran akan kerentanan pekerja PAUD, Kabupaten Pemalang, melalui Bappeda telah menetapkan pendidik PAUD bersama-sama dengan guru honorer sebagai salah satu kandidat penerima manfaat bantuan kabupaten untuk penanggulangan dampak COVID-19. Namun sayangnya, kebijakan ini belum dilengkapi verifikasi pendataan, sehingga belum dapat dilihat berapa jumlah pendidik PAUD yang mendapatkan bantuan kabupaten.

Berdasarkan kondisi umum, pendidik PAUD masih kesulitan dalam mengakses jaring pengaman sosial. BLT - Dana Desa menjadi sebuah contoh yang dibahas selama kajian ini. Berdasarkan pengamatan dan literatur, kesulitan pendidik PAUD dalam mengakses BLT - Dana Desa dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu (1) persepsi yang masih mengabaikan peran ekonomi perempuan bagi keluarga; dan (2) guru sebagai profesi yang belum diprioritaskan sebagai penerima manfaat BLT - Dana Desa.

62 Data APBDesa di Kabupaten Pemalang, Brebes, dan Sumbawa, KOMPAK, 2020.

Di Indonesia, persepsi sosial masih menempatkan perempuan yang bekerja sebagai pencari nafkah tambahan (*second earner*) sedangkan laki-laki sebagai penafkah utama (*breadwinner*)⁶³. Sedangkan, SMERU di tahun 2014 memperkirakan bahwa ekonomi dari separuh keluarga berkesejahteraan rendah ditopang oleh perempuan⁶⁴. Sebagai respon mitigasi pencegahan dampak pandemi COVID-19 pada keluarga miskin, KDPDTT secara nasional mengikutsertakan sebanyak 2,426,707 Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BLT - Dana Desa⁶⁵. Namun, dalam praktiknya, perempuan sebagai kepala keluarga masih kesulitan mengakses dana bantuan pandemi COVID-19⁶⁶. Hal ini pun tercermin dari proses fasilitasi yang dilakukan untuk PAUD. Dari diskusi yang dilakukan selama lokakarya, penafsiran mengenai ketentuan penerima BLT Dana Desa, yang tertuang dalam Pasal 8A, PERMENDES No. 6/2020, yaitu orang miskin yang kehilangan pekerjaan masih cenderung diprioritaskan secara sempit untuk diterima oleh laki-laki, karena asosiasi kepala keluarga dan pemberi nafkah utama. Gambaran mengenai kesadaran tentang perempuan sebagai penanggung hidup keluarga sebagai penerima manfaat BLT - Dana Desa tidak muncul dalam diskusi di tiga kabupaten terkait dengan pendidik PAUD.

Selain sulit mengakses bantuan dikarenakan faktor feminisasi pekerja PAUD belum [perlu] dihargai secara profesional, sebagai tenaga pendidik, guru PAUD juga seringkali tidak diprioritaskan sebagai penerima manfaat BLT - Dana Desa. Sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020, mayoritas keluarga penerima manfaat (KPM) BLTDD adalah petani, yaitu sejumlah 6.9 juta KPM, lalu diikuti oleh nelayan dan buruh nelayan, sebanyak 315.028 KPM, dan buruh pabrik sebanyak 156.310 KPM. Sementara, profesi guru penerima BLT - Dana Desa hanya 62.090 KPM - tidak dipilah berdasarkan status sertifikasi atau pun guru tetap atau honorer, atau pun jenjang⁶⁷. Rendahnya KPM dari profesi guru diperkirakan karena adanya asumsi pemenuhan kebutuhan guru sudah dijawab oleh skema jaring pengaman lain⁶⁸ seperti pelonggaran BOS dan BOP PAUD atau pun melalui mekanism Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Seperti yang dituturkan oleh salah satu kepala desa di Kabupaten Brebes di Bagian 3, salah satu kesulitan yang muncul dalam menetapkan KPM untuk berbagai program jaring pengaman sosial adalah sinkronisasi kota dan verifikasi data antara pusat, provinsi, kabupaten dan desa (hingga RT/RW) yang sering berbeda antara di awal pendataan dan realisasi di akhir.

Terjadinya pengurangan kuota KPM membuat pemerintah desa menggunakan pendekatan klasik, yaitu pendekatan keluarga dan pekerjaan formal kepala keluarga sebagai indikator kerentanan karena kehilangan penghasilan.

63 Saskia Eleonora Wieringa, Evelyn Blackwood, and Abha Bhaiya, *Women's Sexualities and Masculinities in a Globalizing Asia*, ed. by Saskia E. Wieringa, Evelyn Blackwood, and Abha Bhaiya (New York: Palgrave Macmillan US, 2007) <<https://doi.org/10.1057/9780230604124>>; Hanna Papanek and Laurel Schwede, 'Women Are Good with Money: Earning and Managing in an Indonesian City', *Economic and Political Weekly*, 23.44 (1988), WS73–84.

64 SMERU.

65 KDPDTT, 'BLT Dana Desa Selamatkan Jutaan PEKKA Dari Dampak Ekonomi Akibat COVID 19', 2020 <<https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3353/blt-dana-desa-selamatkan-jutaan-pekka-dari-dampak-ekonomi-akibat-covid-19>> [accessed 4 August 2020].

66 Lihat Sania Meiliana, 'Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos', *Kompas.Com*, 2020 <<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/20272151/kepala-keluarga-perempuan-kesulitan-ekonomi-kemensos-minta-pemda-perbaiki>> [accessed 4 August 2020].

67 Kumparan, 'BLT Dana Desa Diperpanjang Sampai Desember 2020' (Jakarta, Indonesia, 4 August 2020) <<https://kumparan.com/kumparanbisnis/blt-dana-desa-diperpanjang-sampai-desember-2020-1tw7aOWiDd/full>> [accessed 5 August 2020].

68 Gatra.com, 'Guru Hanya Dapat 1% Dari BLT-DD? Ini Jawaban Wamendes' (Jakarta, Indonesia, 24 June 2020).

Kerentanan Berbasis Gender: Tak Kasat Mata?

Kerentanan berbasis gender bersifat *cross-cutting* (bersilangan) dengan banyak dimensi kerentanan yang telah disebutkan sebelumnya. Secara umum, dikarenakan pendapatan yang masih sangat rendah, posisi pendidik PAUD di Indonesia dapat dikategorikan sebagai bagian dari unpaid care workers yang menjadi target sasaran kesetaraan gender dari skema Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB, atau *Sustainable Development Goals - SDG*)⁶⁹. Sayangnya, isu bias gender dalam konteks pendidik PAUD di Indonesia tidak pernah dikedepankan di tingkat kebijakan, sehingga belum ada kebijakan yang mengakomodasi secara utuh. Kebalikannya, PAUD masih lebih sering dikampanyekan dengan cara memobilisasi perempuan dan sentralitas pengasuhan feminin, dibandingkan sebagai sebuah profesi pendidik yang netral. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari feminisasi PAUD di Indonesia⁷⁰. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, faktor sosio-kultural yang mengidentikan PAUD sebagai perpanjangan peran domestik, yaitu sebagai perpanjangan peran ibu di rumah, dan bukan profesi yang profesional membuat kerentanan PAUD lebih sulit diidentifikasi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tebalnya feminisasi PAUD ini membuat perempuan pendidik PAUD rela mengajar hanya dengan prinsip kesukarelawanan; kesejahteraan pendidik menjadi isu sekunder bila dibandingkan dengan prioritas anak, di satu sisi permintaan standarisasi pengajaran menuntut layanan yang semakin kompleks. Minimnya penghasilan pendidik perempuan PAUD membuat mereka tidak dapat berkontribusi pada penghasilan keluarga, terutama pada saat pandemi, di mana pendapatan keluarga berkurang secara drastis. Dalam kondisi pandemi COVID-19, dibandingkan dengan nasib guru-guru pendidikan dasar atau pendidikan menengah, perempuan pekerja PAUD lebih ditempatkan sebagai pekerja informal yang dengan mudah dialihkan untuk bekerja di sektor lain secara serabutan. Di sisi lain, upaya penerapan kompetensi dan profesionalisasi guru PAUD pun masih terbatas pada muatan administratif⁷¹ dan belum didasari pada realita kompleksitas metode belajar yang menggabungkan pengasuhan (caring), pedagogi, psikologi, interaksi fisik-kinetik, audio dan visual⁷².

69 ILO, *Care Work and Care Jobs: For the Future of Decent Work* (Geneva, 2018) <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf> [accessed 15 March 2019].

70 Janice C Newberry, 'Payment in Heaven : Can Early Childhood Education Policies Help Women Too ?', 2018 <<https://doi.org/10.1177/1478210317739467>>.

71 Lihat Hani Yulindrasari and Putu Rahayu Ujianti, "'Trapped in the Reform": Kindergarten Teachers' Experiences of Teacher Professionalisation in Buleleng, Indonesia', *Policy Futures in Education*, 16.1 (2018), 66–79 <<https://doi.org/10.1177/1478210317736206>>.

72 Jo Ailwood, 'Mothers, Teachers, Maternalism and Early Childhood Education and Care: Some Historical Connections', *Contemporary Issues in Early Childhood*, 8.2 (2007), 157–65 <<https://doi.org/10.2304/ciec.2007.8.2.157>>.

Penutup Bagian 3

Bagian ini telah mengidentifikasi 7 dimensi kerentanan berganda PAUD. Dimensi-dimensi ini memiliki beberapa persamaan, yaitu hampir seluruh kerentanan PAUD di masa pandemi COVID-19 berasal dari kesenjangan-kesenjangan sosial-ekonomi yang sebelumnya telah mewarnai keseharian pelaksanaan PAUD, baik dari sisi pendidik atau pun dari peserta didik, seperti ketimpangan ekonomi, pemerataan akses infrastruktur, norma sosial, atau pun kebijakan-kebijakan yang belum dapat merespon kebutuhan PAUD secara utuh dan menyeluruh. Pemahaman mengenai dimensi berganda menjadi hal yang penting untuk dipahami, terutama oleh pemangku kebijakan dalam merespon kompleksitas dampak COVID-19, untuk memaknai PAUD lebih luas dan kebutuhan atas kerjasama antar sektor, baik yang bersifat segera (karena karakter kedaruratan), dan juga yang berjangka pendek atau pun menengah dan panjang. Studi ini menghasilkan rekomendasi yang dipaparkan di Bagian 4.



BAGIAN 4

**REKOMENDASI:
MENATAP MASA
DEPAN MELALUI
PENINGKATAN
KETAHANAN PAUD**

Dengan kondisi saat ini, apakah PAUD di Indonesia masih dapat menatap masa depan? pandemi COVID-19 telah menghantam sektor PAUD Indonesia dan menimbulkan tantangan kerentanan PAUD. Sebagai bagian terakhir dari laporan, tim fasilitasi berupaya mengidentifikasi dan menawarkan penguatan tujuan dan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat ketahanan PAUD di Indonesia selama masa pandemi COVID-19.

Perlu diingat bahwa keberadaan dan kondisi PAUD saat ini tidak bisa dilepaskan dari cita-cita untuk membangun generasi yang lebih sehat, cerdas, sejahtera dan terlindungi. Kampanye perluasan akses PAUD yang digencarkan di Indonesia sejak akhir tahun 1990-an mendasarkan pada keyakinan mengenai pentingnya kehadiran PAUD untuk membantu perkembangan anak-anak usia 0-6 tahun demi generasi Indonesia yang sehat, cerdas dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Pandemi COVID-19 telah menjadi sebuah disrupsi pada pemenuhan layanan pendidikan dan juga layanan-layanan dasar esensial lain. Kesulitan pemenuhan ini, tidak terlepas dari kesulitan yang dihadapi oleh lembaga PAUD beserta tenaga pendidik PAUD. Pandemi COVID-19 juga memberikan pembelajaran yang sangat mahal bagi pelaksanaan program PAUD di Indonesia, yaitu peringatan mengenai diperlukannya penguatan dan penyempurnaan kebijakan-kebijakan spesifik dan pengembangan kebijakan yang inklusif dan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan PAUD dalam kondisi yang sangat sulit dengan adanya pandemi COVID-19.

Studi ini telah merangkum dampak pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran, tata kelola dan personalia PAUD berdasarkan informasi dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Pematang Jaya dan Kabupaten Sumbawa, dipaparkan di Bagian 3. Temuan-temuan di Bagian 3 juga ditelaah secara induksi untuk melahirkan identifikasi kerentanan berganda, seperti yang telah disampaikan di Bagian 4. Pada bagian ini, tim fasilitasi berupaya untuk menghasilkan rekomendasi yang bersifat besar ide, yang memberi visi bagi pengembangan kebijakan PAUD dan juga teknis yang menyoroti kebijakan-kebijakan yang bersifat segera, atau pun jangka pendek atau pun panjang. Pada tataran prioritas tujuan, mengembalikan eksistensi PAUD di tengah krisis COVID-19, penajaman gugus tugas PAUD Holistik Integratif dan pengembangan monitoring kerentanan PAUD menjadi tiga rekomendasi yang ditawarkan; sedangkan pada level teknis kebijakan, penyempurnaan BOP PAUD di masa pandemi, penguatan kecamatan, penyempurnaan mekanisme dukungan pembiayaan PAUD oleh desa, hingga pengembangan kebijakan yang mendorong kesetaraan kesempatan bagi lembaga dan pendidik PAUD.

MENGEMBALIKAN EKSISTENSI PAUD DI MASYARAKAT

Tidak seperti jenjang pendidikan lain, PAUD merupakan mata rantai utama untuk pendidikan tahun formatif yang sangat berpengaruh dalam menumbuhkan budaya sekolah (*schooling culture*). Kontribusi PAUD tidak terbatas pada pendidikan, PAUD juga berkontribusi besar pada pembangunan ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Namun, dengan semakin panjangnya periode krisis pandemi, ketahanan PAUD akan semakin turun. Contoh yang paling nyata adalah dari menurunnya jumlah peserta didik PAUD. Di awal tahun ajaran 2020-2021, telah muncul indikasi penurunan jumlah anak yang mendaftar di PAUD⁷³. Turunnya jumlah siswa berpotensi menghapuskan kesempatan anak-anak akan sentuhan pembelajaran PAUD,

peningkatan status gizi, imunisasi, kesakitan dan juga perlindungan dari kekerasan. Selain itu dengan turunnya jumlah anak yang mendaftar di PAUD, maka makin semakin kecil dana volume BOP PAUD yang diperoleh sebuah lembaga PAUD. Tanpa adanya dukungan BOP PAUD, banyak sekolah-sekolah dengan karakteristik tertentu yang semakin sulit bertahan. Penurunan intake siswa PAUD juga berpotensi menjadi raport merah bagi pemerintah kabupaten dalam memenuhi Standard Pelayanan Minimum Kabupaten, pencapaian target RPJMN 2021-2024, pencapaian komitmen global yang tercantum dalam TPB⁷⁴.

Upaya kebijakan pemerintah, baik pusat atau pun daerah, harus difokuskan pada penyusunan strategi kampanye dan peningkatan ketahanan PAUD, dan, bila dibutuhkan, penyesuaian struktur dan muatan pembelajaran, untuk mengembalikan eksistensi PAUD di tengah krisis wabah COVID-19 dan merespon kebutuhan dan keterbatasan selama pandemi COVID-19. Pokok rekomendasi yang dapat ditempuh diantaranya secara singkat sebagaimana tercantum di bawah ini. Elaborasi dalam bentuk matriks dapat dilihat di **Annex 4: Matriks Rekomendasi**

- a** Mempersiapkan lembaga dan pendidik PAUD dengan penyesuaian struktur tata kelola dan pembelajaran yang peka, fleksibel dan responsif dengan masa pandemi COVID-19, termasuk dalam pengetahuan mutakhir mengenai penularan COVID-19, penerapan protokol kesehatan dan manajemen resiko, sebagai bagian dari kesiagaan PAUD terhadap penyakit. Termasuk di dalam rekomendasi ini adalah pentingnya kampanye terstruktur, dan tersegmentasi untuk menjawab kebutuhan orang tua akan manfaat nyata (tidak abstrak) PAUD di saat pandemi COVID-19.
- b** Memberikan dukungan finansial kepada lembaga PAUD untuk mencukupi kebutuhan minimum operasional dan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD, meminimalisir tafsir ganda kebijakan, dan menyederhanakan proses pencairan dan pelaporan. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah nasional, pemerintah kabupaten dan pemerintah kabupaten.
- c** Bersama-sama dengan Gugus Tugas PAUD - HI, secara kontinyu memantau kondisi PAUD di tengah-tengah pandemi COVID-19 dengan perspektif kerentanan berganda. Kerentanan berganda ini mencakup kondisi PAUD, termasuk di antaranya adalah akses fasilitas, data anak terpilah, kondisi pembelajaran, pengelolaan, personalia, kondisi sosio-ekonomi masyarakat dan juga identifikasi potensi respon yang bisa dilakukan. Selain kerangka ketahanan, diperlukan pula pemahaman mengenai gender dalam monitoring PAUD untuk dapat memahami hal-hal yang tidak muncul secara langsung dalam kerangka normatif kebijakan. Sosialisasi juga sangat diperlukan untuk mengadvokasi pemangku kepentingan dan kebijakan di tingkat nasional, kabupaten dan desa sebagai metode mobilisasi dukungan multi-pihak.

73 CNN Indonesia, 'Minat Ortu Daftar Anak Ke PAUD Disebut Turun Karena Corona', Berita Peristiwa (Jakarta, Indonesia, 7 July 2020) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200707152324-20-521855/minat-ortu-daftar-anak-ke-paud-disebut-turun-karena-corona>>.

74 Kemunduran PAUD dapat berdampak pada pencapaian: (1) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan, pasal 5(3) mengenai PAUD sebagai pelayanan dasar pendidikan di tingkat kabupaten/kota; (2) Pencapaian target RPJMN untuk Angka Partisipasi 53% (penghitungan SUSENAS) di tahun 2024, dan (3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terkhusus Tujuan ke-4.2 mengenai akses universal atas PAUD, pengasuhan dan prasekolah bagi penduduk berusia di bawah 5 tahun di tahun 2030.

Perubahan secara jangka panjang membutuhkan penerapan skenario pembelajaran dan tata kelola PAUD kedaruratan yang mencakup pandemik dengan skala global seperti saat ini. Perubahan juga diperlukan untuk menjamin kesetaraan status PAUD dan pendidik PAUD dalam sistem pendidikan nasional dan perlindungan pendidik PAUD. Selain itu, diperlukan pengembangan PAUD yang sensitif dengan gender mencakup muatan bahan ajar dan kerangka profesionalisasi pendidik PAUD.

MENAJAMKAN DAN MENGINTENSIFKAN PERAN PAUD HOLISTIK INTEGRATIF

Pembatasan fisik menghambat pergerakan dan pemenuhan layanan esensial anak usia dini. Kesulitan yang dialami oleh PAUD selama pandemi juga mengindikasikan tantangan yang sama bagi sektor-sektor lain, seperti gizi, kesehatan, kesejahteraan dan perlindungan anak usia dini. Salah satu kesamaan yang lain adalah adanya tenaga *frontliners* dari masing-masing sektor yang berada di tengah-tengah masyarakat, seperti pendidik PAUD, bidan desa, kader posyandu, fasilitator BKB atau pun penyuluh kesehatan lingkungan. Pandemi COVID-19 memberikan peluang untuk meningkatkan PAUD HI, tidak hanya pada dimensi 'holistik' atau pemenuhan layanan secara komprehensif, tetapi juga pada dimensi 'integratif', yaitu penggunaan satu layanan untuk berbagai macam tujuan. Bila dalam situasi normal kerja gugus tugas PAUD HI lebih banyak diarahkan pada sinkronisasi kebijakan, program, dan sosialisasi kerja antar-sektor. Di saat pandemi COVID-19, gugus tugas PAUD HI dapat bersama-sama melakukan pemutakhiran cakupan, fasilitas dan program yang terdampak. Berdasarkan peta yang disusun, gugus tugas dapat mengembangkan strategi bersama, tidak hanya dibatasi di program, tetapi juga untuk bersimbiosis dalam melakukan layanan monitoring silang. Sebagai contoh, pendidik PAUD dalam melakukan penjangkauan dapat membantu tim Dinas Kesehatan dengan pentingnya pencegahan penyakit menular, pemberian imunisasi, gizi seimbang, dan pembiasaan hidup bersih sehat dan mendapatkan data dari masyarakat mengenai status anak-anak yang belum bisa dijangkau oleh Posyandu dan Puskesmas atau pun Puskesmas. Disisi lain, kader-kader Posyandu dapat memberikan informasi pada Dinas Pendidikan mengenai kebutuhan akan stimulasi edukasi dan pengasuhan untuk orang tua dan anak-anak yang tidak terjangkau oleh PAUD.

Penutup

Kelayakan dukungan bagi lembaga dan tenaga pendidik PAUD merupakan mata rantai yang meningkatkan ketahanan dan dapat menyambung keberlanjutan PAUD di Indonesia. Melalui dukungan yang layak untuk PAUD di saat pandemi, Indonesia dapat menyelamatkan investasi yang telah dikeluarkan sejak dua dekade silam sekaligus membantu ketahanan kesejahteraan anak-anak, orang tua dan juga peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk jangka yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriany, Vina, and Jo Warin, 'Preschool Teachers' Approaches to Care and Gender Differences within a Child-Centred Pedagogy: Findings from an Indonesian Kindergarten', *International Journal of Early Years Education*, 22 (2014), 315–28 <<https://doi.org/10.1080/09669760.2014.951601>>
- Ailwood, Jo, 'Mothers, Teachers, Maternalism and Early Childhood Education and Care: Some Historical Connections', *Contemporary Issues in Early Childhood*, 8 (2007), 157–65 <<https://doi.org/10.2304/ciec.2007.8.2.157>>
- Ailwood, Joanne, 'Exploring the Care in Early Childhood Education and Care', *Global Studies of Childhood*, 7 (2017), 305–10 <<https://doi.org/10.1177/2043610617747977>>
- Allvin, Rhian Evans, and Lauren Hogan, 'There's No Going Back : Child Care after COVID-19', NAEYC, 2020 <<https://www.naeyc.org/resources/blog/theres-no-going-back-child-care-after-covid-19>> [accessed 5 August 2020]
- Bupati Sumbawa, Surat Edaran BUPATI SUMBAWA NO 421.9/177/DIKBUD/2019 (Sumbawa Besar, Indonesia, 2019)
- Chang, Mae Chu, Erika Dunkelberg, Susiana Iskandar, Sophie Naudeau, Dandan Chan, Richard Cibulskis, and others, *Early Childhood Education and Development in Indonesia: An Investment for A Better Life* (Washington, D.C., 2006) <[p://documents.worldbank.org/curated/en/2006/06/7121650/early-childhood-education-development-indonesia-investment-better-life](http://documents.worldbank.org/curated/en/2006/06/7121650/early-childhood-education-development-indonesia-investment-better-life)>
- CNN Indonesia, 'Minat Ortu Daftar Anak Ke PAUD Disebut Turun Karena Corona', *Berita Peristiwa* (Jakarta, Indonesia, 7 July 2020) <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200707152324-20-521855/minat-ortu-daftar-anak-ke-paud-disebut-turun-karena-corona>>
- Gatra.com, 'Guru Hanya Dapat 1% Dari BLT-DD? Ini Jawaban Wamendes' (Jakarta, Indonesia, 24 June 2020)
- GOI, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional [Republic of Indonesia Law No. 20 Year 2003 on National Education System] (Indonesia, 2003)
- Gromada, Anna, Dominic Richardson, and Gwyther Rees, *Childcare in a Global Crisis: The Impact of COVID-19 on Work and Family Life*, (Florence, Italy, 2020)
- Hasan, Amer, Marion C Hyson, and Mae Chu Chang, *Early Childhood Education and Development in Poor Villages of Indonesia: Strong Foundations, Later Success*, ed. by Amer Hasan, Marilou Hyson, and Mae Chu Chang, *Directions in Development: Human Development* (Washington DC: The World Bank, 2013) <<https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9836-4>>
- ILO, *Care Work and Care Jobs: For the Future of Decent Work* (Geneva, 2018) <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf> [accessed 15 March 2019]
- KDPDTT, 'BLT Dana Desa Selamatkan Jutaan PEKKA Dari Dampak Ekonomi Akibat COVID-19', 2020 <<https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3353/blt-dana-desa-selamatkan-jutaan-pekka-dari-dampak-ekonomi-akibat-covid-19>> [accessed 4 August 2020]
- KEMDIKBUD, *Analisis Efektivitas Program BOP PAUD Pada Satuan Pendidikan Tahun 2018* (Jakarta, Indonesia: KEMDIKBUD, 2018)
- , 'Jumlah Data Satuan Pendidikan (Sekolah) Anak Usia Dini per Provinsi', *Data Referensi*

- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2020 <<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index21.php>> [accessed 28 July 2020]
- , Statistik PAUD 2019/2020 (Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020) <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- , ‘Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19)’ (Jakarta, Indonesia, 2020)
- , ‘Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dna Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus NonFisik Bantuan Operasional Penyelenggar’ (Jakarta, Indonesia, 2020)
- , Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain [Technical Guideline on Playgroup Organization] (Jakarta, Indonesia: MoEC, 2015)
- , Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD (Jakarta, 2015) <http://anggunpaud.kemdikbud.go.id/images/upload/images/Juknis_PAUD_2016/4._Juknis_Pos_PAUD.pdf> [accessed 14 January 2019]
- , Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak [Technical Guideline on the Organisation of Kindergarten] (Jakarta: MoNE, 2011) <<http://paud.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2016/03/Juknis-Penyelenggaraan-TK.pdf>> [accessed 14 January 2019]
- , Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, NSPK : Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015)
- Koalisi Nasional PAUD HI, Policy Brief: Dukungan Dan Perlindungan Kepada Pendidik PAUD Terdampak Pandemi COVID-19 (Jakarta, Indonesia, 2020)
- KOMPAK, Laporan Kajian Costing Dan Pemanfaatan Dana BOP PAUD (Jakarta, Indonesia, 2019)
- Kumparan, ‘BLT Dana Desa Diperpanjang Sampai Desember 2020’ (Jakarta, Indonesia, 4 August 2020) <<https://kumparan.com/kumparanbisnis/blt-dana-desa-diperpanjang-sampai-desember-2020-1tw7aOWiddi/full>> [accessed 5 August 2020]
- Lim, Merlyna, ‘Dis/Connection: The Co-Evolution of Sociocultural and Material Infrastructures of the Internet in Indonesia’, *Indonesia*, 105 (2018), 155-72 <<https://doi.org/10.1353/ind.2018.0006>>
- Makarim, Nadiem, ‘Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran Di Masa Pandemi COVID-19 [Powerpoint Presentation]’ (Jakarta, Indonesia: KEMDIKBUD, 2020), pp. 1-26
- Meiliana, Sania, ‘Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos’, *Kompas.Com*, 2020 <<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/20272151/kepala-keluarga-perempuan-kesulitan-ekonomi-kemensos-minta-pemda-perbaiki>> [accessed 4 August 2020]
- Newberry, Janice C, *Durable Assemblage: Early Childhood Education in Indonesia*, Working Paper Series (Singapore, 2012) <http://www.ari.nus.edu.sg/docs/wps/wps12_194.pdf> [accessed 8 August 2014]
- , ‘Payment in Heaven : Can Early Childhood Education Policies Help Women Too ?’, 2018 <<https://doi.org/10.1177/1478210317739467>>
- , ‘Women Against Children: Early Childhood Education and the Domestic Community in Post-Suharto Indonesia’, *TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 2 (2014), 271-91 <<https://doi.org/10.1017/trn.2014.7>>
- Osgood, Jayne, Jayne Osgood, *Narratives from the Nursery: Negotiating Professional Identities in*

- Early Childhood (Abingdon, Oxon: Routledge, 2012)
- Pangastuti, Yulida, 'Expansion of Early Childhood Education in Indonesia: Finding Voices, Telling Stories' (University of Auckland, Auckland, New Zealand, 2020)
- Papanek, Hanna, and Laurel Schwede, 'Women Are Good with Money: Earning and Managing in an Indonesian City', *Economic and Political Weekly*, 23 (1988), WS73–84
- Puspitasari, Lia, and Kenichi Ishii, 'Digital Divides and Mobile Internet in Indonesia: Impact of Smartphones', *Telematics and Informatics*, 33 (2016), 472–83 <<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.11.001>>
- van Ravens, Jan, *Holistic ECD for All in Indonesia: Supporting Communities to Close the Gap* (Jakarta, Indonesia, 2010) <<http://www.globalchilddevelopment.org/sites/default/files/documents/INDONESIA ECD COST FINANCING 15 February 2010.pdf>>
- Shaeffer, Sheldon, 'The World Post-COVID Might Be the World Pre-Incheon — or Even Pre-Dakar', *ARNEC Conversations*, 2020
- SMERU, *Menguak Keberadaan Dan Kehidupan Perempuan Kepala Keluarga*, 2014
- Suryahadi, Asep, Ridho Al Izzati, and Daniel Suryadarma, 'Estimating the Impact of Covid-19 on Poverty in Indonesia', *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56 (2020), 175–92 <<https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>>
- Thomas, R. Murray, 'Early Childhood Education in Indonesia', in *Early Childhood Education in Asia and the Pacific: A Source Book* (New York: Garland Publishing, 1992), pp. 95–133
- Tirto.id, 'Kemen PPPA Catat 3.000 Kasus Kekerasan Anak Selama Pandemi COVID-19', 2020 <<https://tirto.id/kemen-pppa-catat-3000-kasus-kekerasan-anak-selama-pandemi-covid-19-fK3j>> [accessed 4 August 2020]
- UNDP, 'Coronavirus vs. Inequality How We'll Pay Vastly Different Costs for the COVID-19 Pandemic', 2020 <<https://feature.undp.org/coronavirus-vs-inequality/>> [accessed 4 August 2020]
- UNDP Indonesia, 'Economic and Human Development Inequalities Widen During -COVID-19 Pandemic', 2020 <<https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2020/Economic-and-Human-Development.html>> [accessed 4 August 2020]
- UNESCO, 'COVID-19 Education Response Webinar: Ensuring Quality of Learning and Well-Being for Young Children in the Context of the COVID-19, 15 July 2020', 2020
- UNICEF, *Report of Rapid Health Assessment : Ensuring Sustainability of Essential Health Services for Children and Mothers during the COVID-19 Pandemic in Indonesia* (Jakarta, Indonesia, 2020)
- , *UNICEF Indonesia Issues Brief: Education and Early Childhood Development Critical Link* (Jakarta, 2012)
- WHO, *COVID-19 Situation Report 13*, World Health Organization (Jakarta, Indonesia, 2020), XIII
- Wieringa, Saskia Eleonora, Evelyn Blackwood, and Abha Bhaiya, *Women's Sexualities and Masculinities in a Globalizing Asia*, ed. by Saskia E. Wieringa, Evelyn Blackwood, and Abha Bhaiya (New York: Palgrave Macmillan US, 2007) <<https://doi.org/10.1057/9780230604124>>
- Yulindrasari, Hani, and Putu Rahayu Ujianti, "'Trapped in the Reform" : Kindergarten Teachers' Experiences of Teacher Professionalisation in Buleleng, Indonesia', *Policy Futures in Education*, 16 (2018), 66–79 <<https://doi.org/10.1177/1478210317736206>>

Annex 1: Matriks Rekomendasi

JANGKA PENDEK (0-3 BULAN)	JANGKA MENENGAH (3-12 BULAN)	JANGKA PANJANG (>12 BULAN)
<p>Pokok Rekomendasi: 1.1. Mempersiapkan lembaga dan pendidik PAUD dengan penyesuaian struktur tata kelola dan pembelajaran yang peka, fleksibel dan responsif dengan masa Pandemi COVID-19, termasuk dalam pengetahuan mutakhir mengenai penularan COVID-19, penerapan protokol kesehatan dan manajemen resiko.</p>		
<p>Arahan kebijakan: 1.1.1. Meningkatkan pemerataan akses dan fasilitas yang mendukung PAUD siaga penularan penyakit pada pendidik PAUD dan orang tua siswa</p>		
<p>Pengampu: KEMDIKBUD, KEMENAG, KEMKES, KEMKEU, PUPR (Penyediaan fasilitas MCK)</p>		
<p>Kebijakan terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus NonnFisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020; Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-699/Dt.l. /IPP.03/03/2020 TAHUN 2020 tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah dan Madrasah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 di Lingkungan Raudlatul Athfal dan Madrasah; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020, Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 		
<p>1. Mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dapat dimanfaatkan untuk pembelian paket data seluler untuk pendidik atau pun siswa (contoh: BOP PAUD, BOP RA);</p> <p>2. KEMDIKBUD, KEMENAG, PEMKAB, PEMDES mensosialisasikan akses digitalisasi desa terkait dengan kemudahan jaringan internet;</p> <p>3. Khusus untuk RA dan TK-ABA, perlu diintensifkan sosialisasi BOP RA yang telah memungkinkan pembelian gawai bagi pendidik, sedangkan untuk PAUD di bawah Kemdikbud, perlu dilakukan perencanaan penyediaan atau peminjaman gawai;</p>	<p>4. Peningkatan besaran BOP PAUD dan dimasukkannya item pembelian gawai sebagai salah satu belanja yang diperbolehkan untuk BOP PAUD;</p> <p>5. Identifikasi kebutuhan akses dan fasilitas lembaga PAUD untuk penyelenggaraan PAUD yang siaga penularan penyakit</p> <p>6. Memprioritaskan kebijakan DAK Fisik juga untuk kebutuhan pendidikan agar dapat menunjang pemenuhan kebutuhan fasilitas kunci, seperti komputer atau pun gawai untuk mempermudah satuan PAUD melaksanakan PJJ</p>	<p>7. Bersama-sama dengan inisiatif multi-pihak, melengkapi Lembaga PAUD dengan:</p> <p>7.1 Akses daring, fasilitas perangkat keras, keterampilan pendidik dan akses informasi mutakhir yang mendukung kreasi guru dan kesiapan respon bahaya pandemi;</p> <p>7.2. Akses Bimbingan Teknis yang berkelanjutan bagi seluruh pendidik PAUD;</p> <p>7.3. Akses air bersih dan fasilitas MCK, serta kebiasaan hidup bersih sehat;</p> <p>7.4. Akses layanan kesehatan dasar (imunisasi, pola makan gizi seimbang) serta kepemilikan akte lahir</p>

JANGKA PENDEK (0-3 BULAN)	JANGKA MENENGAH (3-12 BULAN)	JANGKA PANJANG (>12 BULAN)
<p>Arah Kebijakan: 1.1.2. Pembelajaran PAUD yang peka dan responsif dinamika Pandemi COVID-19</p>		
<p>Pengampu: KEMDIKBUD, KEMENAG, PEMKAB</p>		
<p>Kebijakan terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus • SE Sekretaris Jenderal Kemdikbud No. 15 / 2020 mengenai pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Diseases (COVID-19) • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini • Peraturan Menteri Agama Nomor 90 / 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah 		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mendesiminasikan pedoman pembelajaran PAUD di saat Pandemi COVID-19 yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Muatan esensial pembelajaran PAUD di masa Pandemi COVID-19; 1.2. Sistematisasi melalui penyederhanaan kurikulum; 1.3. Skenario-skenario adaptatif untuk merespon keragaman konteks daerah terkait dengan penyebaran COVID-19 dan kondisi-kondisi sosio-ekonomi dan budaya; 2. Melakukan inovasi dan penguatan kapasitas penilik PAUD di kecamatan dalam memfasilitasi dan monitoring ketahanan PAUD 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memperkaya strategi luring yang mempertimbangkan kebutuhan sosial dan emosional anak serta aman dari penyakit menular; 4. meningkatkan akses referensi dan cakupan pendidik PAUD yang dilatih melalui BIMTEK; 5. Menjajaki aktivitas kegiatan gugus PAUD yang memiliki resiko rendah penularan penyakit; 6. Bila diperlukan, menyusun struktur penyelenggaraan PAUD di saat gawat darurat pandemi penyakit dengan memanfaatkan basis-basis kekuatan sosial yang ada komunitas/masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Mengintegrasikan kompetensi dan keterampilan pendidik PAUD dalam menghadapi krisis pandemi ke dalam standar kompetensi pendidik PAUD; 8. Pengembangan strategi, panduan, dan referensi teknis untuk sekolah yang siaga dalam menangani pandemi penyakit dan memasukkan kesiagaan terhadap pandemi penyakit menjadi salah satu skenario dalam rencana kontijensi bidang pendidikan untuk kebencanaan; 9. Meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dinas pendidikan, kantor agama dan penilik untuk menghadapi dan menangani kegawatdaruratan penyakit di jenjang PAUD.

JANGKA PENDEK (0-3 BULAN)	JANGKA MENENGAH (3-12 BULAN)	JANGKA PANJANG (>12 BULAN)
<p>Arah Kebijakan: 1.1.3. Meningkatkan cakupan layanan PAUD untuk anak usia 0-6 tahun</p>		
<p>Pengampu: KEMDAGRI, KDPDTT, KEMDIKBUD, KEMENAG, PEMKAB, PEMERINTAH KECAMATAN DAN DESA</p>		
<p>Kebijakan terkait</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal PERMENDIKBUD No 32 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan PERMENDAGRI No 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Desa 		
<p>1. Memastikan adanya data terpilah berdasarkan usia anak yang terdaftar di PAUD untuk mendorong standar layanan PAUD berdasarkan kategori usia (misalnya 0-2, 3-4, 5-6 tahun);</p>	<p>4. Mempertimbangkan adanya kesepakatan untuk urusan kabupaten dan desa dalam pemenuhan layanan PAUD berdasarkan cakupan usia agar perbaikan layanan PAUD di tingkat desa juga mempertimbangkan kebutuhan anak usia dini yang dipenuhi secara holistik dan terintegrasi berbasis usia melalui regulasi di Kemendagri (Kewenangan Skala Desa) dan Kemendesa (prioritas penggunaan dana desa dan rencana aksi stunting)</p>	<p>5. Advokasi kebijakan untuk memasukkan usia 3-4 tahun dalam kebijakan standar pelayanan minimal;</p> <p>6. Monitoring dan penyediaan data anak usia dini secara terpilah yang berkelanjutan agar menjadi bagian dalam proses monitoring standar pelayanan minimum saat ini sebagai persiapan review regulasi</p>
<p>2. Meningkatkan kapasitas dinas terkait dalam penyusunan kegiatan-kegiatan yang mendukung Program PAUD agar adanya perbaikan data dan kualitas program anak usia dini berdasarkan target usia melalui renstra dinas terkait;</p>		
<p>3. Aktivisasi Posyandu yang diberi muatan pendidikan dan protokol kesehatan yang aman.</p>		
<p>Arah Kebijakan: 1.1.4. Menjadikan pendidik PAUD dan tenaga frontliner lain (kader, penyuluh) sebagai salah aktor pendidikan dan sekaligus agen perubahan yang mencegah penyebaran COVID 19</p>		
<p>Pengampu: KEMDIKBUD, KEMENAG, KEMKES, PEMKAB (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan)</p>		
<p>Kebijakan terkait</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 01/Kb/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020, Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 Pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)w 		

<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun modul sistematis mengenai komunikasi perubahan tingkah laku dan manajemen resiko dalam konteks dinamika pandemi bagi pendidik PAUD; 2. Melatih pendidik dengan muatan agen pencegahan COVID-19 atau penyakit-penyakit menular lainnya dan pemenuhan layanan yang inklusi di waktu rentan; 3. Mengembangkan materi-materi KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) untuk mendukung transformasi peran pendidik PAUD untuk responsif terhadap siaga pandemi penyakit; 4. Mengintensifkan pelibatan PAUD dalam penerapan status siaga bencana penyakit melalui penyusunan SOP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi muatan perubahan tingkah laku untuk pencegahan COVID-19 dan penyakit menular ke dalam materi BIMTEK tenaga pendidik dan tenaga frontliner lainnya (kader, penyuluh); 2. Integrasi keterampilan komunikasi untuk perubahan perilaku ke dalam pengembangan strategi, panduan, dan referensi teknis untuk PAUD siaga pandemi penyakit; 3. Pelibatan sistemik lembaga PAUD melalui SOP siaga bencana penyakit dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau pun penetapan-penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular oleh Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan
<p>Arah Kebijakan: 1.1.5. Melakukan kampanye terstruktur dan tersegmentasi untuk menjawab kebutuhan orang tua akan layanan PAUD yang beresiko penularan rendah, bermakna, bermanfaat tidak hanya bagi anak tetapi juga bagi orang tua dan pengasuh.</p>	
<p>Pengampu: KEMDIKBUD, KEMENAG, KEMDAGRI, KDPDTT, PEMKAB, PEMERINTAH KECAMATAN DAN DESA</p>	
<p>Kebijakan terkait</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • SE Sekretaris Jenderal Kemdikbud No. 15 / 2020 mengenai pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Diseases (COVID-19) • Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 	

<p>1. Identifikasi manfaat nyata (tidak abstrak) dan hambatan orang tua dan anak-anak yang mempengaruhi keputusan mereka dalam menggunakan layanan PAUD di masa Pandemi COVID-19;</p> <p>2. Pengembangan pesan-pesan kunci yang dihasilkan kegiatan butir pertama; Bila diperlukan, melakukan segmentasi pesan dan metode penyampaian bagi orang tua sesuai dengan keragaman butir pertama;</p> <p>3. Mobilisasi dukungan sosialisasi dengan menggunakan jalur kebijakan formal (pemerintah, contoh penegasan mengenai SPM) dan non-formal (tokoh masyarakat, tokoh perempuan, jalur adat)</p>	<p>4. [lanjutan] Mobilisasi dukungan sosialisasi dengan menggunakan jalur kebijakan formal (pemerintah, contoh penegasan mengenai SPM) dan non-formal (tokoh masyarakat, tokoh perempuan, jalur agama dan adat);</p> <p>5. Koordinasi lintas sektor dan multipihak dari tingkat kabupaten sampai desa untuk mendorong gerakan orangtua berani tetap daftarkan anak usia dini ke satuan PAUD sesuai dengan usia mereka walaupun dalam masa pandemi COVID-19 dengan metode Belajar Dari Rumah</p>
<p>Pokok Rekomendasi: 1.2. Memberikan dukungan finansial dan meningkatkan kemungkinan akses kepada lembaga PAUD untuk mencukupi kebutuhan minimum operasional dan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD</p>	
<p>Arahan kebijakan: 1.2.1. Memenuhi kebutuhan pembiayaan (personalia dan non-personalia) untuk mendukung ketahanan pelaksanaan PAUD di saat Pandemi COVID-19</p>	
<p>Pengampu: KEMDIKBUD, KEMENAG, KEMKEU, PEMKAB, PEMERINTAH KECAMATAN DAN DESA</p>	
<p>Kebijakan terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus NonFisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-699/Dt.I. /PP.03/03/2020 TAHUN 2020 tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah dan Madrasah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 di Linnngkungan Raudlatul Athfal dan Madrasah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Menimbang Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik 	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan sangat segera, menambah besaran BOP PAUD dengan melakukan penghitungan biaya minimal kebutuhan operasional PAUD di masa pandemi, disesuaikan dengan karakteristik khusus, seperti lokasi PAUD (di daerah perkotaan yang tidak mendapatkan Dana Desa, PAUD di pedesaan yang dapat mengakses dana desa), indeks kemahalan, tipe layanan PAUD (TK, KB, SPS, TPA), jumlah siswa, dan zonasi COVID-19; 2. Estimasi sumber pemasukan, contoh: luran orang tua, dana BOP PAUD, BOP RA, Dana Desa dengan berbagai skenario untuk harmonisasi pemanfaatan dana yang tersedia untuk PAUD 3. Mengidentifikasi dana-dana yang dapat digunakan untuk mendukung ketahanan PAUD selama pandemi selain sumber pemasukan diatas; 4. Memaksimalkan penggunaan dana-dana strategis bagi PAUD, seperti dana BOP PAUD, BOP RA atau pun Dana Desa misalnya untuk kesejahteraan pendidik melalui sosialisasi intensif dan komprehensif; 5. Mengupayakan dana-dana alokasi untuk PAUD dari Dana Desa/Alokasi Dana Desa tidak terimbas refocusing anggaran; 6. Mempercepat pencairan BOP PAUD dan BOP RA dan Dana Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 7. Penyederhanaan alur pencairan BOP PAUD; Memantau dan memastikan keeluasaan PAUD dalam penggunaan BOP PAUD, BOP RA dan Dana Desa, serta meminimalisir multi-tafsir; 8. Pelonggaran BOP PAUD untuk pembelian gawai sederhana (dibatasi dengan nominal); 9. Sinkronisasi besaran dan penjadwalan BOP PAUD dengan BOP RA; 10. Advokasi alokasi belanja APBD yang merata untuk fungsi pendidikan yang melihat pada 5 program besar (wajib belajar, program pendidikan sarana prasarana aparatur, pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, PAUD) agar besarnya sesuai dengan output yang diharapkan 11. Melakukan penetapan batas pendapatan minimum untuk pendidik PAUD yang dapat diatur dengan regulasi di tingkat daerah dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia di kabupaten dan desa 	<ol style="list-style-type: none"> 12. Transfer BOP PAUD langsung ke sekolah; 13. Memantau efektivitas intervensi dan keterpenuhan kebutuhan operasional PAUD; 14. Kelanjutan sinkronisasi besaran dan penjadwalan pencairan BOP PAUD dan BOPP RA; 15. Melakukan upaya yang lebih sistematis untuk penyetaraan status PAUD formal dan non-formal; 16. Mengeluarkan panduan yang partisipatif untuk perbaikan layanan dasar termasuk PAUD agar pembayaran honor guru PAUD dapat diakses oleh PAUD milik desa dan bukan milik desa
--	---	---

<p>Arah Kebijakan: 1.2.2. Meningkatkan kepekaan kerentanan ekonomi pendidik PAUD perempuan dalam Pandemi COVID-19</p>		
<p>Pengampu: KEMDIKBUD, KEMENAG, KEMKEU, KDPDTT, KEMDAGRI, KEMSOS, PEMKAB, PEMERINTAH KECAMATAN DAN DESA</p>		
<p>Kebijakan terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus NonnFisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020; Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-699/Dt.I. /PP.03/03/2020 TAHUN 2020 tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah dan Madrasah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19 di Linnkgungan Raudlatul Athfal dan Madrasah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; 		
<p>1. Identifikasi masyarakat terdampak COVID-19 juga memprioritaskan pada pendidik PAUD terdampak COVID-19 yang masuk dalam kategori kelompok perempuan kepala keluarga dan kategori kehilangan penghasilan;</p> <p>2. Mengantisipasi dan menggalas bantuan khusus kesejahteraan pendidik PAUD di masa darurat</p>	<p>3. Pemetaan kewenangan dan sumber dana sistematis jangka panjang multi pihak untuk pengembangan dana kedaruratan untuk kesejahteraan pendidik PAUD</p>	<p>4. Pengembangan kebijakan jangka panjang dan institusionalisasi dana kedaruratan kesejahteraan pendidik PAUD</p> <p>5. Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam konteks pendidik dan peserta dalam program pemerintah desa dan program PAUD di Indonesia</p>
<p>Pokok Rekomendasi: 1.3. Secara kontinyu memantau kondisi PAUD di tengah-tengah Pandemi COVID-19 dengan memperhitungkan kerentanan berganda dan mensosialisasikan kerentanan berganda PAUD di saat Pandemi COVID-19 kepada pemangku kepentingan dan kebijakan di tingkat nasional, kabupaten dan desa sebagai metode mobilisasi dukungan multi-pihak.</p>		
<p>Arahan kebijakan: 1.3.1. Mengembangkan instrumen dan melakukan monitoring berkala yang mempertimbangkan kerentanan berganda pendidik PAUD yang untuk mendapatkan gambaran dan umpan balik kondisi PAUD</p>		
<p>Pengampu: KEMENKO PMK, KEMDIKBUD, KEMENAG, BAPPENAS, KEMENSOS, KEMENAG, KEMENPPPA, POKJA PAUD HI, PEMERINTAH KECAMATAN DAN DESA</p>		

Kebijakan terkait

- Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, BAPPENAS, 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Posyandu,
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Posyandu
- Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Paud Holistik Integratif Di Satuan Paud, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kemendikbud, 2015

1. Mendesimnasi dan memobilisasi dukungan untuk monitoring berganda pendidik PAUD;
2. Memantau dan menarik poin-poin evaluasi berdasarkan hasil monitoring kerentanan berganda;
3. Mengaktifkan peran Gugus Satuan PAUD HI di setiap kotamadya/ kabupaten dan desa dalam mengidentifikasi potensi kerentanan yang dialami oleh tenaga pendidik PAUD selama masa pandemi;
4. Mengoptimalkan bantuan program PAUD HI yang diselenggarakan oleh KEMDIKBUD untuk melakukan monitoring terhadap kerentanan berganda PAUD dan melaluinya mendorong adanya solusi praktis mendukung PAUD dalam masa pandemi COVID-19

5. [lanjutan] Memantau dan menarik poin-poin evaluasi berdasarkan hasil kerentanan berganda untuk keperluan program;
6. Mengintegrasikan kerentanan menambahkan item-item pertanyaan kunci mengenai kerentanan PAUD pada sistem dapodik;
7. Memastikan adanya koordinasi lintas sektoral untuk mengidentifikasi sumber-sumber anggaran dari setiap kementerian dan dinas yang dapat digunakan untuk membantu satuan dan tenaga pendidik PAUD;
8. Mendorong percepatan pembuatan PERBUP mengenai PAUD HI di setiap kabupaten sehingga keberadaan satuan dan tenaga pendidik PAUD akan menjadi perhatian pemerintah daerah;
9. Mendorong percepatan penyusunan RAD mengenai PAUD HI di setiap kabupaten sehingga keberadaan satuan dan tenaga pendidik PAUD akan menjadi perhatian pemerintah daerah.

Annex 2: INSTRUMEN LOKAKARYA

A. LOKAKARYA PEMANGKU KEBIJAKAN

Panduan Diskusi

Peserta diskusi dipisah menjadi 3 kelompok [bila jumlah memungkinkan, break out] berdasarkan asal OPD:

1. Sektor pemerintahan: Bappeda, pemerintah kecamatan dan kelurahan / desa & Dinas PMD;
2. Sektor pendidikan: dinas pendidikan, Kantor Agama, IGTKI, IGRA, HIMPAUDI, pengelola PAUD atau guru;
3. Sektor layanan holistik-integratif: Dinas Kesehatan, Dinas P3A, Dinas Sosial

Kebijakan

1. Apakah kebijakan yang diambil pemerintah daerah untuk membantu pelaksanaan PAUD HI dalam situasi pandemi COVID-19 ini?
2. Apakah kebijakan yang diambil pemerintah daerah untuk membantu pembelajaran jarak jauh dan layanan kesehatan, gizi, serta perlindungan selama COVID-19?
3. Apakah yang menjadi tantangan pemerintah daerah untuk membantu layanan PAUD-HI selama masa pandemi ini?

Koordinasi

1. Bagaimana koordinasi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk membantu layanan PAUD-HI (termasuk membantu guru) selama COVID-19?
2. Bagaimanakah mekanisme Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKTD)?
3. Bagaimana peran gugus PAUD-HI dalam membantu satuan PAUD?

B. LOKAKARYA SATUAN PENDIDIKAN

Kelompok 1: Dinas dan Lembaga Kabupaten

Kelompok 2: Guru, Pengelola, Kepsek

Kelompok 3: Aparat Desa, Kecamatan, HIMPAUDI Kecamatan, IGRA, IGTKI, Bunda PAUD

Pedoman Diskusi FGD: OPD

- Apa langkah yang Anda akan lakukan menyikapi hasil survei tentang PAUD yang hanya akan bertahan 3-5 bulan?
- Apakah ada rencana membuat peta kebutuhan PAUD di wilayah Anda? (jaringan internet, media belajar daring, perangkat keras dan lunak, LKS)
- Apa langkah-langkah yang Anda lakukan untuk memonitor dan memutakhirkan kondisi PAUD?

Pedoman Diskusi FGD: Guru dan Kepsek

- Bagaimanakah kondisi satuan PAUD yang anda kelola sebelum terjadinya pandemi COVID-19?
- Pendapatan (SPP, Iuran, BOP, Bantuan Kabupaten, Dana Desa)
- Pembiayaan (Jumlah, Pos Biaya, Mekanisme Perencanaan)
- Kondisi guru (kualifikasi dan tingkat kesejahteraan)
- Latar belakang orang tua
- Bagaimanakah kondisi satuan PAUD selama terjadinya pandemi COVID-19?
- Apakah tantangan yang dihadapi selama COVID-19?
- Bagaimana anda (secara personal maupun lembaga) menghadapi tantangan tersebut?
- Apa saja bantuan yang diperoleh satuan PAUD selama pandemi ini?
- Apakah anda mengetahui Peraturan Pemerintah no 20 tahun 2020 mengenai perubahan alokasi BOP? Jika mengetahui, apakah anda sudah merasakan perubahan kebijakan ini?
- Bagaimana satuan PAUD mengimplementasikan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)?
- Apa tantangan yang dihadapi selama implementasi (PJJ) ini?
- Bagaimana peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi satuan PAUD selama masa pandemi ini?
- Apa rencana Anda setelah mendengar pengumuman mengenai pembatasan pembelajaran tatap muka oleh KEMDIKBUD pada tanggal 15 Juni kemarin?

Pedoman FGD: Kantor Desa dan Kecamatan

- Apa dukungan (kebijakan & sumber daya) yang diberikan oleh Desa dan Kecamatan untuk PAUD? [dalam kondisi normal]
- Apa dukungan (kebijakan & sumber daya) yang diberikan oleh Desa dan Kecamatan untuk kesejahteraan Guru PAUD? [Dalam kondisi normal]
- Bagaimana desa mengidentifikasi dan menentukan kelompok rentan sebagai penerima BLT dan bansos lainnya?
- Bagaimana kualitas sinergi antara desa, kecamatan dan kabupaten dalam menyelaraskan bantuan BLT untuk masyarakat rentan selama terjadinya Pandemi?
- Bagaimana kondisi kesejahteraan pengelola PAUD dan tenaga pendidik PAUD selama Pandemi berlangsung?
- Apa yang ingin Anda lakukan, tetapi belum optimal, dalam membantu PAUD dan Tenaga Pendidik PAUD?

Annex 3: Pendapatan dan Belanja PAUD berdasarkan beberapa variabel

A. Urban dan Rural

	NORMAL		PANDEMI		STATUS		GAP	
	Rural	Urban	Rural	Urban	RURAL	URBAN	RURAL	URBAN
EXPENDITURE								
Listrik, air, retribusi masyarakat	100,000	150,000	100,000	110,000	SAMA	TURUN	-	40,000
Internet	100,000	100,000	150,000	200,000	NAIK	NAIK	(50,000)	(100,000)
Alat tulis dan kertas	250,000	200,000	150,000	150,000	TURUN	TURUN	100,000	50,000
Kegiatan ekstra-kurikuler	200,000	250,000	200,000	100,000	SAMA	TURUN	-	150,000
Kegiatan gugus PAUD	150,000	100,000	150,000	100,000	SAMA	SAMA	-	-
Gaji guru (total)	450,000	800,000	450,000	640,000	SAMA	TURUN	-	160,000
Tunjangan guru (total)	400,000	400,000	300,000	400,000	TURUN	SAMA	100,000	-
Gaji petugas sekolah (non-pendidik, total)	110,000	100,000	130,000	100,000	NAIK	SAMA	(20,000)	-
Tunjangan petugas sekolah (non-pendidik, rerata)	100,000	75,000	100,000	87,500	SAMA	NAIK	-	(12,500)
Pelatihan guru (non-gugus)	200,000	200,000	150,000	100,000	TURUN	TURUN	50,000	100,000
TOTAL	2,060,000	2,375,000	1,880,000	1,987,500	TURUN	TURUN	180,000	387,500
INCOME								
Iuran orang tua (sumbangan sukarela)	60,000	100,000	80,000	50,000	NAIK	TURUN	(20,000)	50,000
SPP	400,000	440,204	60,000	300,000	TURUN	TURUN	340,000	140,204
Dana Yayasan	295,000	830,000	150,000	155,000	TURUN	TURUN	145,000	675,000
Dana Desa	550,000	200,000	500,000	200,000	TURUN	SAMA	50,000	-
Dana anggaran dari pemerintah daerah	450,000	200,000	200,000	200,000	TURUN	SAMA	250,000	-
Dana pribadi atau keluarga	250,000	50,000	400,000	100,000	NAIK	NAIK	(150,000)	(50,000)
TOTAL	2,005,000	,820,204	1,390,000	1,005,000	TURUN	TURUN	615,000	815,204

B. Berdasarkan Kabupaten: Brebes, Pemalang dan Sumbawa

	NOMAL			PANDEMI			STATUS			KESEKJANGAN (NOMINAL)		
	Brebes	Pemalang	Sumbawa	Brebes	Pemalang	Sumbawa	STATUS			KESEKJANGAN (NOMINAL)		
							Brebes	Pemalang	Sumbawa	Brebes	Pemalang	Sumbawa
	EXPENDITURE											
Listrik, air, iuran	110,000	100,000	100,000	110,000	100,000	100,000	SAMA	SAMA	SAMA	-	-	-
Internet	100,000	100,000	100,000	160,000	150,000	200,000	NAIK	NAIK	NAIK	(60,000)	(50,000)	(100,000)
Alat tulis dan kertas	200,000	200,000	500,000	137,500	150,000	300,000	TURUN	TURUN	TURUN	62,500	50,000	200,000
Kegiatan ekstra-kurikuler	200,000	225,000	400,000	150,000	175,000	225,000	TURUN	TURUN	TURUN	50,000	50,000	175,000
Kegiatan gugus PAUD	150,000	120,000	200,000	153,869	120,000	200,000	NAIK	SAMA	SAMA	(3,869)	-	-
Gaji guru (total)	650,000	450,000	425,000	625,000	400,000	500,000	TURUN	TURUN	NAIK	25,000	50,000	(75,000)
Tunjangan guru (total)	400,000	400,000	1,500,000	275,000	300,000	1,900,000	TURUN	TURUN	NAIK	125,000	100,000	(400,000)
Gaji petugas sekolah	100,000	100,000	350,000	100,000	100,000	350,000	SAMA	SAMA	SAMA	-	-	-
Tunjangan petugas sekolah	100,000	100,000	600,000	100,000	100,000	500,000	SAMA	SAMA	TURUN	-	-	100,000
Pelatihan guru (non-gugus)	200,000	200,000	350,000	150,000	100,000	2,000,000	TURUN	TURUN	NAIK	50,000	100,000	(1,650,000)
TOTAL	2,210,000	1,995,000	2,102,500	1,961,369	1,695,000	1,828,185	TURUN	TURUN	TURUN	248,631	300,000	274,315
	INCOME											
Iuran orang tua	50,000	60,000	100,000	30,000	80,000	50,000	TURUN	NAIK	TURUN	20,000	(20,000)	50,000
SPP	400,000	550,000	410,000	300,000	200,000	165,000	TURUN	TURUN	TURUN	100,000	350,000	245,000
Dana Yayasan	250,000		340,000	250,000	125,000		SAMA	NAIK	TURUN	-	(125,000)	340,000
Dana Desa	2,000,000	300,000	3,000,000	650,000	300,000	3,250,000	TURUN	SAMA	NAIK	1,350,000	-	(250,000)
APBD	200,000	600,000		200,000	200,000		SAMA	TURUN		-	400,000	-
Dana pribadi atau keluarga	250,000	200,000	600,000	150,000	350,000	4,000,000	TURUN	NAIK	NAIK	100,000	(150,000)	(3,400,000)
TOTAL	3,150,000	1,710,000	2,430,000	1,580,000	1,255,000	1,417,500	TURUN	TURUN	TURUN	1,570,000	455,000	1,012,500

C. Berdasarkan tipe layanan: TK, KB, SPS

	NORMAL			PANDEMI			Status			Kesenjangan		
	Tipe layanan PAUD			Tipe layanan PAUD			Tipe layanan PAUD			Tipe layanan PAUD		
	TK	KB	SPS	TK	KB	SPS	TK	KB	SPS	TK	KB	SPS
	EXPENDITURE											
Listrik, air, iuran	150,000	100,000	100,000	135,000	100,000	100,000	TURUN	SAMA	SAMA	15,000	-	-
Internet	100,000	100,000	100,000	200,000	150,000	150,000	NAIK	NAIK	NAIK	(100,000)	(50,000)	(50,000)
Alat tulis dan kertas	200,000	250,000	200,000	150,000	150,000	150,000	TURUN	TURUN	TURUN	50,000	100,000	50,000
Kegiatan ekstra-kurikuler	200,000	250,000	145,000	200,000	200,000	150,000	SAMA	TURUN	NAIK	-	50,000	(5,000)
Kegiatan gugus PAUD	200,000	150,000	100,000	200,000	100,000	157,739	SAMA	TURUN	NAIK	-	50,000	(57,739)
Gaji guru (total)	750,000	450,000	300,000	800,000	500,000	250,000	NAIK	NAIK	TURUN	(50,000)	(50,000)	50,000
Tunjangan guru (total)	450,000	400,000	600,000	500,000	300,000	200,000	NAIK	TURUN	TURUN	(50,000)	100,000	400,000
Gaji petugas sekolah	150,000	110,000	75,000	150,000	110,000	100,000	SAMA	SAMA	NAIK	-	-	(25,000)
Tunjangan petugas sekolah	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	SAMA	SAMA	SAMA	-	-	-
Pelatihan guru (non-gugus)	200,000	250,000	100,000	250,000	150,000	100,000	NAIK	TURUN	SAMA	(50,000)	100,000	-
TOTAL	2,500,000	2,160,000	2,330,000	2,685,000	1,860,000	2,272,500	NAIK	TURUN	TURUN	(185,000)	300,000	57,500
	INCOME											
Iuran orang tua	800,000	50,000	45,000	150,000	70,000	25,000	TURUN	NAIK	TURUN	650,000	(20,000)	20,000
SPP	980,000	347,608	365,000	836,160	100,000	30,000	TURUN	TURUN	TURUN	143,840	247,608	335,000
Dana Yayasan	3,750,000	295,000	127,240	1,000,000	150,000	100,000	TURUN	TURUN	TURUN	2,750,000	145,000	27,240
Dana Desa	2,000,000	500,000	400,000	1,500,000	500,000	250,000	TURUN	SAMA	TURUN	500,000	-	150,000
APBD	200,000	425,000	600,000	200,000	200,000	200,000	SAMA	TURUN	TURUN	-	225,000	400,000
Dana pribadi atau keluarga	1,000,000	200,000	275,000	2,150,000	175,000	750,000	NAIK	TURUN	NAIK	(1,150,000)	25,000	(475,000)
TOTAL	8,730,000	1,817,608	1,812,240	5,836,160	1,195,000	1,355,000	TURUN	TURUN	TURUN	2,893,840	622,608	457,240

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)
Program kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia
Jalan Diponegoro No. 72
Jakarta Pusat, 10320
Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

ISBN 978-623-6080-03-0 (PDF)



9 786236 080030